LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LPPD TA. 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada kami, sehingga mampu menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah.

Penyampaian LPPD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Hulu Sungai Tengah selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini dimaksudkan guna bahan masukan bagi kami Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah masa jabatan 2025-2030 dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Semoga segala hal baik yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini dapat kami pertahankan dan tingkatkan, serta sebaliknya tak lupa kami meminta kepada seluruh pihak untuk bergandeng tangan dalam meningkatkan segala kelemahan pencapaian kinerja supaya Bumi Murakata menjadi lebih makmur, unggul, dan dinamis.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini dibuat, agar dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-11
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-98
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro II-1
2.2. Capaian Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan II-5
2.3. Capaian Kinerja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-32
2.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-36
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL IV-1
4.1 Urusan Pendidikan IV-1
4.2 Urusan Kesehatan IV-15
4.3 Urusan Pekerjaan Umum IV-60
4.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-62
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-67
4.6 Urusan Sosial IV-73
BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gambaran Umum Daerah

A. Dasar Pembentukan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai *Plaatslijke*. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai.Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan *resolusi* menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.Tuntutan panitia dan resolusi tersebut didukung oleh berbagai pihak seperti; Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan pada tanggal 28 Juni 1956, Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai pada tanggal 28 Juni 1956, Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin tanggal 4 Juli 1956, Surat Desakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : Des-637/IV/I/IV tanggal 6 September 1956 kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 4 Maret 1957.Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem-20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor: Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah *Swatantra* Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah *otonom* yang melaksanakan pembangunan daerah nya sendiri hingga saat ini.

Sebagai daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

B. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°33'16.650"-2°36'5.032" Lintang Selatan dan 115°9'17.003"-115°49'10.478" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak sepanjang 150 km dari Kota Banjarbaru yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Balangan
Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.587,75 km2 Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan cukup kecil yaitu hanya sebesar 3,92% dari total wilayah provinsi. Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Kecamatan Barabai dimana hanya memiliki luas wilayah 41,98 km2. Meskipun begitu, jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan di Barabai mencapai 6 kelurahan dan terdapat 12 wilayah yang statusnya desa. Jika dilihat secara agregrat, jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 11 kecamatan dengan wilayah administratif terkecil sebanyak 169 dengan rincian sebanyak 8 kelurahan dan 161 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 572,8 km2 atau mencapai 43,98% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: kawasan rawa, dataran rendah dan wilayah pegunungan meratus. Semuanya berada pada

ketinggian antara terendah (-6) – 7m seluas 24.586,15 ha, >7 - 25m seluas 30.839,69 ha, >25-100m seluas 22.251,72 ha, >100 - 500m seluas 49.030,5 ha, >500 -1.000m seluas 41.216,73 ha, dan tertinggi >1.000m seluas 9.152,63 ha, berada di gunung halau–halau/ gunung besar pegunungan meratus ± 1.851m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0 – 2 % seluas 132.517,72 ha, >2 – 15 % seluas 20.168,37 ha, >15 – 40 % seluas 21.336,86 ha dan>40 % seluas 3.054,46 ha.

Untuk *topografi* rawa yang tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan *hortikultura*. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayurmayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 daerah irigasi kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedang DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

Secara klimatologi, jumlah curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebanyak 175 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 140 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,04ºC sampai dengan 37,02º C.

Berdasarkan penggunaan lahan, terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa hutan lindung adalah seluas ± 60.622 ha yang meliputi di kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Haruyan dan Batang Alai Selatan; kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 656 ha di

Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai seluas 22.033 ha, kawasan sekitar mata air dan kawasan RTH; dan kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana berupa rawan tanah longsor, banjir dan kebakaran.Kawasan rawan tanah longsor seluas 1.500 ha meliputi wilayah pegunungan di kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. Kawasan rawan banjir seluas 29.930 ha khususnya pada kawasan sekitar aliran sungai Batang Alai, Barabai dan Haruyan.

Penggunaan kawasan lahan untuk budidaya terbagi atas kawasan hutan produksi tetap seluas 8.599 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.709 ha, kawasan budidaya pertanian seluas 34.994 ha, lahan pekarangan untuk bangunan seluas 6.413 ha, tegalan 13.372 ha, ladang seluas 12.015 ha, padang rumput seluas 1.075 ha, rawa yang tidak ditanami seluas 1.288 ha, kolam 108 ha, perkebunan 25.020 ha. Luas kawasan budidaya tersebar di semua kecamatan. Untuk topografi rawa yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, dan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan, budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau rawa. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian secara luas : padi dan hortikultura, perikanan, dan peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penanganannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, serta perkebunan karet, kelapa, serta tanaman lainnya.

Kawasan budidaya tersebar di semua kecamatan. Untuk topografi rawa yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, dan Labuan Amas Utara, budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi, hortikultura, dan tanaman purun. Kawasan rawa juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian secara luas : padi dan hortikultura, perikanan, dan peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak

besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, serta perkebunan karet, kelapa, serta tanaman lainnya.

C. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 tercatat berjumlah 272.140 orang, terdiri dari 137.179 orang laki-laki dan 134.961 orang perempuan. Pada tahun 2025 penduduk bertambah 5.352 jiwa, dengan wilayah seluas 1.587,75 km^2 maka tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2025 adalah 171,4 jiwa per km^2. Struktur penduduk menurut usia, jenis kelamin dan sex ratio dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
0-4	15,333
5-9	21,000
10-14	22,112
15-19	22,281
20-24	22,914
25-29	20,854
30-34	19,868
35-39	19,944
40-44	18,679
45-49	19,237
50-54	18,530
55-59	16,886
60-64	13,226
65-69	9,821
70-74	5,071
75+	6,384
Total	**272,140**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab HST Th.2025

Perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel I-2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024-2025
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2024	JUMLAH PENDUDUK 2025	LAJU PERTUMBUHAN
1	HARUYAN	22576	22632	0,25
2	BATU BENAWA	20858	20883	0,12
3	LABUAN AMAS SELATAN	30580	30642	0,20
4	LABUAN AMAS UTARA	29031	29166	0,47
5	PANDAWAN	36171	36194	0,06
6	BARABAI	56209	56329	0,21
7	BATANG ALAI SELATAN	24632	24673	0,17
8	BATANG ALAI UTARA	19310	19374	0,33
9	HANTAKAN	13248	13292	0,33
10	BATANG ALAI TIMUR	7506	7524	0,24
11	LIMPASU	11384	11431	0,41
TOTAL		**271.505**	**272.140**	**0,23**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HST Th. 2025

Perkembangan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2025
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	HARUYAN	6.126	2.242	8.368
2	BATU BENAWA	5.647	1.971	7.618
3	LABUAN AMAS SELATAN	8.297	2.925	11.222
4	LABUAN AMAS UTARA	8.137	2.638	10.775
5	PANDAWAN	9.723	3.095	12.818
6	BARABAI	15.079	4.851	19.930
7	BATANG ALAI SELATAN	6.797	2.461	9.258
8	BATANG ALAI UTARA	5.186	1.874	7.060

9	HANTAKAN	3.556	1.152	4.708
10	BATANG ALAI TIMUR	2.013	656	2.669
11	LIMPASU	3.169	946	4.115
TOTAL		**73.730**	**24.811**	**98.541**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah Th. 2025

Jumlah Kepala Keluarga pada Tahun 2025 berjumlah 98.541 KK. Komposisi Penduduk menurut Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-4
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2025
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Pendidikan	Tahun 2025
1.	Tidak/ Belum Sekolah	72161
2.	Belum Tamat SD	32522
3.	Tamat SD	70805
4.	SLTP Sederajat	38050
5.	SLTA Sederajat	43180
6.	Diploma I/II	1467
7.	Diploma III	2504
8.	S1	11104
9.	S2	340
10.	S3	7
Jumlah		272140

Sumber : DinasKependudukanDanPencatatanSipilKab. Hulu Sungai Tengah Th. 2025

Komposisi pendidikan penduduk masih dominan pada tingkat sekolah dasar baik tidak punya ijazah SD maupun punya ijazah SD yang mencapai 64,48%. Sedang komposisi penduduk yang berpendidikan tingkat menengah (SLTP dan SLTA) mencapai 29,85%. Sementara komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	80472
Pelajar/Mahasiswa	28733
Aparatur/Pejabat Negara	7549
Tenaga Pengajar	454
Tenaga Kesehatan	319
Pensiunan	2214
Wiraswasta	60778
Pertanian/Peternakan	42703
Lainnya	42703
Total	**265925**

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah Th. 2025

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan masih didominasi oleh jenis pekerjaan pertanian/ perkebunan.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel I.6
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	%	Kel	Desa	Rw	Rt
1.	Haruyan	104,81	6,66	-	17	51	103
2.	Batu Benawa	58,16	3,70	-	14	41	80
3.	Hantakan	227,57	14,46	-	12	36	60
4.	BatangAlai Selatan	80,51	5,12	1	18	51	90

5.	Batang Alai Timur	565,24	35,92	-	11	33	57
6.	Barabai	41,98	2,67	6	12	30	90
7.	Labuan Amas Selatan	90,4	5,75	1	17	51	91
8.	Labuan Amas Utara	166,22	10,56	-	16	40	102
9.	Pandawan	105,37	6,70	-	21	60	127
10.	Batang Alai Utara	71,52	4,55	-	14	42	82
11.	Limpasu	61,63	3,92	-	9	27	47
Jumlah		1.573,41	100	8	161	462	929

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. HST Th. 2025

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Tata kerja yang jelas
8. Fleksibilitas

Adapun jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I-7
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
Kab. HST Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Perangkat Daerah	45	-
2	Pegawai Pemerintah	5153	-

Sumber : BPKSDMD Kab. HST Th. 2025

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-8
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

No. Urut	URAIAN	Anggaran	Realisasi
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.057.093.517.611,66**	**1.821.547.727.939,29**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**262.994.521.811,00**	**289.655.460.797,29**
1.1.1	Pajak Daerah	30.848.734.000,00	36.868.038.669,00
1.1.2	Retribusi Daerah	37.351.402.575,00	8.316.087.147,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.316.087.147,00	8.316.087.147,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.478.298.089,00	236.109.043.003.29
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.748.642.327.485,66**	**1.486.435.598.827,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.531.535.800.287,00	1.376.598.329.812,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	217.106.527.198,66	109.837.269.015,00
1.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
2	**BELANJA DAERAH**	**2.353.335.150.532,00**	**1.967.907.759.170,56**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.598.559.709.191,00**	**1.347.683.113.832,56**
2.1.1	Belanja Pegawai	709.333.333.249,00	604.827.238.305,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	783.538.891.750,00	661.730.216.962,32
2.1.4	Belanja Subsidi	300.000.000,00	62.515.221,24
2.1.5	Belanja Hibah	72.125.481.192,00	48.711.263.344,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.262.000.000,00	32.351.880.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**482.874.805.439,00**	**404.513.079.736,00**
2.2.1	Belanja Tanah	10.992.639.013,00	3.381.372.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	151.897.003.512,00	137.635.056.060,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	118.745.592.917,00	112.120.865.824,00
2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.271.579.997,00	150.098.514.061,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.849.990.000,00	1.227.971.791,00

2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**13.286.744.252,00**	**1.410.395.000,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**258.613.894.650,00**	**214.301.170.602,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.775.402.521,00	3.839.426.798,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	253.838.492.129,00	210.461.743.804,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**(296.241.632.920,34)**	**(146.360.031.231,27)**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**306.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	361.136,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**	**0,00**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**296.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**159.881.601.689,07**

Sumber : BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *riil* saat perencanaan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (berdasarkan prioritas daerah). Hal ini bertujuan agar permasalahan daerah dapat terpetakan dan dijabarkan dalam berbagai permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berikut disajikan hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar terjadi dan/atau akan dihadapi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 mendatang, yang dirangkum berdasarkan 6 (enam) fokus agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Daerah
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Sosial Budaya
5. Birokrasi Pemerintahan
6. Lingkungan Hidup

Adapun permasalahan serta akar-akar masalah yang dapat dirangkum untuk setiap fokus agenda pembangunan tahun 2025 tersebut diatas, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I-9 Inventarisasi Permasalahan
Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

MASALAH	AKAR MASALAH
(1) SUMBER DAYA MANUSIA	
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Belum tercapainya SPM Pendidikan
	Rendahnya capaian APK SMP
	Rendahnya capaian APM SD dan SMP
	Rendahnya kompetensi tenaga pendidik
	Belum terpenuhinya standart tenaga pendidik sesuai Standar
	Rendahnya budaya literasi
	Minimnya pelayanan pendidikan di daerah terpencil
	Masih adanya penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah
	Fasilitas sekolah yang belum memadai (sarana prasarana pendidikan)

MASALAH	AKAR MASALAH
	Program / kurikulum muatan lokal yang belum menyentuh permasalahan dasar (pendidikan budi pekerti, kelestarian lingkungan yang berdasarkan keteladanan, pemahaman, latihan, pembiasaan, pembentukan karakter dan berbudaya)
	Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab masih belum maksimal (pemerintah, keluarga dan masyarakat)
Kurangnya mutu pelayanan kesehatan	AKI dan AKB yang masih tinggi (tertinggi di Prov. Kalsel)
	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan
	Kurang meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan kesehatan
	Tingginya kasus penyakit tidak menular
	Tingginya kasus penyakit menular
Tingginya tingkat kemiskinan penduduk	Rendahnya akses rumah layak huni
	Rendahnya akses sanitasi
	Rendahnya akses air minum
	SPM sosial belum tercapai (tidak semua PMKS sudah mendapat perlindungan sosial)
	Masih tingginya keluarga pra sejahtera
	Lemahnya Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Keluarga serta Lemahnya

MASALAH	AKAR MASALAH
	Ketahanan Ekonomi Keluarga
Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Masih kurangnya kompetensi dan pendidikan informal bagi masyarakat
	Terbatasnya Kesempatan Kerja
Belum optimalnya kualitas perempuan dan pemuda	Kurangnya pembinaan perempuan dan pemuda
	Rendahnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas
	Minimnya sarana dan prasarana pembinaan perempuan, pemuda dan olahraga
(2) PEREKONOMIAN DAERAH	
Tingginya tingkat kemiskinan penduduk	Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga
Belum optimalnya kualitas pemuda dan olahraga	Peran aktif pemuda dalam berorganisasi masih rendah
	Peran aktif kewirausahaan pemuda masih rendah
	Prestasi olahraga masih rendah
Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya Kompetensi tenaga kerja, kurangnya kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja masih lemah
Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah/nasional	Belum optimalnya pembangunan pertanian modern
	Komoditas pertanian potensial belum dikembangkan secara maksimal

MASALAH	AKAR MASALAH
	Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) masih rendah
	Kawasan agropolitan belum dikembangkan secara optimal
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
	Budidaya perikanan masih rendah dan masih terjadinya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan
Belum optimalnya kewirausahaan koperasi dan UKM	Masih terbatasnya kemitraan, kapasitas usaha, akses permodalan, peluang usaha dan inovasi serta nilai tambah Koperasi dan UKM
Rendahnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi	Produktivitas industri pengolahan masih rendah
	Masih rendahnya iklim usaha dan promosi investasi
Belum optimalnya pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa	IKM berbasis pertanian belum berkembang dengan baik
	Infrastruktur pendukung sektor perdagangan belum optimal bahkan mengalami kerusakan akibat banjir bandang
	Belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis daerah sebagai pusat logistik
Belum berkembangnya potensi ekonomi non basis	Pertumbuhan dan daya saing destinasi wisata berbasis masyarakat masih rendah

MASALAH	AKAR MASALAH
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang ekonomi	UMKM masih terbatas dalam penggunaan teknologi dan pemasaran online
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah masih rendah	Belum optimalnya pengelolaan berbagai potensi obyek pajak dan retribusi daerah
(3) INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG	
Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perdesaan	Penataan ruang belum diselenggarakan secara optimal
	Kurangnya prasarana dan sarana pertumbuhan wilayah/kawasan strategis
	Masih kurangnya infrastruktur perkotaan dan perdesaan terutama terkait penuntasan genangan dan kenyamanan kota serta konektivitas wilayah
	Kurang sinergitasnya pembangunan daerah dengan pemerintahan desa dalam pengembangan kawasan perdesaan
	Belum terpenuhinya cakupan layanan dan

MASALAH	AKAR MASALAH
Belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	kualitas air bersih
	Belum terpenuhinya cakupan layanan sanitasi
	Masih terdapat rumah tidak layak huni
	Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kawasan Perumahan dan permukiman, termasuk kawasan kumuh
Keamanan dan keselamatan transportasi belum handal	Belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi
(4) SOSIAL BUDAYA	
	Menurunnya praktek tradisi keagamaan
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum mantapnya pemahaman dan pengamalan agama	Menurunnya akhlak dan budi pekerti
Menurunnya ketahanan social dan budaya	Berkembangnya pergaulan bebas di kalangan remaja
	Tingginya angka kriminalitas
	Berkembangnya penyakit masyarakat
	Menurunnya jiwa kegotongroyongan
Belum mantapnya wawasan kebangsaan masyarakat	Masih adanya potensi anarkisme
(5) BIROKRASI PEMERINTAHAN	

MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas pelayanan publik yang belum optimal	Kurangnya peningkatan fasilitasi pelayanan kemasyarakatan
	Tidak adanya SOP dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan
	Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belum optimalnya kinerja SDM aparatur
	Rendahnya disiplin PNS/ASN
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya kinerja instansi pemerintah daerah
	Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai peraturan-perundangan
	Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal
	Pengendalian dan evaluasi masih lemah
	Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah
	Belum optimalnya pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah
	Kurang kuatnya kelembagaan organisasi pemerintah daerah
(6) LINGKUNGAN HIDUP	
	Pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan

MASALAH	AKAR MASALAH
Kualitas lingkungan hidup semakin menurun	hidup masih tinggi
	Masih adanya ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup Pegunungan Meratus
	Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau perkotaan
Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya upaya pengurangan sampah
	Belum optimalnya upaya penanganan sampah
Terjadinya bencana alam	Belum tersedianya informasi tingkat kerawanan bencana
	Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana
	Belum optimalnya penanganan bencana dan pasca bencana

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut pelayanan, pemerintahan dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
		- Belum optimal dan meratanya akses layanan pendidikan terutama di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), dikarenakan kondisi geografis dan infrastrukturnya yang tidak mendukung - Masih kurang dan tidak meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu terutama di daerah 3T

1	PENDIDIKAN	- Masih rendahnya daya saing pemenuhan pelayanan pendidikan atas tuntutan kebutuhan masyarakat dalam layanan pendidikan yang baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang terus meningkat dan relevansinya terhadap perkembangan zaman
		- Belum optimal dan meratanya kemampuan menajerial kepala sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan
		- Kurangnya pemahaman tentang arti penting pendidikan oleh masyarakat
		terutama di daerah 3T, maupun pada masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah
		- Masih rendahnya budaya literasi dikalangan pelajar
		- Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar .
2	KESEHATAN	- Belum optimalnya pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, sehingga capaian SPM masih belum tercapai dengan baik. Sebagian besar anggaran yang ada bersumber dari DAK Non Fisik, sementara sasaran penggunaannya terikat oleh Juknis DAK. - Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yang memenuhi standar, karena kurangnya peningkatan kompetensi serta pengadaan tenaga SDM Kesehatan.
		- Belum lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar
		- Masih kurangnya upaya peningkatan pengetahuan dan skill serta integritas SDM Kesehatan, demi menunjang kelancaran penyelenggaran pemerintahan urusan kesehatan.
		- Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi permukaan dalam

		mendukung ketahanan pangan - Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi rawa dalam rangka pemanfaatan daerah rawa
		- Adanya potensi daya rusak air terhadap sungai akibat dampak kerusakan banjir
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa serta sumber daya air lainnya
		- Belum cukup tersedianya sistem informasi data hidrologi
		- Belum optimalnya transportasi arus barang dan jasa antar titik pertumbuhan (bidang bina marga)
		- Belum optimalnya upaya peningkatan akses sarana dan prasarana transportasi ke daerah terpencil
		- Belum optimalnya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ke seluruh wilayah Kabupaten HST
		- Belum optimalnya pembangunan prasarana publik
		- Belum optimalnya penyediaan kebutuhan air minum/ air bersih bagi masyarakat, serta masih terbatas pelayanannya untuk menjangkau seluruh wilayah permukiman, lebih khusus ke pedesaan
		- Belum optimalnya keselarasan perencanaan tata ruang bidang tata ruang dan bidang pertanahan
		- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penataan ruang
		- Belum optimalnya kompetensi tenaga ahli konstruksi
		- Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan konstruksi berbasis kompetensi

		- Masih sangat kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pelaku jasa konstruksi
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Belum optimalnya peran serta Pokja PKP dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Semakin bertambahnya target penanganan PSU yang harus dilaksanakan, dikarenakan semakin pesatnya perkembangan perumahan subsidi di Kab.HST beserta penyerahan aset PSU nya.
		- Belum fokusnya penanganan 7 indikator kekumuhan, karena Dinas Perkim hanya bisa menangani 2 indikator kekumuhan yaitu drainase dan jalan lingkungan. Sedangkan untuk 5 indikator lain diampu oleh Dinas lain.
		- Belum optimalnya upaya pencegahan pertumbuhan RTLH, sehingga menambah jumlah RTLH yang perlu ditangani setiap tahunnya.
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	- Masih belum lengkapnya Data Kajian yang harus dimiliki SKPD lain yang juga berkontribusi untuk
		mengoptimalkan mitigasi penanganan penanggulangan bencana.
		- Rusaknya Early Warning System yang ada di Kab. HST, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan peringatan dini apabila akan terjadi bencana.
		- Belum tersedianya Perahu karet di setiap Kecamatan, untuk penanganan banjir
		- Belum memadainya sarana prasarana penunjang pengolahan data di Sekretariat.
		- Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang bisa memicu

		terjadinya Karhutla
		- Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah
		- Keterbatasan SDM yang tersedia di BPBD HST.
		- Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah
		- Kurangnya sosialisasi dan kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar Peraturan Daerah
		- Masih perlunya pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional PPNS yang bersertifikat
		- Masih diperlukannya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi standar
6	SOSIAL	- Masih adanya data terkait urusan Sosial yang kurang akurat - Belum terlaksananya perbaikan rumah singgah secara maksimal karena keterbatasan anggaran
		- Masih adanya data terkait urusan Sosial yang kurang akurat
		- Masih adanya kasus penyaluran bantuan sosial yang tidak lancar, terutama yang berasal dari Kemensos sehingga gagal salur, saldo nol.
		- Perlunya dilaksanakan sinkronisasi terkait data kemiskinan, antara data yang dimiliki Dinsos dengan acuan data dari Kemensos yang lebih lengkap dan relatif akurat; dibandingkan dengan data yang selama ini digunakan yaitu dari BPS
		yang sumber datanya terkadang adalah acak dan hanya sampel.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	
	PELAYANAN DASAR	

7	TENAGA KERJA	- Rendahnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja - Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi
		- Rendahnya kompetensi tenaga kerja
		- Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, seiring dengan Lajunya perkembangan pertumbuhan penduduk.
		- Perlunya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
		- Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan tentang aturan ketenagakerjaan
		- Belum optimalnya penerapan berbagai peraturan Ketenagakerjaan terhadap buruh, pekerja dan pengusaha.
		- Belum optimalnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak dalam hal pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja.
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Masih banyaknya kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak yang belum dilaporkan.
		- Peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan pemerintah belum terpenuhi secara kuota ideal
		- Belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di dalam kursi parlemen
		- Masih rendahnya peran perempuan di dalam tahapan pembangunan dan penganggaran perangkat daerah, BUMN/BUMD, Dunia Usaha, dsb.
		- Belum optimalnya distribusi pangan secara merata sehingga menimbulkan

		gejolak harga (fluktuasi)
9	PANGAN	- Belum optimalnya ketersediaan Cadangan Pangan, baik Cadangan Pangan Pemerintah maupun Cadangan Pangan Masyarakat
		- Belum optimalnya kampanye bahan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman untuk konsumsi
		- Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar
10	PERTANAHAN	- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan, karena urusan Pertanahan dan Tata Ruang tidak berada dalam satu atap (satu instansi), sehingga cukup menghambat koordinasi terkait dengan pelaksanaan rekomendasi pertanahan karena erat kaitannya dengan Tata Ruang - Terbatasnya SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah, pemetaan dan pendataan pertanahan
11	LINGKUNGAN HIDUP	- Belum Optimalnya Penanganan Sampah - Belum Optimalnya Fasilitasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3
		- Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persampahan
		- Belum Optimalnya Pencegahan serta Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		- Belum Optimalnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
		- Belum Optimalnya Kegiatan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		- Rendahnya Kompetensi Tenaga Pengawas Lingkungan Hidup

		- Belum Adanya Layanan Digital (online) Aduan Sengketa Lingkungan, Informasi Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		- Belum adanya Database Digital data/Kajian Lingkungan
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Belum tersedianya SDM yang berkualitas dan professional di bidangnya untuk penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi kependudukan
		- Belum tersedianya perangkat teknis dan pendukung sesuai standar untuk
		pelayanan administrasi kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa - Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menampung aspirasi masyarakat desa
		- Belum optimalnya pemerintahan desa dalam membina lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat
		- Belum optimalnya ketertiban administrasi pemerintahan desa
		- Belum optimalnya peran fasilitasi, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
		- Belum Optimalnya kinerja Program dan Kegiatan Kerjasama antar desa dan Kawasan Perdesaan
		- Belum optimalnya kinerja BUMDes dan BUMADes serta Pengelolaan

		Pasar Desa
		- Belum Optimalnya keberadaan Posyantek, TTG dan usaha ekonomi kreatif desa
		- Belum optimalnya kerjasama antar desa dan antar pihak ketiga
		- Belum optimalnya pembentukan kawasan perdesaan
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Masih rendahnya pemakaian Metode Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP : IUD, MOP, MOW, dan IMPLAN) jika dibandingkan dengan NON MKJP : SUNTIK, PIL, KONDOM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		- Belum optimalnya upaya peningkatan KIE yang dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam rangka meningkatkan kualitas pemakaian alat kontrasepsi dari Non MKJP ke MKJP di masyarakat.
15	PERHUBUNGAN	- Belum Optimalnya Penataan Kawasan Terminal Tipe-C serta Kawasan Parkir
		- Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLAJ yang memenuhi standar
		- Belum Optimalnya Pemenuhan Tenaga Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis komunikasi dan informatika
		- Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik, serta penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik
		- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

16		kominfo
		- Masih adanya area blankspot di wilayah Kabupaten HST yang belum terfasilitasi jaringan komunikasi
		- Belum optimalnya penyediaan jaringan internet yang cepat dan lancar bagi instansi atau masyarakat
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	- Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki surat perizinan kelayakan atas bangunan koperasi
		- Belum tersedianya tenaga fungsional pengawas koperasi, serta SDM Bidang Koperasi yang bersertifikat Uji Kompetensi Penilaian Kesehatan
		- Masih banyaknya pengurus koperasi yang belum melaksanakan regenerasi kepengurusan
		- Belum tersedianya data UMKM yang valid
		- Masih adanya mindset yang salah oleh pelaku UKM terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM
		- Belum tersedianya bangunan khusus sebagai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau tempat/rumah UMKM untuk produk-produk UMKM
18	PENANAMAN MODAL	- Masih rendahnya realisasi investasi daerah
		- Masih rendahnya iklim usaha dan promosi investasi
		- Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam (hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan)
		- Belum optimal dan kurang responsifnya pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat

		- Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang memadai dan sesuai standar
		- Belum optimalnya pemenuhan aspek-aspek pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
		- Belum optimalnya penyusunan SOP dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, serta upaya optimalisasi kinerja SDM aparatur sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang menjadi aset daerah Pemkab HST.
		- Kurangnya kualitas atlet dan tenaga keolahragaan yang profesional di daerah.
		- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan – kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga di Kab HST.
		- Belum optimalnya upaya peningkatan wawasan kepemimpinan serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya peningkatan untuk menghasilkan pemuda yang mandiri berwirausaha.
		- Belum optimalnya peningkatan SDM pemuda untuk meningkatkan IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)
20	STATISTIK	- Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis statistik
		- Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
		- Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis keamanan informasi dan persandian

21	PERSANDIAN	- Belum optimalnya upaya pencegahan serta penanganan atas serangan siber/hacker terhadap sistem aplikasi pemerintah
22	KEBUDAYAAN	- Masih kurangnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap seni budaya daerah dan masih belum optimalnya kreativitas pelaku seni
		budaya dalam adaptasi perkembangan zaman
		- Belum optimalnya intensitas pembinaan kebudayaan dan pelestarian terhadap warisan budaya
		- Belum adanya museum yang memadai sebagai wadah pelestarian dan pembinaan seni dan budaya
23	PERPUSTAKAAN	- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan
		- Belum lengkapnya bahan pustaka
		- Kurangnya SDM atau tenaga kepustakaan
		- Belum optimalnya pembinaan terhadap perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa
24	KEARSIPAN	- Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan
		- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kearsipan
		- Belum tersedianya Petugas Pengelola kearsipan di setiap SKPD
		- Belum adanya Tenaga Fungsional Arsiparis
		- Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
		- Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan, yang menyebabkan tingginya biaya produksi

		- Kurangnya tenaga teknis yang menangani Balai Benih Ikan
		- Pelaku usaha sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Kurangnya wawasan dalam diversifikasi produk olahan perikanan serta tidak adanya pengetahuan tentang cara pengemasan produk olahan hasil perikanan
		- Belum adanya kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang mempunyai SKP (Sertifikat Kelayakan Kelompok)
		- Masih sangat rendahnya kemauan Poklahsar untuk berswadaya dan mengembangkan produk olahan hasil perikanannya
		- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari
		- Terkendalanya aksesbilitas infrastruktur di wilayah objek wisata yang ada di Kab.HST
26	PARIWISATA	- Minimnya wawasan kepariwisataan / SDM di masyarakat setempat
		- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan atau event-event
		- Belum optimalnya hasil produksi pertanian dikarenakan adanya perubahan iklim, adanya bencana alam dan makin sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi
		- Belum optimalnya dalam upaya pengendalian hama dan penyakit
		- Belum optimalnya penggunaan air

		untuk pertanian, karena keterbatasan saluran irigasi tersier
27	PERTANIAN	- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi hewan/ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan, dll; sehingga masih ditemui adanya kasus penyakit endemik dan hewan menular di masyarakat
		- Belum optimalnya bantuan bibit ternak bagi masyarakat serta belum berskala usaha, sehingga menghambat peningkatan pendapatan masyarakat di bidang peternakan
		- Masih rendahnya mekanisasi peralatan dan sarana pendukung kegiatan usaha peternakan dalam upaya optimalisasi produksi serta efesiensi tenaga kerja bidang peternakan
		- Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, serta nilai tambah dan daya saing produk perkebunan di pasaran
		- Masih perlunya perluasan areal perkebunan, karena perubahan RTRW yang belum tuntas serta sebagian lahan yang masih berstatus kawasan kehutanan
		- Belum optimalnya upaya menciptakan perkebunan yang ramah lingkungan
		- Masih kurangnya jumlah penyuluh pertanian, serta masih rendahnya SDM Pertanian
		- Belum adanya penetapan kawasan pasar secara definitif, dan tidak semua kecamatan memiliki pasar
		- Belum optimalnya pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok di Kab HST
		- Belum terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal
		- Belum terbentuknya Unit Metrologi

28	PERDAGANGAN	Legal di Kab HST
		- Belum terpenuhinya bangunan yang memenuhi standar kemetrologian
		- Belum terlaksananya verifikasi peralatan kemetrologian
		- Belum optimalnya pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas kab/kota) karena belum dapat dilakukan pendataan produknya dan media kampanyenya
29	PERINDUSTRIAN	- Belum rampungnya dokumen RPIK sebagai aturan membangun Kawasan Industri
		- Mindset pengusaha yang masih sederhana untuk mengembangkan pembangunan kawasan industri
		- Belum adanya pusat layanan informasi untuk IKM BERKEMBANG
		- Masih adanya mindset wirausaha yang berpikir bahwa dengan adanya IKM akan ada penarikan pajak; serta berpikir bahwa tanpa IKM pun, usahanya masih bisa tetap berkembang.
		- Masih adanya beberapa IKM Pangan yang belum mengetahui kewajiban atas kehalalan produk
		- Belum dilaksanakannya sosialisasi sistem pelaporan informasi industri
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
30	SEKRETARIAT DAERAH	- Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai aturan yang berlaku, diantaranya karena masih belum tersedianya jabatan fungsional PPBJ,
		serta belum terintegrasinya SOP pengadaan barang/jasa
		- Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemkab HST

		- Belum terimplementasikannya Program Reformasi Birokrasi (RB) secara optimal pada Pemkab HST
		- Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		- Belum tersusunnya profil kelembagaan yang profesional, efektif, tepat ukuran dan tepat fungsi, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi
		- Belum dilakukannya pengukuran atas efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja secara periodik
		- Belum dilakukannya evaluasi struktur, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara efektif dan efisisen serta terukur dengan sasaran dan target kinerja
		- Belum optimalnya pemenuhan kebijakan pembentukan produk hukum daerah
		- Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pelayanan keuangan Perangkat Daerah
31	SEKRETARIAT DPRD	- Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang ada, dianggap masih belum sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta Program dan Kegiatan yang ada.
		- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain : Belum tersedianya ruang kerja Fraksi untuk menunjang fasilitas pimpinan dan anggota DPRD; serta belum tercukupinya sarana kerja Sekretariat DPRD dan sarana kerja untuk mendukung fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
32	PERENCANAAN	- Belum optimalnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah

		- Mekanisme perencanaan pembangunan kurang berjalan dengan baik
		- Lemahnya basis data dan informasi perencanaan
		- Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah
		- Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan daerah dengan nasional
		- Kurangnya data dan informasi yang akurat, konsisten dan tersedia tepat waktu
		- Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundangan
		- Belum optimalnya proses penyusunan penganggaran
		- Belum optimalnya proses politik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
		- Terbatasnya kapasitas dan kompetensi SDM
33	KEUANGAN	- Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah - Belum optimalnya kualitas pengelolaan aset daerah
		- Masih adanya beberapa wilayah yang belum memiliki NJOP, sehingga menyulitkan dalam menentukan dasar pengenaan BPHTB, dll
		- Terbatasnya SDM yang tersedia, serta kurang maksimalnya petugas pendata PBB baru dalam pelaksanaan di lapangan.
		- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendataan PBB baru
		- Masih adanya data PBB-P2 yang belum akurat

		- Masih adanya masalah SPPT PBB- P2 yang belum tersalurkan kepada wajib pajak
		- Belum optimalnya upaya meningkatkan potensi pendapatan yang belum termasuk dalam objek pajak dengan melaksanakan perhitungan potensi objek pajak dan retribusi Daerah
		- Belum optimalnya penegakan Perda tentang Perpajakan dan retribusi Daerah bekerjasama dengan pihak terkait
		- Belum terlaksananya penyempurnaan regulasi secara maksimal dengan memperbaharui peraturan sesuai dengan kondisi atau peraturan diatasnya
		- Belum terbentuknya persepsi yang sama dengan dinas atau instansi terkait mengenai peningkatan pendapatan daerah di bidang pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor sektor lainnya.
34	KEPEGAWAIAN	- Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai Anjab dan ABK, dikarenakan usulan kebutuhan formasi tidak sepenuhnya disetujui KEMENPAN RB RI - Belum terpenuhinya Data yang akurat dikarenakan belum terintegrasinya data antar instansi Pusat dan Daerah
		- Belum terlaksananya Talentpool (manajemen talenta) di lingkup Pemkab HST
		- Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja ASN di lingkup Pemkab HST secara baik
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	- Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS (melalui Diklat), dimana seharusnya dilakukan paling sedikit 20 JPL dalam 1 tahun sesuai PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN

36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	- Rendahnya inovasi dalam proses perencanaan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan
		- Kurangnya dukungan kajian ilmiah dalam penyusunan perencanaan
		- Belum optimalnya koordinasi dan pemahaman dengan stake holder dan mitra kerja
		- Belum maksimalnya pemanfaatan dana pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat dan swasta/masyarakat
		- Terbatasnya penggunaan teknologi informasi, serta belum terintegrasinya sistem informasi secara optimal
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
37	INSPEKTORAT DAERAH	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
		- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pengawasan yang transparan, akuntabel dan profesional
		- Keterbatasan SDM yang tersedia, khususnya terkait pejabat Auditor
	UNSUR KEWILAYAHAN	
		- Belum harmonisnya tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah kecamatan
		- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di kecamatan, serta standar pelayanan kepada masyarakat
		- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang transparan, akuntabel dan profesional
		- Kurangnya aparatur pemerintahan serta terbatasnya SDM di Perangkat Daerah Kecamatan

38	KECAMATAN	- Belum mantapnya pemahaman dan pengamalan agama dan norma sosial, serta belum kokohnya wawasan kebangsaaan dan nasionalisme di masyarakat
		- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan penanganan Kamtibmas dan pelindungan masyarakat, sehingga masih tinggi tingkat penyakit masyarakat dan kriminalitas di desa- desa
		- Masih rendahnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa
		- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di desa
		- Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa, khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki kondisi geografis pegunungan, sehingga beberapa desa sulit untuk diakses, dan belum tersedia jaringan komunikasi dan infrastruktur yang memadai
		- Belum optimalnya perencanaan, pengukuran dan implementasi kinerja
		di Kecamatan ataupun di pemerintahan desa/kelurahan
		- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan- perundangan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
		- Terbatasnya regulasi pemerintah yang mengatur pelaksanaan urusan kesbangpol di daerah kabupaten - Terbatasnya sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan kesbangpol di daerah kabupaten, yang meliputi personil, pendanaan, peralatan, dan metode.

39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	- Masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah daerah terhadap arti penting urusan kesbangpol bagi daerah kabupaten.
		- Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; terhadap dinamika politik nasional dan daerah serta eksistensi ormas; serta tentang kewaspadaan dini terhadap ATHG yang sewaktu-waktu dapat mengancam stabilitas.
		- Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.
		- Masih adanya potensi konflik di daerah yang belum dapat sepenuhnya diatasi.
		- Masih adanya potensi ATHG yang belum sepenuhnya dapat dideteksi dengan baik seperti banjir, kebakaran, dan karhutla.

B. Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029 ditetapkan yakni **"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat"**.

Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2025-2029, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang menjadi pilar pembangunan:.

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menanamkan nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan yang merata, serta menjunjung tinggi martabat daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini juga diharapkan mampu menjadi landasan utama dalam mempersiapkan Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik yang kokoh di masa depan. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Religius menggambarkan Pemerintahan yang jujur, adil, bermanfaat dan disiplin serta Masyarakat yang aman dan tenteram dengan berlandaskan Agama. Religius menggambarkan bahwa dalam aspek hidup bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan

pemerintahan nilai-nilai moral, etika dan agama menjadi pedoman dan landasan dalam menciptakan harmoni sosial, memperkuat solidaritas, kerjasama dan kolaborasi, tidak diskriminatif yang menciptakan konflik bernuansa SARA. Religius juga digambarkan dengan terjadinya peningkatan praktikpraktik dan tingkat pemahaman keagamaan baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek kehidupan bermasyarakat ditandai dengan semakin makmurnya kegiatan keagamaan di masyarakat ataupun berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga akan terlihatnya nuansa keagamaan di segala lini aktifitas masyarakat. Pada kehidupan ekonomi ditandai dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syariah, peningkatan perdagangan produk halal serta penguatan potensi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan terjadinya peningkatan karakter pemerintahan yang berakhlak, budaya kerja yang berbasis religius. Nilai-nilai kejujuran, keadilan dan disiplin serta berorientasi kebermanfaatan bagi masyarakat menjiwai setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator elemen visi ini adalah angka konflik yang bernuansa SARA, semakin efektifnya pengendalian korupsi, dan angka kriminalitas.

2. **Sejahtera** menggambarkan kehidupan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Tingkat kemiskinan yang rendah. Pembangunan yang dapat mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman. Pembangunan yang dilakukan berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan, hak, dan kepentingan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Sejahtera juga mengacu pada pembangunan yang menghormati martabat, kebebasan, dan keadilan sosial bagi semua orang, serta mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Sejahtera adalah kondisi dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia dan pendapatan masyarakat. Indikator pencapaian pokok visi Sejahtera adalah PDRB Per Kapita, ketimpangan pendapatan yang rendah dan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2029. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan bertumpu pada pengembangan kegiatan ekonomi sektor jasa dan logistik, meliputi distribusi logistik, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya, pusat produksi hasil-hasil pertanian, penyimpanan/transit barang, distribusi dan transportasi, pengelola informasi, dan penyedia barang dari hilirisasi industri sumber daya lokal

3. **Maju** adalah kondisi dimana selalu terjadi peningkatan, perkembangan atau bergerak dinamis ke arah yang lebih baik baik, lebih tinggi, lebih sejahtera, lebih unggul. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh dan inovatif. Hal ini ditandai dengan perekonomian yang selalu tumbuh positif, PDRB daerah yang semakin besar dan kuat serta berkelanjutan.
4. **Berdaya saing dan unggul** adalah suatu kondisi yang lebih baik, lebih kuat, cakap dari yang lain-lain. Suatu kondisi yang menunjukkan kelebihan atau kemenangan atas yang lain. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menciptakan suatu kondisi daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari daerah sekitar yang ditandai dengan meningkatknya daya saing sumberdaya manusia, sarana Infrastruktur wilayah dan pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Unggul juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi lokal serta memperluas kerjasama-kerjasama baik regional, nasional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dan indikator IPM, dengan sarana prasarana wilayah yang mampu mendorong perwujudan perkuatan pondasi sebagai pusat kegiatan jasa dan logistik wilayah sekitarnya khususnya klaster banua anam, pelayanan umum yang tinggi serta terjalinnya kerjasama-kerjasama nasional dan internasional.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan.
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Keterkaitan antara Misi yang ditetapkan dengan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut

Kata Kunci Visi	MISI
RELIGIUS **SEJAHTERA** **BERMARTABAT**	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya.
	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan pri nsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan.
	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
	Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

C. Program Pembangunan Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,80	74,33	74,82	75,31	75,80	76,29
- Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya			Tingkat Kemiskinan ((%))	5,43	5,26	4,88	4,50	4,12	372
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Indeks Kesehatan (*)	88,12	88,57	89,02	89,47	89,92	90,37
- Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	72,87	73,14	73,41	73,68	73,95	74,22
			Indeks Pendidikan (*)	62,30	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67
menyeluruh dari hulu dan			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,36	12,40	12,45	12,50	12,55	12,60
hilirisasi pertanian serta			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,39	8,43	8,47	8,51	8,55	8,60
sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan			Indeks SPM Pendidikan (Indeks)	86,64	87,41	88,18	88,95	89,72	90,50
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini (Indeks)	0,216	0,213	0,210	0,207	0,204	0,200
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	0,695	0,645	0,595	0,545	0,495	0,445
			Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)	0,137	0,133	0,129	0,125	0,121	0,117
- Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04	3,00	2,93	2,87	2,80	2,73
		Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	64,01	65,26	67,51	68,76	70,01	71,26
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	56,75	57	57,25	57,5	57,75	60
			Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA (Kali)	0	0	0	0	0	0
- Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	35,90	39,36	42,83	46,27	49,75	57,89
			Indeks Daya Saing Daerah						

			(Angka)	3,70	3,78	3,85	3,90	3,97	4,00

			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,20	5,60	6,00	6,50	7,10
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (%)	3,75	3,90	4,20	4,50	4,87	5,31
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Industri Pengolahan (%)	3,49	3,60	4,00	4,40	4,90	5,50
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makan dan Minum (%)	6,86	7,14	7,70	8,27	8,98	9,83
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (%)	4,13	4,35	4,79	5,23	5,78	6,44
			Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa (%)	6,36	6,49	6,75	7,01	7,34	7,93
			Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	204,5	250,4	300,48	371,88	464,85	600,31
		Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	12,65	12,70	13,00	13,66	14,75	15,08
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	21,50	21,75	22,00	22,25	22,50	22,75
			Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rupiah)	86,39	116,62	151,60	197,08	266,00	345,82
			Nilai Ekspor (triliun rupiah)	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
			Tingkat Inflasi ((%))	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	72,00	73,54	73,70	73,87	74,03	74,20
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	125,00	124,11	123,41	122,71	122,01	120,31
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	62,89	65,75	68,70	71,62	74,39	76,86
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	1,46	1,43	1,34	1,25	1,15	1,04

			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51

	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & Ber Akhlak		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72,00	72,38	75,25	78,13	81,00	81,20
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (*)	71,50	73,00	75,00	77,50	80,50	82,50
			NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD) (Angka)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2
			Opini BPK (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,55	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,5	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	-	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
		Meningkatnya integritas pemerintah daerah	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,164	3,293	3,422	3,551	3,680	3,809
			Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	3,045	3,148	3,252	3,355	3,459	3,562
			Nilai Survei Penilaian Integritas (*)	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00

Program Pembangunan yang merupakan Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					615.008.544.517,00		760.391.697.002,00		775.653.461.789,00		785.055.461.917,00		797.380.695.451,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					347.312.635.461,00		348.991.471.202,00		348.060.680.964,00		348.928.118.717,00		348.323.215.126,00	
Meningkatnya penyelenggaraan kesekretariatan penunjang urusan pemerintahan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	95	95	347.312.635.461,00	95	348.991.471.202,00	95	348.060.680.964,00	95	348.928.118.717,00	95	348.323.215.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	0	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					100.394.576.876,00		140.964.316.450,00		156.676.771.475,00		164.699.233.850,00		177.149.270.975,00	
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)	0	45,00	46,00	100.394.576.876,00	47,00	140.964.316.450,00	48,00	156.676.771.475,00	49,00	164.699.233.850,00	50,00	177.149.270.975,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)	0	95,40	95,45		95,50		95,55		95,60		95,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)	0	88,26	88,76		89,26		89,76		90,26		90,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)	0	91,00	91,00		91,00		92,00		93,00		94,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)	0	84,44	84,69		84,94		85,19		85,44		85,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					166.463.850.000,00		269.355.950.000,00		269.706.050.000,00		270.098.150.000,00		270.448.250.000,00	

Terwujudnya Pembelajaran yang Merata dan Berkualitas di Satuan Pendidikan	Persentase Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru (%)	0	0	90	166.463.850.000,00	90	269.355.950.000,00	95	269.706.050.000,00	95	270.098.150.000,00	95	270.448.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					137.482.180,00		259.959.350,00		259.959.350,00		259.959.350,00		259.959.350,00	
Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Numerasi (Angka)	0	81,215	83,215	137.482.180,00	85,215	259.959.350,00	87,215	259.959.350,00	89,215	259.959.350,00	90,215	259.959.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Literasi (Angka)	0	80,215	81,215		82,215		83,215		84,215		85,215		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					700.000.000,00		820.000.000,00		950.000.000,00		1.070.000.000,00		1.200.000.000,00	
Tersusunnya buku cerita anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	0	90	700.000.000,00	90	820.000.000,00	95	950.000.000,00	95	1.070.000.000,00	95	1.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					636.468.080.000,00		698.969.671.195,00		718.246.679.601,00		730.814.858.472,00		767.185.056.854,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					353.943.621.790,00		379.378.363.182,00		402.316.199.497,00		428.347.819.433,00		453.682.601.369,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	70	75	353.943.621.790,00	80	379.378.363.182,00	85	402.316.199.497,00	90	428.347.819.433,00	95	453.682.601.369,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	68	70	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	-	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	IKM Layanan BLUD (%)	86,78	88	89		90		91		92		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Peningkatan Pendapatan BLUD RS (%)	1,47	1,5	1,6		1,7		1,8		1,9		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					273.791.541.620,00		312.798.383.826,00		309.092.512.526,00		295.579.524.630,00		306.560.439.563,00	
Meningkatnya Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98,8	100	100	273.791.541.620,00	100	312.798.383.826,00	100	309.092.512.526,00	100	295.579.524.630,00	100	306.560.439.563,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	-	36	46		55		61		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Lanjut Usia Yang Mandiri (%)	84,8	86	88		90		92		94		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Visit Rate (%)	82	84	85		86		87		88		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Bed Occupancy Rate (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Lenght of Stay (Hari)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	82,9	84	85		85		90		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Turn Over Interval (Hari)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	68,1	75	80		85		90		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	82,3	85	88		91		93		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	70,83	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Wasting (%)	8,5	8	7,5		7		6,5		6		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	98	98	99		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.675.671.028,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	6	6	7	7.675.671.028,00	7	6.000.000.000,00	8	6.000.000.000,00	8	6.000.000.000,00	9	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					303.151.290,00		342.499.275,00		342.499.275,00		342.499.275,00		342.499.275,00	
Meningkatnya Mutu Pangan Hasil Olahan	Persentase Pangan Olahan sesuai standar (%)	45	47	50	303.151.290,00	53	342.499.275,00	55	342.499.275,00	57	342.499.275,00	60	342.499.275,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					754.094.272,00		450.424.912,00		495.468.303,00		545.015.134,00		599.516.647,00	

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Masyarakat ber-PHBS (%)	66	70	71	754.094.272,00	72	450.424.912,00	73	495.468.303,00	74	545.015.134,00	75	599.516.647,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					309.406.311.355,00		272.888.827.580,00		273.770.011.800,00		292.401.721.800,00		287.201.721.800,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.683.025.292,00		25.153.000.000,00		25.153.000.000,00		24.368.000.000,00		24.368.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	88	90	26.683.025.292,00	92	25.153.000.000,00	93	25.153.000.000,00	94	24.368.000.000,00	95	24.368.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	88	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	88	90		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	61	65	70		75		80		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					90.513.186.000,00		45.900.000.000,00		32.000.000.000,00		34.700.000.000,00		29.500.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang fungsi sungai yang terlindungi dari daya rusak (%)	39,64	41,06	42,47	80.602.258.000,00	43,89	38.500.000.000,00	45,30	24.300.000.000,00	46,72	26.800.000.000,00	48,14	21.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Optimalnya kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	52,65	55	58	9.910.928.000,00	60	7.400.000.000,00	62	7.700.000.000,00	65	7.900.000.000,00	67,5	7.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.099.822.500,00		9.000.000.000,00		8.800.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	
Optimalnya distribusi air minum di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang mendapatkan distribusi air minum melalui SPAM (%)	82,11	82,64	83,30	2.099.822.500,00	83,95	9.000.000.000,00	84,61	8.800.000.000,00	85,27	9.000.000.000,00	85,93	9.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					28.377.519.050,00		540.000.000,00		1.340.000.000,00		1.340.000.000,00		1.340.000.000,00	
Meningkatnya kualitas fasilitas atau prasarana pengelolaan persampahan	Persentase fasilitas pengelolaan persampahan yang berfungsi baik (%)	79,61	82,04	84	28.377.519.050,00	86	540.000.000,00	88	1.340.000.000,00	90	1.340.000.000,00	92	1.340.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.872.762.080,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00		5.900.000.000,00	

Optimalnya pelayanan dan pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah domestik (%)	81,31	81,55	82,03	4.872.762.080,00	82,50	5.900.000.000,00	82,98	5.900.000.000,00	83,46	5.900.000.000,00	83,94	5.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.206.852.500,00		15.600.000.000,00		15.900.000.000,00		15.900.000.000,00		15.900.000.000,00	
Meningkatnya sistem drainase yang berfungsi baik	Persentase sistem drainase kabupaten yang berfungsi baik (%)	2,35	2,42	2,49	8.206.852.500,00	2,55	15.600.000.000,00	2,62	15.900.000.000,00	2,68	15.900.000.000,00	2,75	15.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23.095.367.300,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00		7.625.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	8,33	10,67	16,00	23.095.367.300,00	21,33	7.625.000.000,00	26,67	7.625.000.000,00	32,00	7.625.000.000,00	37,33	7.625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)	0,005	0,007	0,010		0,014		0,018		0,021		0,025		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.839.113.868,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	Persentase gedung / prasarana publik yang layak fungsi (%)	8,33	10,67	16,00	2.839.113.868,00	21,33	6.000.000.000,00	26,67	6.000.000.000,00	32,00	6.000.000.000,00	37,33	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase kawasan bangunan yang tertata (%)	0,005	0,007	0,010		0,014		0,018		0,021		0,025		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					109.060.717.350,00		146.289.000.000,00		160.917.900.000,00		177.009.690.000,00		177.009.690.000,00	
Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	67,09	70,34	73,59	109.060.717.350,00	76,59	146.289.000.000,00	79,59	160.917.900.000,00	82,59	177.009.690.000,00	85,59	177.009.690.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					7.761.555.600,00		4.431.827.580,00		4.734.111.800,00		4.909.031.800,00		4.909.031.800,00	
Meningkatnya kompetensi pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi lokal yang kompeten dan bersertifikat (%)	30	40	60	7.761.555.600,00	70	4.431.827.580,00	80	4.734.111.800,00	85	4.909.031.800,00	90	4.909.031.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.896.389.815,00		6.450.000.000,00		5.400.000.000,00		5.650.000.000,00		5.650.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan kawasan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	86,67	100	100	5.896.389.815,00	100	6.450.000.000,00	100	5.400.000.000,00	100	5.650.000.000,00	100	5.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					156.654.868.365,00		67.151.718.965,00		72.145.968.965,00		77.710.468.965,00		67.174.968.965,00	

1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.253.219.365,00		7.251.427.965,00		12.229.727.965,00		7.239.227.965,00		7.248.727.965,00	
Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sekretariat	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	7.253.219.365,00	100	7.251.427.965,00	100	12.229.727.965,00	100	7.239.227.965,00	100	7.248.727.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					104.926.125.000,00		10.234.225.000,00		10.235.175.000,00		10.790.175.000,00		10.245.175.000,00	
Meningkatnya Rekonstruksi Rumah Layak Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Pembangunan (%)	100	100	100	104.926.125.000,00	100	10.234.225.000,00	100	10.235.175.000,00	100	10.790.175.000,00	100	10.245.175.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.727.500.000,00		7.395.800.000,00		7.395.800.000,00		17.395.800.000,00		7.395.800.000,00	
Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan (%)	72,22	72,22	73,88	5.727.500.000,00	75,55	7.395.800.000,00	77,21	7.395.800.000,00	78,88	17.395.800.000,00	80,54	7.395.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					25.110.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00		26.660.000.000,00	
Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	96,44	96,44	97,52	25.110.000.000,00	98,61	26.660.000.000,00	99,68	26.660.000.000,00	100	26.660.000.000,00	100	26.660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					13.613.024.000,00		15.585.266.000,00		15.600.266.000,00		15.600.266.000,00		15.600.266.000,00	
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan (%)	78,78	78,78	81,76	13.613.024.000,00	84,74	15.585.266.000,00	87,72	15.600.266.000,00	90,70	15.600.266.000,00	93,68	15.600.266.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Bertambahnya Jumlah Pengembang yang bersertifikasi	Persentase Permohonan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.300.469.784,00		36.804.199.729,00		36.884.340.527,00		41.216.300.983,00		45.564.093.284,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.604.956.884,00		17.557.077.401,00		13.062.099.965,00		13.332.377.965,00		13.578.377.965,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.150.000.000,00	100	5.500.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.250.000.000,00	100	6.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	66,37	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	85	86	87	6.454.956.884,00	88	12.057.077.401,00	89	7.062.099.965,00	89	7.082.377.965,00	90	7.078.377.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	86	87		88		89		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	89,12	89,70	90		90,10		90,30		90,40		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	86	87		88		89		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.795.512.900,00		7.420.500.000,00		9.098.000.000,00		10.217.000.000,00		11.327.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Persentasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah (%)	85	86	87	5.795.512.900,00	88	7.420.500.000,00	89	9.098.000.000,00	89	10.217.000.000,00	90	11.327.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.000.000.000,00		4.476.622.328,00		4.924.240.562,00		5.416.923.018,00		5.958.715.319,00	
Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana Yang Ditangani Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.558.413.915,00	100	1.670.073.147,00	100	1.837.080.462,00	100	2.020.788.508,00	100	2.222.867.358,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemulihan Bencana	Persentase Sarpras Terdampak Bencana Yang Tertangani dan Pemulihan Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100	132.218.416,00	100	193.474.376,00	100	212.921.814,00	100	234.313.995,00	100	257.845.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa yang Memiliki Kesiapsiagaan Bencana (%)	100	100	100	309.367.669,00	100	2.613.074.805,00	100	2.874.238.286,00	100	3.161.820.515,00	100	3.478.002.566,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.900.000.000,00		7.350.000.000,00		9.800.000.000,00		12.250.000.000,00		14.700.000.000,00	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentasi capaian standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran (%)	85	86	87	4.900.000.000,00	88	7.350.000.000,00	89	9.800.000.000,00	89	12.250.000.000,00	90	14.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					16.010.003.037,00		17.921.003.341,00		19.751.595.505,00		21.726.755.056,00		23.899.430.559,66	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.000.008.277,00		6.910.009.105,00		7.601.010.016,00		8.361.111.017,00		9.197.222.119,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	6.000.008.277,00	100	6.910.009.105,00	100	7.601.010.016,00	100	8.361.111.017,00	100	9.197.222.119,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	40,63	60	62		64		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					115.652.951,00		127.218.246,00		139.940.071,00		153.934.078,00		169.327.486,00	
Meningkatnya Kualitas PPKS yang diberdayakan	Persentase PPKS yang diberdayakan (%)	100	100	100	115.652.951,00	100	127.218.246,00	100	139.940.071,00	100	153.934.078,00	100	169.327.486,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.219.982.500,00		9.041.980.750,00		9.946.178.825,00		10.940.796.708,00		12.034.876.378,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran (%)	100	100	100	8.219.982.500,00	100	9.041.980.750,00	100	9.946.178.825,00	100	10.940.796.708,00	100	12.034.876.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	71	72,43		72,93		73,43		73,93		74,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					746.378.699,00		821.016.569,00		903.118.226,00		993.430.048,00		1.092.773.053,00	
Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dilakukan Sesuai Standar (%)	100	100	100	746.378.699,00	100	821.016.569,00	100	903.118.226,00	100	993.430.048,00	100	1.092.773.053,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	5,2	5,1	5		4,9		4,8		4,7		4,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0	71	72,43		72,93		73,43		73,93		74,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					836.076.610,00		919.684.271,00		1.050.144.527,00		1.155.158.981,00		1.270.674.877,66	
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	836.076.610,00	100	919.684.271,00	100	1.050.144.527,00	100	1.155.158.981,00	100	1.270.674.877,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					91.904.000,00		101.094.400,00		111.203.840,00		122.324.224,00		134.556.646,00	
Terkelolanya Taman Makan Pahlawan Nasional dengan Baik	Persentase Taman makam Pahlawan yang mendapat pengelolaan (%)	100	100	100	91.904.000,00	100	101.094.400,00	100	111.203.840,00	100	122.324.224,00	100	134.556.646,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					14.503.561.844,00		15.839.009.660,00		26.927.262.710,00		18.077.262.710,00		18.177.262.710,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Rencana Ketenagakerjaan	Pesentase Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu ke RTKD (%)	44	45	46	0,00	47	0,00	48	0,00	49	150.000.000,00	50	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.881.735.234,00		1.298.930.000,00		11.298.930.000,00		1.298.930.000,00		1.298.930.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	15,90	16,50	17,00	1.881.735.234,00	17,6	1.298.930.000,00	18,1	11.298.930.000,00	18,6	1.298.930.000,00	18,6	1.298.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00		2.443.836.010,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) (%)	34,14	34,28	35,01	2.443.836.010,00	35,74	2.443.836.010,00	36,47	2.443.836.010,00	37,20	2.443.836.010,00	37,93	2.443.836.010,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					10.177.990.600,00		12.096.243.650,00		13.184.496.700,00		14.184.496.700,00		14.184.496.700,00	
Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Semakin Kondusif	Indeks Hubungan Industrial (Indeks)	3	3,15	3,20	10.177.990.600,00	3,25	12.096.243.650,00	3,30	13.184.496.700,00	3,35	14.184.496.700,00	3,40	14.184.496.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.289.996.963,00		2.303.338.289,00		2.533.672.118,00		2.787.039.329,00		3.065.743.260,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					315.027.700,00		346.530.470,00		381.183.517,00		419.301.869,00		461.232.055,00	
Meningkatnya Organisasi Perempuan yang Berdaya	Persentase Organisasi Perempuan yang berdaya (%)	16,67	20,8	25	315.027.700,00	33,33	346.530.470,00	41,67	381.183.517,00	50	419.301.869,00	58,33	461.232.055,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					162.138.720,00		491.020.222,00		540.122.244,00		594.134.468,00		653.547.915,00	
Meningkatnya Angka Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan (%)	100	100	100	162.138.720,00	100	491.020.222,00	100	540.122.244,00	100	594.134.468,00	100	653.547.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					259.533.668,00		285.487.034,00		314.035.738,00		345.439.312,00		379.983.243,00	
Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Perempuan yang berdaya (%)	23,3	25	26	259.533.668,00	27	285.487.034,00	28	314.035.738,00	29	345.439.312,00	30	379.983.243,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					177.432.175,00		766.849.393,00		843.534.332,00		927.887.765,00		1.020.676.541,00	
Teredukasinya pemenuhan hak Anak	Persentase anak yang telah teredukasi (%)	52	53	55	177.432.175,00	58	766.849.393,00	61	843.534.332,00	64	927.887.765,00	67	1.020.676.541,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					375.864.700,00		413.451.170,00		454.796.287,00		500.275.915,00		550.303.506,00	
Terlindunginya Hak hak anak dalam kasus kekerasan	Persentase kasus yang terfasilitasi (%)	100	100	100	375.864.700,00	100	413.451.170,00	100	454.796.287,00	100	500.275.915,00	100	550.303.506,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.829.195.256,00		9.351.823.500,00		9.551.419.091,00		9.799.543.663,00		10.049.493.360,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.822.489.882,00		6.292.893.500,00		6.460.563.091,00		6.615.543.663,00		6.817.893.360,00	
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	100	100	5.822.489.882,00	100	6.292.893.500,00	100	6.460.563.091,00	100	6.615.543.663,00	100	6.817.893.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	IKM Layanan UPT (Angka)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	42.500.000	42.500.000	43.000.000		44.000.000		44.500.000		45.000.000		45.500.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					518.392.116,00		522.000.000,00		524.000.000,00		526.000.000,00		528.000.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Neraca Bahan Makanan (Kg/KAP/TH)	0	82,04	82,05	518.392.116,00	82,06	522.000.000,00	82,02	524.000.000,00	82,07	526.000.000,00	82,08	528.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.550.362.731,00		1.582.800.000,00		1.610.856.000,00		1.680.000.000,00		1.713.600.000,00	
Meningkatnya diversifikasi pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	0	4,95	4,85	1.550.362.731,00	4,75	1.582.800.000,00	4,65	1.610.856.000,00	4,55	1.680.000.000,00	4,45	1.713.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					806.731.989,00		820.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		850.000.000,00	
Menurunnya Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	0	7,1	6,5	806.731.989,00	5,9	820.000.000,00	5,3	820.000.000,00	4,7	840.000.000,00	4,1	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					131.218.538,00		134.130.000,00		136.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan (%)	90,9	63,79	63,8	131.218.538,00	63,9	134.130.000,00	63,95	136.000.000,00	64,10	138.000.000,00	64,2	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.000.569.200,00		2.037.711.500,00		2.079.601.875,00		2.126.973.594,00		2.140.435.117,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					227.569.200,00		234.461.500,00		243.076.875,00		253.846.094,00		267.307.617,00	
Meningkatnya Penanganan Sengketa Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	100	227.569.200,00	100	234.461.500,00	100	243.076.875,00	100	253.846.094,00	100	267.307.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi instansi/OPD yang memerlukan tanah selama masa renstra 2025-2029 (%)	100	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Redistribusi Tanah dan Penataan Pemanfaatan Tanah	Persentase Capaian Luasan Objek Redistribusi Tanah dan Jumlah Subjek Penerima Reforma Agraria (Kantor Pertanahan HST) (%)	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tercapainya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan tanah Ulayat yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00	
Tercapainya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	100	100	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	100	410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00	
Dikeluarkannya Rekomtek Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah / izin Perubahan dan Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	100	60.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					352.500.000,00		382.750.000,00		416.025.000,00		452.627.500,00		452.627.500,00	
Terselenggaranya Redistribusi Tanah dan Penataan Pemanfaatan Tanah	Persentase penatagunaan lahan yang sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP) (%)	100	100	100	352.500.000,00	100	382.750.000,00	100	416.025.000,00	100	452.627.500,00	100	452.627.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					29.902.044.001,00		72.786.236.929,00		73.051.921.102,00		74.804.245.112,00		73.853.544.324,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.560.014.329,00		10.182.500.000,00		9.897.500.000,00		10.337.500.000,00		10.722.500.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	8.560.014.329,00	100	10.182.500.000,00	100	9.897.500.000,00	100	10.337.500.000,00	100	10.722.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	75,855	76,355	76,855		77,355		77,855		78,355		78,855		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	IKM Layanan UPT (Angka)	87,085	88,015	88,45		88,775		88,97		89,315		89,495		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	370.000.000	370.000.000	370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					431.822.680,00		1.091.112.700,00		1.151.112.700,00		1.586.112.700,00		871.112.700,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkesuaian dengan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	431.822.680,00	100	1.091.112.700,00	100	1.151.112.700,00	100	1.586.112.700,00	100	871.112.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.206.981.524,00		1.364.254.466,00		1.500.679.913,00		1.650.747.904,00		1.815.822.695,00	
Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu (%)	93	94	95	1.206.981.524,00	96	1.364.254.466,00	97	1.500.679.913,00	98	1.650.747.904,00	98	1.815.822.695,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.308.530.900,00		1.441.001.463,00		1.710.260.189,00		2.352.516.208,00		1.792.690.629,00	
Meningkatnya Kualitas Lahan yang Hijau dan Berseri	Persentase RTH Hijau (%)	100	100	100	1.308.530.900,00	100	1.441.001.463,00	100	1.710.260.189,00	100	2.352.516.208,00	100	1.792.690.629,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					175.600.000,00		1.202.775.000,00		1.202.775.000,00		1.202.775.000,00		891.825.000,00	
Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3	Persentase Penghasil yang patuh terhadap ketentuan pengelolaan B3/limbah B3 (%)	0	0	25	175.600.000,00	30	1.202.775.000,00	35	1.202.775.000,00	40	1.202.775.000,00	50	891.825.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					281.579.012,00		285.470.800,00		300.470.800,00		315.470.800,00		330.470.800,00	
Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi Lingkungan Hidup (%)	56	59	62	281.579.012,00	65	285.470.800,00	68	300.470.800,00	71	315.470.800,00	71	330.470.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					54.981.200,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00		4.935.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Adat/Kearifan Lokal Yang Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (%)	16,12	17	18	54.981.200,00	19	4.935.000.000,00	20	4.935.000.000,00	21	4.935.000.000,00	22	4.935.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					88.393.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00		3.213.000.000,00	
Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Terlatih Dalam Pengelolaan LH (%)	16,12	17	18	88.393.000,00	19	3.213.000.000,00	20	3.213.000.000,00	21	3.213.000.000,00	22	3.213.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					388.376.356,00		429.426.100,00		439.426.100,00		449.426.100,00		459.426.100,00	
Meningkatnya Peran Serta Lembaga Pendidikan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase lembaga pendidikan yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup (%)	64	65	66	388.376.356,00	67	429.426.100,00	68	439.426.100,00	69	449.426.100,00	70	459.426.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					224.739.200,00		419.696.400,00		479.696.400,00		539.696.400,00		599.696.400,00	
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	224.739.200,00	100	419.696.400,00	100	479.696.400,00	100	539.696.400,00	100	599.696.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					17.181.025.800,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00		48.222.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Terkelola (%)	58,41	60	65	17.181.025.800,00	70	48.222.000.000,00	80	48.222.000.000,00	90	48.222.000.000,00	100	48.222.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.803.728.971,00		11.094.676.382,00		12.204.144.021,00		13.424.558.422,00		14.767.014.264,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.101.116.671,00		8.568.711.402,00		9.425.582.542,00		10.368.140.796,00		11.404.954.876,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	100	100	100	7.101.116.671,00	100	8.568.711.402,00	100	9.425.582.542,00	100	10.368.140.796,00	100	11.404.954.876,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					347.661.950,00		921.742.195,00		1.013.916.415,00		1.115.308.056,00		1.226.838.862,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penduduk	Persentase Layanan Adminduk yang Selesai Tepat Waktu (%)	100	100	100	347.661.950,00	100	921.742.195,00	100	1.013.916.415,00	100	1.115.308.056,00	100	1.226.838.862,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					546.065.900,00		710.672.490,00		781.739.739,00		859.913.713,00		945.905.084,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Layanan Pencatatan Sipil yang Selesai Tepat Waktu (%)	100	100	100	546.065.900,00	100	710.672.490,00	100	781.739.739,00	100	859.913.713,00	100	945.905.084,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					668.810.200,00		739.468.620,00		813.415.482,00		894.757.030,00		984.232.733,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Persentase data kependudukan yang ganda dan anomali yang diselesaikan (%)	100	100	100	668.810.200,00	100	739.468.620,00	100	813.415.482,00	100	894.757.030,00	100	984.232.733,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					140.074.250,00		154.081.675,00		169.489.843,00		186.438.827,00		205.082.709,00	
Meningkatnya minat pemanfaatan data oleh Badan Hukum dan Perangkat Daerah	Persentase data kependudukan dalam bentuk profil kependudukan dan agregat kependudukan yang disediakan (%)	100	100	100	140.074.250,00	100	154.081.675,00	100	169.489.843,00	100	186.438.827,00	100	205.082.709,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.034.000.000,00		19.275.557.729,00		18.620.557.062,00		20.384.050.166,00		22.733.714.937,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.657.419.354,00		8.557.057.729,00		6.679.757.062,00		6.835.250.166,00		7.420.474.937,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	4.657.419.354,00	100	8.557.057.729,00	100	6.679.757.062,00	100	6.835.250.166,00	100	7.420.474.937,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	44,4	44,9	45,4		45,9		46,4		46,9		47,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					0,00		987.000.000,00		1.174.000.000,00		1.436.600.000,00		1.676.800.000,00	
Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan akses sarana prasarana yang baik desa mendukung upaya mendukung penanggulangan bencana di Desa	Indeks Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan di Desa (%)	-	6,62	6,62	0,00	6,62	987.000.000,00	8,19	1.174.000.000,00	8,19	1.436.600.000,00	9,45	1.676.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

	Indeks Sub Dimensi Penanggulangan Bencana di Desa (%)	-	2,21	2,21		3,47		3,47		3,47		3,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Kondisi Akses Jalan di Desa (%)	-	2,83	2,83		2,83		3,14		3,14		3,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Kemudahan Akses di Desa (%)	-	3,14	3,14		3,61		3,61		3,93		3,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa dengan Penataan Desa sesuai ketentuan (%)	-	6,83	15,53		22,36		29,19		36,02		40,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					0,00		530.000.000,00		636.000.000,00		775.200.000,00		930.240.000,00	
Meningkatnya Produksi Desa dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Sub Dimensi Produksi Desa (%)	-	4,72	4,72	0,00	4,72	530.000.000,00	5,98	636.000.000,00	6,29	775.200.000,00	6,29	930.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi Masyarakat Desa (%)	-	15,56	15,56		16,19		16,35		16,82		17,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.515.760.950,00		4.707.500.000,00		5.247.000.000,00		5.992.840.000,00		6.752.208.000,00	
Meningkatnya Penataan Kelembagaan, Pelayanan dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa	Indeks Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (%)	-	5,20	5,20	2.515.760.950,00	5,20	4.707.500.000,00	5,35	5.247.000.000,00	5,35	5.992.840.000,00	5,51	6.752.208.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (%)	-	4,25	4,88		5,19		5,35		5,35		5,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.860.819.696,00		4.494.000.000,00		4.883.800.000,00		5.344.160.000,00		5.953.992.000,00	
Meningkatnya kualitas hidup di desa melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, utilitas dasar, aktifitas dan fasilitas sosial	Indeks Sub Dimensi Pendidikan di Desa (%)	-	5,03	5,34	2.860.819.696,00	5,66	4.494.000.000,00	6,13	4.883.800.000,00	6,44	5.344.160.000,00	6,60	5.953.992.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Layanan Kesehatan di Desa (%)	-	14,32	14,80		15,11		15,74		15,74		15,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Layanan Utilitas Di Desa (%)	-	3,63	3,63		3,63		3,94		3,94		3,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

	Indeks Sub Dimensi Aktifitas Sosial di Desa (%)	-	9,29	9,44		9,44		9,60		10,07		10,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat di Desa (%)	-	2,52	2,52		2,68		2,84		2,84		2,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.500.000.000,00		12.822.233.456,00		14.060.456.802,00		15.418.101.853,00		16.906.672.139,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					2.172.645.000,00		4.025.958.780,00		4.428.554.658,00		4.871.409.495,00		5.358.550.545,00	
Termanfaatkannya data informasi keluarga yang tepat sasaran	Persentase pemanfaatan data informasi keluarga (%)	100	100	100	2.172.645.000,00	100	4.025.958.780,00	100	4.428.554.658,00	100	4.871.409.495,00	100	5.358.550.545,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	26,9	26,8	26,7		26,7		26,6		26,5		26,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Kepadatan Penduduk (Orang/km2)	152	155	158		161		164		167		170		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					811.431.000,00		1.043.174.100,00		1.147.491.510,00		1.262.240.661,00		1.388.464.727,00	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif (%)	79,05	79,5	79,5	811.431.000,00	80	1.043.174.100,00	80	1.147.491.510,00	81	1.262.240.661,00	81	1.388.464.727,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	92,4	92,5	92,6		92,7		92,8		92,9		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.515.924.000,00		7.753.100.576,00		8.484.410.634,00		9.284.451.697,00		10.159.656.867,00	
Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Tribina (%)	47,14	50,3	50,89	3.515.924.000,00	52,07	7.753.100.576,00	53,25	8.484.410.634,00	54,44	9.284.451.697,00	55,62	10.159.656.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59	61,1	62,9		64,7		66,3		67,7		69,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	85,9	86,9	87,9		88,8		89,7		90,5		91,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					14.097.955.999,00		21.405.000.000,00		20.662.500.000,00		26.995.000.000,00		23.202.500.000,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.097.955.999,00		21.405.000.000,00		20.662.500.000,00		26.995.000.000,00		23.202.500.000,00	
Meningkatnya kualitas Lalu Lintas, Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas, Meningkatnya Kendaraan Laik Jalan, Meningkatnya Pengguna Transportasi Darat, Meningkatnya Kualitas Terminal Tipe C	Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai standar (%)	0	0	3,77	14.097.955.999,00	3,8	21.405.000.000,00	3,85	20.662.500.000,00	3,9	26.995.000.000,00	4	23.202.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase pelanggaran lalu lintas (%)	14	12	10		8		6		4		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kendaraan Laik Jalan (%)	92	92	92		93		93		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan (Nilai)	7,56	7,4	7,2		7		6,8		6,6		6,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat (%)	0	0	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Terminal Tipe C yang Layak (%)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.219.997.606,00		16.854.060.000,00		19.382.195.000,00		22.289.552.000,00		25.633.007.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.464.129.577,00		5.158.225.000,00		5.931.974.000,00		6.821.785.000,00		7.845.064.000,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	100	3.464.129.577,00	100	5.158.225.000,00	100	5.931.974.000,00	100	6.821.785.000,00	100	7.845.064.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	82	84	86		88		90		92		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar operasional prosedur (SOP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai standar operasional prosedur (SOP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan yang terpelihara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.800.999.845,00		4.143.018.000,00		4.764.477.000,00		5.479.154.000,00		6.301.033.000,00	
Akses Informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.800.999.845,00	100	4.143.018.000,00	100	4.764.477.000,00	100	5.479.154.000,00	100	6.301.033.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten (%)	-	30	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. (Angka)	-	-	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Sertifikat)	-	-	8		16		24		32		37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Informasi (Angka)	8	8	8		8		8		8		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.954.868.184,00		7.552.817.000,00		8.685.744.000,00		9.988.613.000,00		11.486.910.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan TIK pada perangkat daerah	Persentase PD yang menerima layanan TIK sesuai standar (%)	100	100	100	3.954.868.184,00	100	7.552.817.000,00	100	8.685.744.000,00	100	9.988.613.000,00	100	11.486.910.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo (%)	50	60	70		80		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment (Angka)	3	5	7		9		11		13		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar (%)	61,1	62	70		80		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase data yang dapat berbagi pakai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah (%)	-	10	20		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	-	-	5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Cakupan Layanan telekomunikasi (%)	92,9	94,08	95,27		96,45		98,22		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	97,03	97,5	98		98,5		99		99,5		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik (%)	26,6	26,6	38,6		50,6		62,6		74,6		86,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)	6,66	13,32	19,98		26,64		33,3		39,96		46,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Penduduk Pengguna Telepon Seluler (%)	69	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet (%)	89	90	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Proporsi individu yang menggunakan internet (%)	69	70	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan seratoptik(kumulatif) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Literasi Digital (Indeks)	3,49	3,54	3,59		3,64		3,69		3,74		3,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (%)	20	20	36		52		68		84		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	36	36	36		36		36		36		36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city (%)	-	50	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					9.519.281.065,00		13.755.937.500,00		13.910.527.060,00		14.065.121.620,00		14.219.706.180,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.893.128.520,00		8.528.067.250,00		8.682.656.810,00		8.837.251.370,00		8.991.835.930,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	80	80	82	7.893.128.520,00	85	8.528.067.250,00	85	8.682.656.810,00	85	8.837.251.370,00	85	8.991.835.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Persepsi Internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat (Indeks)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	IKM Layanan UPT (Angka)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	80	80	82		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					57.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00		557.123.250,00	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi (%)	67,50	70,00	72,50	57.123.250,00	75,00	557.123.250,00	77,50	557.123.250,00	82,50	557.123.250,00	85,00	557.123.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	67,50	75	80		85		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					736.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00		1.501.933.400,00	
Meningkatnya kapasitas usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usaha (%)	67,50	70,00	72,50	736.933.400,00	75,00	1.501.933.400,00	77,50	1.501.933.400,00	82,50	1.501.933.400,00	82,50	1.501.933.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi (%)	0	0	3,33		3,00		4,00		5,00		5,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase KSP/USP Sehat (%)	67,50	70,00	72,50		77,50		82,50		87,50		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					832.095.895,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00		1.618.813.600,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan UM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	29,40	29,7	29,9	832.095.895,00	30,2	1.618.813.600,00	30,4	1.618.813.600,00	30,7	1.618.813.600,00	30,7	1.618.813.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penjualan usaha mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro (%)	33,14	34,31	36,07	0,00	38,41	1.550.000.000,00	41,33	1.550.000.000,00	44,85	1.550.000.000,00	44,85	1.550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.037.960.751,00		10.187.760.751,00		10.327.760.751,00		10.124.307.351,00		9.939.307.351,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.976.116.799,00		8.001.116.799,00		8.141.116.799,00		7.787.663.399,00		7.787.663.399,00	
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	80	81	7.976.116.799,00	82	8.001.116.799,00	83	8.141.116.799,00	84	7.787.663.399,00	85	7.787.663.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	63,255	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					142.371.800,00		142.371.800,00		142.371.800,00		392.371.800,00		192.371.800,00	
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi (%)	9,04	9,05	9,24	142.371.800,00	9,48	142.371.800,00	9,73	142.371.800,00	9,97	392.371.800,00	10	192.371.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					91.107.500,00		191.107.500,00		191.107.500,00		91.107.500,00		91.107.500,00	
Meningkatnya Minat Investasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	0,03	0,10	0,20	91.107.500,00	0,20	191.107.500,00	0,21	191.107.500,00	0,25	91.107.500,00	0,29	91.107.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.605.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00		1.620.994.372,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Indeks)	90,17	90,20	90,22	1.605.994.372,00	90,24	1.620.994.372,00	90,26	1.620.994.372,00	90,28	1.620.994.372,00	90,30	1.620.994.372,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					105.200.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai LKPM Sesuai Standar (%)	16,86	17	18	105.200.000,00	19	115.000.000,00	20	115.000.000,00	21	115.000.000,00	22	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00		117.170.280,00	
Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi Penanaman Modal yang Valid (%)	100	100	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	100	117.170.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					25.250.000.000,00		45.013.332.965,00		41.453.943.465,00		43.166.014.615,00		47.746.270.061,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.750.000.000,00		12.551.219.965,00		7.557.219.965,00		7.563.219.965,00		8.319.541.961,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	80,95	81,02	82,00	5.750.000.000,00	82,50	12.551.219.965,00	82,75	7.557.219.965,00	83,00	7.563.219.965,00	83,00	8.319.541.961,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	84	85	86		87		88		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	74,24	75	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	79	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	170.000.000	178.000.000	186.000.000		194.000.000		202.000.000		210.000.000		218.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.700.613.000,00		3.095.652.000,00		3.350.216.500,00		3.615.237.650,00		4.246.416.100,00	

Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan (%)	1,4	1,5	1,6	2.700.613.000,00	1,7	3.095.652.000,00	1,8	3.350.216.500,00	1,9	3.615.237.650,00	2	4.246.416.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					16.199.387.000,00		28.866.461.000,00		30.046.507.000,00		31.487.557.000,00		34.630.312.000,00	
Meningkatnya kompetensi atlet olahraga Pendidikan dan Prestasi	Persentase atlet yang mendapatkan medali di kejuaraan (%)	20	20	30	16.199.387.000,00	40	28.866.461.000,00	50	30.046.507.000,00	60	31.487.557.000,00	70	34.630.312.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi (%)	20	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka Yang Aktif (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					330.325.200,00		681.548.000,00		783.783.000,00		901.352.000,00		1.036.557.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					330.325.200,00		681.548.000,00		783.783.000,00		901.352.000,00		1.036.557.000,00	
Layanan Data Terbuka Terselenggara dengan Baik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	330.325.200,00	100	681.548.000,00	100	783.783.000,00	100	901.352.000,00	100	1.036.557.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Tersedianya sistem data dan statistik terintegrasi (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Tersedianya buku profil daerah (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan (Angka)	6	8	10		12		14		16		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (Angka)	6	8	10		12		14		16		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral (%)	33,3	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase kelengkapan metadata indicator sektoral (%)	33,3	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. (%)	12	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					299.677.194,00		465.181.000,00		534.960.000,00		615.207.000,00		707.492.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					299.677.194,00		465.181.000,00		534.960.000,00		615.207.000,00		707.492.000,00	
Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PerangkatDaerah (%)	100	100	100	299.677.194,00	100	465.181.000,00	100	534.960.000,00	100	615.207.000,00	100	707.492.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Sarana dan Prasarana Keamanan Informasi yang tersedia (Angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah (%)	-	-	50		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.688.240.230,00		5.445.230.460,00		10.071.710.920,00		19.074.671.840,00		36.780.593.680,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.470.630.230,00		2.741.260.460,00		5.882.520.920,00		11.765.041.840,00		23.530.083.680,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	20	22	24	1.470.630.230,00	26	2.741.260.460,00	28	5.882.520.920,00	30	11.765.041.840,00	35	23.530.083.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					325.000.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00		1.068.750.000,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional (%)	80	85	90	325.000.000,00	95	1.068.750.000,00	96	1.068.750.000,00	98	1.068.750.000,00	100	1.068.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku/komunitas sejarah tradisional yang berpartisipasi dalam program pembinaan sejarah (%)	80	85	90	150.000.000,00	95	150.000.000,00	96	150.000.000,00	98	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					407.600.000,00		815.200.000,00		1.630.400.000,00		3.260.800.000,00		6.521.600.000,00	
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	95	95	95	407.600.000,00	95	815.200.000,00	95	1.630.400.000,00	95	3.260.800.000,00	95	6.521.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					335.010.000,00		670.020.000,00		1.340.040.000,00		2.680.080.000,00		5.360.160.000,00	
Persentase Museum yang dikelola	Persentase museum yang memiliki koleksi terdaftar dan terdokumentasi (%)	90	95	95	335.010.000,00	95	670.020.000,00	95	1.340.040.000,00	95	2.680.080.000,00	95	5.360.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.044.168.025,00		11.170.016.858,00		11.334.773.360,00		11.650.795.399,00		11.941.533.407,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.589.261.442,00		5.491.307.658,00		5.508.464.160,00		5.651.886.199,00		5.775.024.207,00	
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	82,105	83	85	3.589.261.442,00	87	5.491.307.658,00	90	5.508.464.160,00	91	5.651.886.199,00	92	5.775.024.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.454.906.583,00		5.678.709.200,00		5.826.309.200,00		5.998.909.200,00		6.166.509.200,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) (Indeks)	68	69	70	4.454.906.583,00	72	5.678.709.200,00	74	5.826.309.200,00	76	5.998.909.200,00	78	6.166.509.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					499.971.975,00		1.080.000.000,00		1.122.200.000,00		1.165.270.000,00		1.208.897.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					193.062.175,00		470.000.000,00		502.200.000,00		535.270.000,00		568.897.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis	Persentase SKPD yang mengelola arsip dinamis dan statis dengan baku. (%)	90	100	100	193.062.175,00	100	470.000.000,00	100	502.200.000,00	100	535.270.000,00	100	568.897.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					306.909.800,00		610.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		640.000.000,00	
Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pengelolaan arsip daerah (SKPD, Kelurahan dan Desa) dengan retensi dibawah 10 tahun (%)	90	100	100	306.909.800,00	100	610.000.000,00	100	620.000.000,00	100	630.000.000,00	100	640.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.895.801.431,00		7.294.000.000,00		7.402.780.000,00		7.566.346.000,00		7.678.263.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					965.773.717,00		1.070.000.000,00		1.090.000.000,00		1.110.000.000,00		1.130.000.000,00	
Optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nelayan Kecil (Angka)	0	3.104,62	3.197,75	965.773.717,00	3.293,69	1.070.000.000,00	3.392,50	1.090.000.000,00	3.494,27	1.110.000.000,00	3.599,10	1.130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.429.359.346,00		3.580.000.000,00		3.606.000.000,00		3.683.000.000,00		3.710.000.000,00	
Optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0	3.104,62	3.197,75	3.429.359.346,00	3.293,69	3.580.000.000,00	3.392,50	3.606.000.000,00	3.494,27	3.683.000.000,00	3.599,10	3.710.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.881.274.677,00		1.930.000.000,00		1.978.500.000,00		2.027.500.000,00		2.077.500.000,00	
Optimalnya Pengelolaan Pengawasan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	1.881.274.677,00	100	1.930.000.000,00	100	1.978.500.000,00	100	2.027.500.000,00	100	2.077.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					619.393.691,00		714.000.000,00		728.280.000,00		745.846.000,00		760.763.000,00	
Meningkatnya Produksi Usaha Olahan Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil (%)	0	2	2	619.393.691,00	2	714.000.000,00	2	728.280.000,00	2	745.846.000,00	2	760.763.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.648.240.997,97		8.324.332.393,00		8.791.962.811,00		9.288.546.352,00		10.217.400.686,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.706.175.200,00		5.442.336.735,00		5.714.453.571,00		6.000.176.250,00		6.600.193.874,00	
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata (%)	56,7	66,7	83,3	3.706.175.200,00	84	5.442.336.735,00	85	5.714.453.571,00	86	6.000.176.250,00	87	6.600.193.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.003.624.967,97		1.849.711.658,00		1.941.997.240,00		2.039.307.102,00		2.243.237.812,00	
Meningkatnya efektifitas pemasaran Pariwisata	Cakupan Wilayah Pemasaran Pariwisata (Event)	50	50	60	3.003.624.967,97	70	1.849.711.658,00	80	1.941.997.240,00	90	2.039.307.102,00	100	2.243.237.812,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					938.440.830,00		1.032.284.000,00		1.135.512.000,00		1.249.063.000,00		1.373.969.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan SDM dan ekraf yang kompeten (%)	58	71	100	938.440.830,00	100	1.032.284.000,00	100	1.135.512.000,00	100	1.249.063.000,00	100	1.373.969.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					55.185.000.000,00		30.933.469.027,00		33.250.950.236,00		35.832.604.796,00		36.475.983.304,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.072.770.885,00		14.522.068.110,00		15.574.789.191,00		16.727.782.380,00		17.091.074.888,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	25.072.770.885,00	100	14.522.068.110,00	100	15.574.789.191,00	100	16.727.782.380,00	100	17.091.074.888,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	71,46	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	IKM Layanan UPT (Angka)	0	85	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	136.500.000	146.250.000	150.000.000		161.250.000		165.000.000		168.750.000		172.500.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.487.076.759,00		3.055.171.000,00		2.935.171.000,00		3.128.361.000,00		2.978.361.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi (%)	-.605	2,5	2,5	9.487.076.759,00	2,5	3.055.171.000,00	2,5	2.935.171.000,00	2,5	3.128.361.000,00	2,5	2.978.361.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung (%)	2,09	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai (%)	0	0,2	0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Besar (%)	-34,19	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Rawit (%)	0,87	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang Merah (%)	-3,5	0,60	0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk (%)	0,64	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Sapi (%)	3,51	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kerbau (%)	0,1	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Domba (%)	0,065	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kambing (%)	0,061	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ayam Petelur (%)	0	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Itik Petelur (%)	0	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					17.339.934.468,00		10.078.875.015,00		11.293.574.115,00		12.054.028.815,00		12.615.856.015,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Bantuan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	0	1,32	3,42	7.005.711.166,00	5,58	5.573.958.000,00	8,16	6.771.471.000,00	11,30	7.513.021.000,00	15,00	8.054.053.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Perkebunan (%)	0	15	55		65		75		85		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok Tani yang menerima Bantuan Prasarana Produksi Peternakan (%)	0	5,24	10,84		16,78		23,07		30,07		37,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Perkebunan	Persentase Pemanfaatan Lahan Perkebunan (%)	6,36	8,48	11,51	199.960.000,00	14,69	4.333.055.665,00	18,03	4.333.055.665,00	21,51	4.333.055.665,00	25,30	4.333.055.665,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi (%)	100	100	100	10.134.263.302,00	100	171.861.350,00	100	189.047.450,00	100	207.952.150,00	100	228.747.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					442.097.900,00		814.523.842,00		895.976.226,00		895.573.848,00		1.084.131.232,00	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Sapi (%)	3,51	10	10	442.097.900,00	10	814.523.842,00	10	895.976.226,00	10	895.573.848,00	10	1.084.131.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kerbau (%)	0,1	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Domba (%)	0,065	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kambing (%)	0,061	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ayam Petelur (%)	0	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Itik Petelur (%)	0	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					828.442.300,00		691.170.930,00		724.831.023,00		742.365.191,00		779.146.377,00	
Meningkatnya Perlindungan Usaha Tani	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlindungi dari Bencana (%)	0	0,83	2,11	164.700.000,00	2,13	488.289.500,00	2,16	507.286.450,00	2,19	508.691.161,00	2,22	527.729.944,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Populasi ternak yang terlindungi (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi (%)	-6,05	2,5	2,5	663.742.300,00	2,5	202.881.430,00	2,5	217.544.573,00	2,5	233.674.030,00	2,5	251.416.433,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung (%)	2,09	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai (%)	0	0,2	0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Besar (%)	-34,19	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabe Rawit (%)	0,8	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang Merah (%)	-3,5	0,60	0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk (%)	0,64	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Karet (%)	0,085	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa (%)	0,02	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kopi (%)	0,2	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produktivitas Lada (%)	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.014.677.688,00		1.771.660.130,00		1.826.608.681,00		2.284.493.562,00		1.927.413.792,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian dengan Kinerja Baik (%)	100	100	100	2.014.677.688,00	100	1.771.660.130,00	100	1.826.608.681,00	100	2.284.493.562,00	100	1.927.413.792,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	0	27	29		30		31		32		33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.606.476.000,00		18.899.747.200,00		18.999.747.200,00		18.999.747.200,00		18.999.747.200,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga (%)	23,00	37,15	51,31	100.000.000,00	65,46	100.000.000,00	79,62	100.000.000,00	97,31	100.000.000,00	98,00	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.863.132.000,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00		16.608.745.200,00	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI (%)	65	70	75	4.863.132.000,00	80	16.608.745.200,00	85	16.608.745.200,00	90	16.608.745.200,00	90	16.608.745.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					0,00		391.002.000,00		391.002.000,00		391.002.000,00		391.002.000,00	

Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	7,23	7,25	7,27	0,00	7,29	391.002.000,00	7,31	391.002.000,00	7,33	391.002.000,00	7,35	391.002.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Volume Ekspor dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekspor Barang (%)	0	0	1,00	100.000.000,00	1,10	100.000.000,00	1,20	100.000.000,00	1,30	100.000.000,00	1,40	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					90.945.000,00		450.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga (%)	23,00	37,15	51,31	90.945.000,00	65,46	450.000.000,00	79,62	550.000.000,00	97,31	550.000.000,00	97,31	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					452.399.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya volume ekspor dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan Total Perdagangan Dalam Daerah (%)	0	0	1,66	452.399.000,00	1,80	1.250.000.000,00	2,00	1.250.000.000,00	2,20	1.250.000.000,00	2,25	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan Ekspor Barang (%)	0	0	1,00		1,10		1,20		1,30		1,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.581.123.640,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00		5.013.740.500,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.526.133.640,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00		4.713.740.500,00	
Meningkatnya akses pasar IKM	Persentase IKM yang Mendapatkan Perluasan Akses Pasar (%)	19,35	20,70	22,04	0,00	23,39	2.600.000.000,00	24,73	2.600.000.000,00	26,08	2.600.000.000,00	26,10	2.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi (%)	19,35	20,70	22,04	2.376.133.640,00	23,39	1.963.740.500,00	24,73	1.963.740.500,00	26,08	1.963.740.500,00	27	1.963.740.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Sentra Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Sentra Industri Pengolahan (%)	10	20	30	150.000.000,00	50	150.000.000,00	70	150.000.000,00	90	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					45.450.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya legalitas IKM	Persentase legalitas IKM (%)	37,1	41,13	45,16	45.450.000,00	45,2	200.000.000,00	49,23	200.000.000,00	53,27	200.000.000,00	57,3	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					9.540.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya fasilitasi izin usaha bagi IKM	Persentase izin usaha IKM yang masuk kedalam SIINAS (%)	37,10	42,47	47,85	9.540.000,00	53,23	100.000.000,00	58,60	100.000.000,00	63,98	100.000.000,00	65	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					88.875.200.000,00		110.787.522.948,00		118.575.990.046,00		126.900.333.198,00		133.296.560.583,00	

4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.791.226.554,00		84.402.806.095,00		90.326.686.013,00		96.666.819.883,00		101.531.971.601,00	
Meningkatnya Kepatuhan Pemenuhan Standart Pelayanan	Persentase OPD Yang Telah Memilii SP Yang Up to Date (%)	0	100	100	377.740.033,00	100	698.604.107,00	100	748.958.394,00	100	802.982.682,00	100	846.060.016,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Ukuran dan Fungsi Organisasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	0	41,30	42,00	275.138.350,00	43,00	531.899.364,00	44,00	569.132.320,00	45,00	608.971.582,00	45,00	639.420.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sarana dan Prasarana dan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (%)	0	100	100	13.907.044.312,00	100	25.142.381.848,00	100	26.913.073.575,00	100	28.808.786.223,00	100	30.270.854.286,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Aset Setda Dalam Kondisi Baik (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas	Nilai Komponen Laporan Kinerja (Nilai)	11,11	11,18	11,21	424.037.688,00	11,25	813.376.452,00	11,30	871.583.304,00	11,35	933.991.685,00	11,35	983.253.445,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Persentase Laporan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP (%)	0	100	100	188.577.778,00	100	381.711.818,00	100	409.817.644,00	100	440.029.480,00	100	464.826.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Rata-rata Kecepatan Layanan Kesetdaan	Persentase Rata-rata Waktu Layanan (%)	0	100	100	18.538.673.613,00	100	25.532.744.115,00	100	27.319.896.201,00	100	29.232.148.935,00	100	30.693.656.379,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Layanan Sekretariat Daerah Yang Di Berikan Tepat Waktu/sesuai SP (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	50,94	51,00	51,50		52,00		52,20		52,50		53,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Rata-rata Ketepatan Layanan KDH dan WKDH	Persentase Layanan KDH dan WKDH Yang Di Berikan Tepat Waktu (%)	0	100	100	13.075.056.555,00	100	16.709.083.373,00	100	17.878.719.208,00	100	19.130.229.552,00	100	20.086.741.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Menurunnya Aduan Atas Layanan Kesetdaan	Persentase Aduan Yang Masuk (%)	0	100	100	8.004.958.225,00	100	14.593.005.018,00	100	15.615.505.367,00	100	16.709.679.744,00	100	17.547.160.229,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					31.808.175.401,00		22.838.415.227,00		24.453.661.294,00		26.170.895.584,00		27.495.710.364,00	
Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Kepemerintahan	Nilai Pelayanan Kepemerintahan Yang Tepat Waktu (Nilai)	0	100	100	506.978.000,00	100	374.332.472,00	100	417.092.745,00	100	451.767.237,00	100	490.625.599,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kepatuhan Pemenuhan SPM	LPPD Yang Disampaikan Tepat Waktu (Laporan)	1	1	1	1.949.302.822,00	1	1.530.957.796,00	1	1.638.124.842,00	1	1.752.793.581,00	1	1.840.433.260,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase OPD Yang Telah Memiliki SPM Yang Up to Date (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Peraturan &	Persentase kebjakan yang terbit sesuai	0	100	100	1.201.023.209,00	100	1.894.048.643,00	100	2.026.632.048,00	100	2.168.496.292,00	100	2.276.921.106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Keselaras an Kebijakan Daerah	dengan perencanaan (%)													
	Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan yang telah diharmoniskan/ selara (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kemasyarakatan	Nilai Kepuasan Pelayanan Bantuan Kemasyarakatan (Nilai)	0	82,00	82,10	28.150.871.370,00	82,20	19.039.076.316,00	82,30	20.371.811.659,00	82,40	21.797.838.474,00	82,40	22.887.730.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.275.798.045,00		3.546.301.626,00		3.795.642.739,00		4.062.617.731,00		4.268.878.618,00	
Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	0	3	3	82.854.750,00	3	180.586.933,00	3	193.228.018,00	3	206.753.980,00	3	217.091.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	81,98	82,80	83,62		84,46		85,30		86,16		87,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kesehatan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD Yang Sehat (Angka)	1	1	1	520.230.135,00	1	487.452.372,00	1	521.574.038,00	1	558.084.220,00	1	585.988.431,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Jumlah BLUD Yang Sehat (Angka)	5	6	7		8		9		10		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kompetensi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase SDM Pelaksana PBJ Yang Memiliki Sertifikasi (%)	0	100	100	430.735.850,00	100	851.192.393,00	100	910.775.861,00	100	974.530.171,00	100	1.023.256.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Koordinasi Pemantauan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pemantauan Sumber Daya Alam (%)	0	100	100	39.940.375,00	100	104.882.305,00	100	114.024.066,00	100	123.985.751,00	100	133.815.039,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	88,97	89,86	90,76	367.353.365,00	91,66	530.295.549,00	92,58	567.416.237,00	93,51	607.135.374,00	94,44	637.492.142,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Daerah	Persentase Proyek Infrastruktur Daerah yang Terealisasi (%)	0	100	100	169.457.530,00	100	219.448.477,00	100	234.109.870,00	100	249.797.561,00	100	261.787.440,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terjaganya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi ((%))	1,11	1.5-3.5	1.5-3.5	665.226.040,00	1.5-3.5	1.172.443.597,00	1.5-3.5	1.254.514.649,00	1.5-3.5	1.342.330.674,00	1.5-3.5	1.409.447.207,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					65.150.000.000,00		148.927.685.895,00		148.181.687.935,00		97.050.157.093,00		96.305.366.035,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.344.822.594,00		105.677.430.000,00		100.767.031.350,00		44.084.244.850,00		38.859.404.350,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	80	81	40.344.822.594,00	82	105.677.430.000,00	83	100.767.031.350,00	84	44.084.244.850,00	85	38.859.404.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	73,655	76	78		80		82		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					24.805.177.406,00		43.250.255.895,00		47.414.656.585,00		52.965.912.243,00		57.445.961.685,00	
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi budgeting	Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi (%)	0	84	85	784.582.588,00	86	554.400.000,00	88	609.840.000,00	89	670.824.000,00	90	737.906.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Legislasi	Persentase pengesahan perda yang tepat waktu (%)	82	83	84	3.779.453.236,00	85	14.149.922.115,00	86	15.564.914.327,00	87	17.121.405.759,00	87,5	18.833.546.335,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan yang Difasilitasi (%)	0	84	86	229.864.218,00	87	217.800.000,00	88	239.580.000,00	89	263.538.000,00	90	289.891.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas DPRD (%)	0	84	86	20.011.277.364,00	87	28.328.133.780,00	88	31.000.322.258,00	89	34.910.144.484,00	90	37.584.617.150,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.508.157.672,00		12.499.068.936,00		13.225.631.435,00		13.265.688.955,00		13.529.766.865,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.412.460.216,00		6.292.799.696,00		6.563.099.696,00		6.563.225.496,00		6.895.825.496,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	100	100	7.412.460.216,00	100	6.292.799.696,00	100	6.563.099.696,00	100	6.563.225.496,00	100	6.895.825.496,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase penyusunan perencanaan dan	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	pelaporan tepat Waktu (%)													
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	91,91	92	93		94		95		96		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.958.373.710,00		3.343.466.710,00		3.562.514.140,00		3.514.051.510,00		3.343.466.710,00	

Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	100	1.958.373.710,00	100	3.343.466.710,00	100	3.562.514.140,00	100	3.514.051.510,00	100	3.343.466.710,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase perangkat daerah dengan MR berjalan baik (%)	0	0	10		25		40		60		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase perangkat daerah dengan capaian IKU minimal sebesar 90% (%)	91,67	92,67	93,67		94,67		95,67		96,67		97,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.137.323.746,00		2.862.802.530,00		3.100.017.599,00		3.188.411.949,00		3.290.474.659,00	
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	2.137.323.746,00	100	2.862.802.530,00	100	3.100.017.599,00	100	3.188.411.949,00	100	3.290.474.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					276.021.274.953,90		334.178.978.462,55		366.919.510.739,27		402.906.927.614,95		442.450.702.465,70	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.402.547.105,90		18.722.679.194,85		20.147.770.115,34		21.699.610.547,90		23.376.231.328,50	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	8.890.146.509,00	100	9.779.161.160,00	100	10.757.077.276,00	100	11.832.785.003,00	100	13.016.063.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	83,965	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	70	75		77,5		80		82,5		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	100	100	8.512.400.596,90	100	8.943.518.034,85	100	9.390.692.839,34	100	9.866.825.544,90	100	10.360.167.824,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	43,36	44,18	45,20		46,07		46,95		47,54		48,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					252.925.757.203,00		309.625.031.558,00		340.587.534.713,00		374.646.288.185,00		412.110.917.003,00	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP (%)	95	97	98	902.492.400,00	99	992.741.640,00	99,5	1.092.015.803,00	100	1.201.217.384,00	100	1.321.339.123,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Tertib Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (%)	90	92	94	2.939.183.429,00	96	3.233.101.772,00	98	3.556.411.949,00	99	3.912.053.144,00	100	4.303.258.458,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan (%)	100	100	100	248.442.087.324,00	100	304.692.994.691,00	100	335.162.294.160,00	100	368.678.523.576,00	100	405.546.375.933,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase SP2D yang terbit sesuai Anggaran Kas dan SPD (%)	75	77	80	641.994.050,00	85	706.193.455,00	90	776.812.801,00	95	854.494.081,00	100	939.943.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.434.096.288,00		1.247.505.917,00		1.372.256.508,00		1.509.482.159,00		1.660.430.375,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Jumlah OPD yang telah mengelola BMD dengan Baik (%)	91,85	92	93	1.434.096.288,00	94	1.247.505.917,00	95	1.372.256.508,00	96	1.509.482.159,00	97	1.660.430.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.258.874.357,00		4.583.761.792,70		4.811.949.402,93		5.051.546.723,05		5.303.123.759,20	
Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	Persentase Wajib Pajak yang taat Pajak (%)	90	100	100	2.359.071.418,00	100	2.594.978.559,80	100	2.724.727.008,38	100	2.860.963.208,78	100	3.004.011.069,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Objek Pendapatan Baru	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Baru (%)	100	100	100	1.899.802.939,00	100	1.988.783.232,90	100	2.087.222.394,55	100	2.190.583.514,27	100	2.299.112.689,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					29.451.903.389,00		35.528.827.062,00		39.085.639.542,00		42.998.923.412,00		47.304.477.251,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.914.094.838,00		27.032.033.102,00		29.739.166.187,00		32.717.802.723,00		35.995.244.492,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	100	100	21.914.094.838,00	100	27.032.033.102,00	100	29.739.166.187,00	100	32.717.802.723,00	100	35.995.244.492,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	35,75	35,75	40,00		45,00		55,00		65,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					7.537.808.551,00		8.496.793.960,00		9.346.473.355,00		10.281.120.689,00		11.309.232.759,00	
Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	78	80	5.204.493.960,00	82	5.741.306.819,00	83	6.315.437.500,00	84	6.946.981.250,00	85	7.641.679.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kopetensinya (%)	85	87	90	1.165.566.925,00	91	1.342.507.342,00	92	1.476.758.076,00	93	1.624.433.883,00	95	1.786.877.271,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Terciptanya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	Persentasi Pelayanan Kepegawaian yang Tepat Waktu dan Akurat (%)	100	100	100	1.167.747.666,00	100	1.412.979.799,00	100	1.554.277.779,00	100	1.709.705.556,00	100	1.880.676.113,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					491.168.840,00		2.504.358.143,00		2.613.559.151,00		2.588.858.795,00		2.336.202.085,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					380.348.580,00		2.277.358.143,00		1.871.559.151,00		1.615.858.795,00		1.663.202.085,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan (%)	100	100	100	380.348.580,00	100	2.277.358.143,00	100	1.871.559.151,00	100	1.615.858.795,00	100	1.663.202.085,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase HAKI yang difasilitasi (%)	48	50	50		60		65		65		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					110.820.260,00		227.000.000,00		742.000.000,00		973.000.000,00		673.000.000,00	
Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi (%)	0	0	10	110.820.260,00	11	227.000.000,00	12	742.000.000,00	15	973.000.000,00	20	673.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.127.452.737,00		19.456.647.588,00		19.977.921.758,00		20.499.218.844,00		20.957.668.844,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.288.270.773,00		14.411.647.588,00		14.637.421.758,00		14.888.468.844,00		15.097.668.844,00	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	70	75	80	14.288.270.773,00	85	14.411.647.588,00	90	14.637.421.758,00	95	14.888.468.844,00	100	15.097.668.844,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	93,11	93,50	94		94,50		95		95,50		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	70	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.309.997.492,00		2.435.000.000,00		2.600.500.000,00		2.775.000.000,00		2.922.500.000,00	
Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Keuangan	Persentase temuan/rekomendasi hasil pengawasan keuangan internal yang ditindaklanjuti (%)	80	84	88	1.804.570.492,00	92	1.890.000.000,00	96	2.003.000.000,00	100	2.135.000.000,00	100	2.237.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatkan Kepatuhan Auditan Terhadap Hasil Pengawasan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan kinerja internal yang ditindaklanjuti (%)	80	83	86	505.427.000,00	89	545.000.000,00	92	597.500.000,00	95	640.000.000,00	98	685.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.529.184.472,00		2.610.000.000,00		2.740.000.000,00		2.835.750.000,00		2.937.500.000,00	
Meningkatkan Efektivitas Pemantauan Program Anti Korupsi	Nilai MCSP (Nilai)	85	87	89	1.479.889.796,00	91	1.515.000.000,00	93	1.585.000.000,00	95	1.625.000.000,00	97	1.675.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase unit kerja pelaksana ZI yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM (%)	0	25	50		75		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatkan Profesionalitas APIP	Persentase APIP yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan (%)	70	75	80	55.202.748,00	85	60.000.000,00	90	70.000.000,00	95	85.750.000,00	100	97.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai PK Maturitas SPIP sesuai yang dipersyaratkan (%)	100	100	100	994.091.928,00	100	1.035.000.000,00	100	1.085.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang hasil evaluasi kematangan manajemen risiko sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					55.156.002.799,00		67.322.101.030,00		73.319.808.273,00		80.129.964.573,00		86.929.250.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.763.996.925,00		50.376.246.033,00		55.072.132.768,00		60.386.811.465,00		65.890.228.413,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	3.294.139.004,00	100	3.114.359.196,00	100	3.648.445.115,00	100	3.768.374.627,00	100	4.145.212.089,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	88,22	88,30	89		89,50		90		90,50		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	90	92	2.120.331.399,00	94	2.282.000.000,00	96	2.416.500.000,00	98	2.603.500.000,00	100	2.550.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	60,075	62	65		68		70		72		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	65	70	72	9.292.032.808,00	74	9.983.629.709,00	76	10.981.992.680,00	78	12.080.191.949,00	80	13.288.211.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	85	86	4.328.193.526,00	87	4.975.466.722,00	88	5.472.604.304,00	89	6.019.864.734,00	90	6.621.401.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	0	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	71	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	91	92	2.519.226.874,00	93	2.896.130.000,00	94	2.903.388.000,00	95	3.461.388.000,00	96	3.119.888.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	54,89	55,50	56		56,50		57		57,50		58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	0	87	88		90		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	100	3.250.069.900,00	100	3.988.163.974,00	100	4.311.098.338,00	100	4.482.159.659,00	100	5.004.398.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	-	88,80	91,04		93,28		95,52		97,76		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	77,84	80,06	82,27		84,49		86,71		88,92		91,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	-	86	88,80		91,60		94,40		97,20		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Kegiatan Tepat Waktu (%)	96,55	100	100	5.699.329.860,00	100	5.223.845.459,00	100	5.251.345.459,00	100	5.281.845.459,00	100	5.318.845.459,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	96,55	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	74,1	75,1	76,1		77,1		78,1		79,1		80,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	0	85	87	3.151.992.830,00	89	3.760.504.551,00	91	4.189.816.339,00	93	5.114.108.566,00	95	5.665.031.430,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	0	80	83		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	0	75	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti (%)	0	85	87		89		90		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	4.200.999.164,00	100	4.502.543.578,00	100	4.749.474.578,00	100	5.091.264.578,00	100	5.636.148.678,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	83,65	85	88		90		92		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	90	90,55	91,02	2.202.269.080,00	91,67	2.420.882.872,00	92,20	2.620.882.872,00	93,14	2.820.882.872,00	93,60	3.020.882.872,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	88,54	89	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	89	89,55	90	3.705.412.480,00	90,52	7.228.719.972,00	90,98	8.526.585.083,00	91	9.663.231.021,00	91,51	11.519.709.521,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	89	89,50	89,97		90		90,52		90,97		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	44,4	44,9	45,5		46		46,5		46,9		47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	89	89,51	89,98		90		90,51		90,98		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					456.765.894,00		638.584.566,00		734.246.470,00		795.278.964,00		899.909.109,00	
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	50	51	18.386.380,00	52	40.553.920,00	53	44.609.312,00	54	49.070.243,00	55	53.977.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	0	50	55	43.230.520,00	60	47.553.572,00	65	52.308.929,00	70	57.539.822,00	75	63.293.804,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	17.139.950,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Urusan Pembangunan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Urusan Pembangunan yang Dilaksanakan (%)	0	87	88	20.501.220,00	89	8.484.000,00	90	9.000.000,00	91	9.500.000,00	92	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	21.589.925,00	100	22.089.925,00	100	22.589.925,00	100	23.089.925,00	100	23.589.925,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelayanan Publik yang berkualitas di Kecamatan (%)	100	100	100	19.710.499,00	100	21.681.549,00	100	36.049.704,00	100	26.234.674,00	100	28.858.142,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	68.251.600,00	100	73.251.600,00	100	78.251.600,00	100	83.251.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	16.346.400,00	100	25.000.000,00	100	32.680.000,00	100	38.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	46,55	75	80	35.700.000,00	85	39.270.000,00	90	43.197.000,00	95	47.516.700,00	100	52.260.370,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (%)	90	90,56	91	144.161.000,00	91,53	325.700.000,00	92	375.560.000,00	92,65	416.076.000,00	93	479.678.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.556.090.884,00		10.241.562.461,00		10.766.172.954,00		11.697.577.447,00		12.308.373.641,00	
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	90	91	92	1.432.882.700,00	93	1.575.670.971,00	94	1.733.688.067,00	95	1.906.856.873,00	96	2.097.242.561,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	0	50	55	188.067.240,00	60	1.164.688.030,00	65	1.281.156.833,00	70	1.409.272.516,00	75	1.550.199.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	2	2	2	200.000.328,00	2	219.493.670,00	2	241.443.037,00	2	265.587.341,00	2	292.146.075,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	100	100	365.123.210,00	100	510.000.000,00	100	520.000.000,00	100	530.000.000,00	100	540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	85	86	282.459.250,00	87	460.396.000,00	88	465.666.500,00	89	500.949.000,00	90	511.247.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang mendapat pendampingan (%)	90	90,55	91	155.707.320,00	91,75	1.716.331.000,00	92	1.759.051.000,00	92,82	2.174.596.000,00	93	2.225.276.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	0	100	100	717.214.224,00	100	905.000.000,00	100	935.000.000,00	100	959.020.000,00	100	992.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa yang mendapat pendampingan (%)	100	100	100	490.480.280,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	100	782.641.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	515.249.700,00	100	643.728.470,00	100	708.101.317,00	100	778.911.449,00	100	856.802.594,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	91	92	320.899.900,00	93	374.440.000,00	94	379.440.000,00	95	384.440.000,00	96	389.440.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	100	100	432.898.732,00	100	1.388.553.540,00	100	1.394.053.540,00	100	1.399.553.540,00	100	1.405.053.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	455.108.000,00	100	500.618.800,00	100	565.930.680,00	100	605.748.748,00	100	666.323.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.652.475.972,00		1.931.325.018,00		2.107.266.247,00		2.244.627.943,00		2.419.016.772,00	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	93,26	93,41	93,56	139.800.000,00	93,71	141.461.775,00	93,86	163.534.864,00	94,01	155.961.607,00	94,16	178.984.687,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	100	188.677.600,00	100	331.630.000,00	100	398.840.000,00	100	461.050.000,00	100	523.260.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	100	100	100	166.795.668,00	100	183.475.235,00	100	201.822.759,00	100	222.005.034,00	100	244.205.538,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	0	50	55	121.064.148,00	60	195.553.600,00	65	215.108.960,00	70	236.619.856,00	75	260.281.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	172.716.792,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani (%)	77,84	90	91	188.560.848,00	92	189.560.848,00	93	190.560.848,00	94	190.560.848,00	95	191.560.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase tingkat penanganan masalah trantibum yang muncul di tingkat kecamatan (%)	90	90	90	129.514.556,00	91	130.000.000,00	92	130.000.000,00	93	130.000.000,00	94	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi untuk upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (%)	100	100	100	162.229.600,00	100	178.452.560,00	100	202.397.816,00	100	215.927.598,00	100	237.520.357,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	100	95.199.960,00	100	71.300.000,00	100	76.300.000,00	100	81.300.000,00	100	86.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	212.713.600,00	100	86.211.000,00	100	95.021.000,00	100	104.023.000,00	100	113.223.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase tingkat penanganan masalah trantibum yang muncul di tingkat kecamatan (%)	90	90,65	91	75.203.200,00	91,52	243.680.000,00	92	243.680.000,00	92,67	247.180.000,00	93	243.680.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.697.456.879,00		3.030.248.332,00		3.398.960.042,00		3.714.097.273,00		4.025.922.276,00	
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (%)	90	91	92	234.981.160,00	93	364.283.000,00	94	374.283.000,00	95	384.283.000,00	96	394.283.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	85	86	87	302.106.000,00	88	436.792.000,00	89	579.268.000,00	90	717.455.000,00	91	802.486.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	0	100	100	337.336.000,00	100	460.000.000,00	100	525.000.000,00	100	580.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	0	51	52	205.696.600,00	53	286.144.100,00	54	314.758.510,00	55	346.234.361,00	56	380.857.797,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	93,11	95	100	337.704.735,00	100	339.704.735,00	100	341.704.735,00	100	343.704.735,00	100	345.704.735,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasiltasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	203.743.000,00	100	224.117.300,00	100	246.529.030,00	100	271.181.933,00	100	298.300.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	0	100	100	251.571.484,00	100	252.000.000,00	100	273.000.000,00	100	294.000.000,00	100	315.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan	87	87	87	113.625.600,00	90	115.000.000,00	92	120.000.000,00	93	125.000.000,00	95	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Umum (%)													
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	97,4	98,44	98,74	115.843.400,00	99	145.052.017,00	99,34	159.557.219,00	99,64	175.512.941,00	100	193.064.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Urusan Pemerintahan umum diKecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	75	75,50	76	344.135.800,00	77	258.938.680,00	77,50	309.232.548,00	78	313.315.803,00	80	344.647.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	0	100	100	250.713.100,00	100	148.216.500,00	100	155.627.000,00	100	163.409.500,00	100	171.579.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.029.216.245,00		1.104.134.620,00		1.241.029.792,00		1.291.571.481,00		1.385.800.489,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat Desa (%)	100	100	100	96.643.200,00	100	106.307.520,00	100	171.838.272,00	100	128.632.099,00	100	141.495.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	60	62	64	43.352.000,00	66	47.687.200,00	68	52.455.920,00	70	57.701.512,00	72	63.471.663,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	100	100	100	45.094.377,00	100	83.000.000,00	100	102.000.000,00	100	120.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	0	50	55	59.591.778,00	60	92.378.000,00	65	101.615.800,00	70	111.777.380,00	75	122.955.118,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	0	100	100	24.221.690,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Pemerintah Desa Tepat Waktu (%)	90	91	92	76.649.900,00	93	92.445.000,00	94	97.445.000,00	95	102.445.000,00	96	107.445.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	98,53	100	100	140.915.900,00	100	141.515.900,00	100	142.915.900,00	100	143.915.900,00	100	144.915.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	85	86	87	31.620.000,00	88	21.294.000,00	89	22.359.000,00	90	33.477.500,00	91	38.651.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi dan Pembangunan (%)	87	88	89	67.410.000,00	90	70.578.000,00	91	70.578.000,00	92	78.318.000,00	93	72.232.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	293.337.000,00	100	258.929.000,00	100	284.821.900,00	100	313.304.090,00	100	344.634.499,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi dan Pembangunan (%)	100	100	100	150.380.400,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	162.000.000,00	100	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.550.000.000,00		20.539.016.893,00		13.143.568.582,00		14.455.925.441,00		15.899.517.985,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.983.107.674,00		13.131.646.677,00		4.997.461.346,00		5.497.207.480,00		6.046.928.228,00	
meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	3.983.107.674,00	100	13.131.646.677,00	100	4.997.461.346,00	100	5.497.207.480,00	100	6.046.928.228,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	87,98	88,48	88,98		89,48		89,98		90,48		90,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.595.485.247,00		1.704.125.692,00		1.873.538.260,00		2.059.892.087,00		2.264.881.296,00	
Meningkatnya wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (%)	75	75	80	1.595.485.247,00	85	1.704.125.692,00	90	1.873.538.260,00	95	2.059.892.087,00	100	2.264.881.296,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.962.291.967,00		2.000.879.331,00		2.200.967.264,00		2.421.063.990,00		2.663.170.389,00	
Meningkatnya partisipasi politik dimasyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu (5 tahunan) (%)	84	0	0	1.962.291.967,00	0	2.000.879.331,00	87	2.200.967.264,00	0	2.421.063.990,00	0	2.663.170.389,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase peningkatan kegiatan pendidikan politik oleh partai politik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					240.420.553,00		245.009.490,00		269.510.439,00		296.461.483,00		326.107.631,00	
Meningkatnya Kualitas Ormas dan Kesiswaan	Persentase Ormas dan Kesiswaan yang memahami perannya di masyarakat (%)	10	11	12	240.420.553,00	13	245.009.490,00	14	269.510.439,00	15	296.461.483,00	16	326.107.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					557.581.550,00		549.116.501,00		603.028.151,00		662.330.967,00		727.564.063,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaganya Suku, Agama dan RAS	Persentase konflik terkait suku ras dan agama (%)	0	0	0	557.581.550,00	0	549.116.501,00	0	603.028.151,00	0	662.330.967,00	0	727.564.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					13.211.113.009,00		2.908.239.202,00		3.199.063.122,00		3.518.969.434,00		3.870.866.378,00	
Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang dideteksi dini (%)	100	100	100	13.211.113.009,00	100	2.908.239.202,00	100	3.199.063.122,00	100	3.518.969.434,00	100	3.870.866.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**2564946753797.87**		**2947905268868.55**		**3053567944732.27**		**3133291616640.95**		**3259910358207.36**	

D. Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 disusun berpedoman Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Terkait nomenklatur urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan lainnya, juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Tabel I-10 menyajikan perkiraan pagu pendanaan tahun 2025 yang diambil dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 dari setiap Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setiap pagu anggaran tersebut dikelompokkan, diakumulasi dan ditampilkan berdasarkan Urusan/Bidang yang bersesuaian menurut kewenangannya, berdasarkan nomenklatur terbaru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan/atau menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel I-10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2025 sesuai Urusan/Bidang

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
1		2	3	4
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**1,377,298,104,388.00**
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	490.013.601.972,00	456,361,095,410.00

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
3	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	432.866.246.246,00	605,362,053,609.00
4	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	228.466.915.924,00	239,600,822,688.00
5	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.543.119.319,00	44,666,236,717.00
6	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.575.611.726,00	16,331,088,894.00
7	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.408.057.030,00	14,976,807,070.00
8		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**	**-**	**137,638,300,356.00**

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
		PELAYANAN DASAR		
9	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.835.763.010,00	9,310,917,730.00
10	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.478.941.700,00	1,256,085,450.00
11	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.888.875.087,00	6,908,575,960.00
12	2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.593.316.400,00	1,071,338,900.00
13	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	30.710.165.299,00	28,632,864,963.00

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
14	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.618.976.071,00	7,642,853,631.00
15	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.786.127.844,00	9,877,681,053.00
16	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.258.688.000,00	5,958,599,400.00
17	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23.656.961.000,00	13,417,157,740.00
18	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.990.306.633,00	8,970,127,420.00

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
19	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	-	7,048,943,125.00
20	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.547.789.801,00	8,848,327,601.00
21	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.057.820.283,00	17,203,267,449.00
22	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	379.011.000,00	211,321,024.00
23	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	186.571.000,00	85,410,500.00
24	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.012.853.990,00	1,827,287,143.00
25	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN	13.171.900.398,00	8,932,239,090.00

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
		BIDANG PERPUSTAKAAN		
26	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	524.742.397,00	435,302,177.00
27		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**-**	**58,679,740,435.00**
28	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	4,865,073,687.00
29	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.713.646.700,00	6,439,865,950.00
30	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	43.456.461.228,00	38,447,034,658.00
31	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.960.317.790,00	6,700,175,600.00
32	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.871.466.070,00	2,227,590,540.00

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
		PERINDUSTRIAN		
33		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**146,034,244,214.00**
34	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	68.339.764.380,00	96,791,820,462.00
35	4.02	SEKRETARIAT DPRD	87.872.765.837,00	49,242,423,752.00
36		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**299,661,794,433.00**
37	5.01	PERENCANAAN	12.181.576.043,00	8,171,114,599.00
38	5.02	KEUANGAN	280.036.824.904,00	264,701,399,037.00
39	5.03	KEPEGAWAIAN	24.199.653.167,00	25,284,947,747.00
40	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.383.648.950,00	1,504,333,050.00
41		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**21.162.581.414,00**	**14,640,102,437.00**
42	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	21.162.581.414,00	14,640,102,437.00
43		**UNSUR KEWILAYAHAN**	**64.552.072.885,00**	**52,805,107,155.00**

KODE		URUSAN/BIDANG	PAGU 2025	PERUBAHAN PAGU 2025
44	7.01	KECAMATAN	64.552.072.885,00	52,805,107,155.00
45		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**13.504.417.286,00**	**8,366,321,140.00**
46	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.504.417.286,00	8,366,321,140.00
		NON URUSAN	**15.672.624.391,00**	-
47	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	15.672.624.391,00	-
			2.094.480.182.175,00	**2,095,123,714,558.00**

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan

maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah, karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber saya aparatur, kelengkapan dan factor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan nyata akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayaanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

C. Kebijakan Umum

Strategi Pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencapai sasaran meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Tahun N (Tahun 2025)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,33	74.26	1,3
2	Angka Kemiskinan	5,81	5,03	-13,43
3	Angka Pengangguran	3,20	3,12	-2,50
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	5,24	5,86
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	34,85	37,59	7,86
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) *)	0,251	0,251*	0*

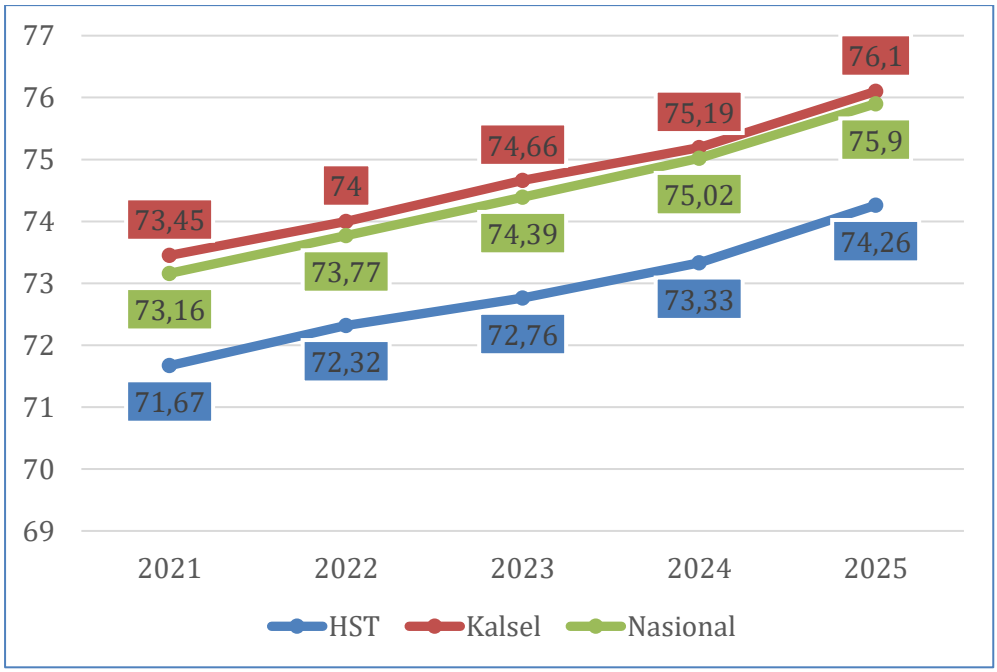
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

Keterangan :

*) : Angka Sementara (mengikuti tahun sebelumnya)

1. Indeks Pembangunan Manusia

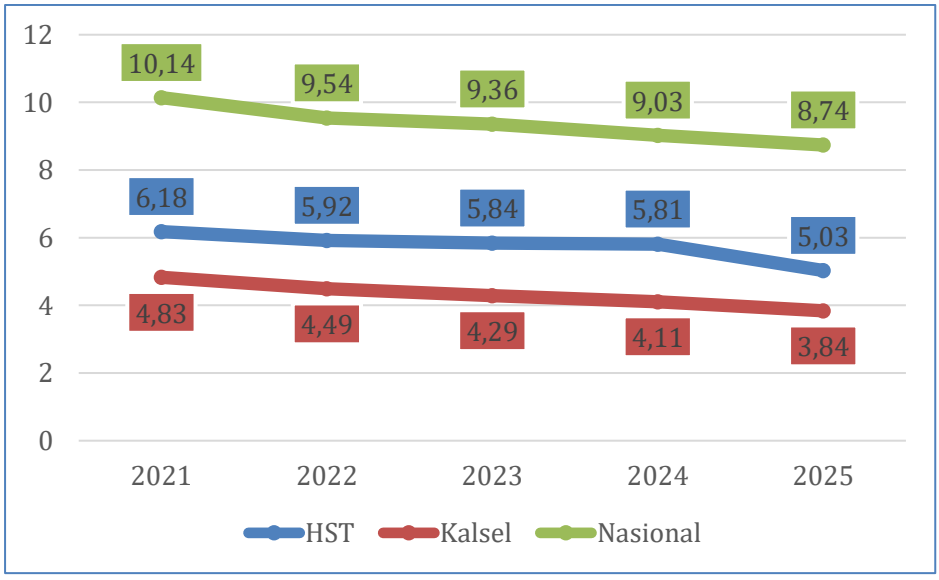
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kab. Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Tahun 2026

2. Angka Kemiskinan

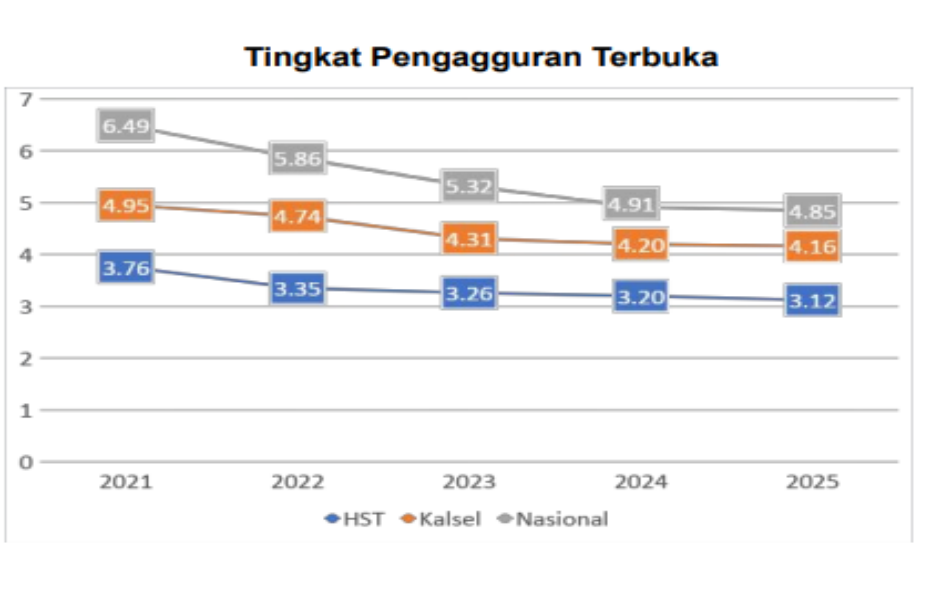
Angka kemiskinan Menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kab. Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Tahun 2026

3. Angka Pengangguran

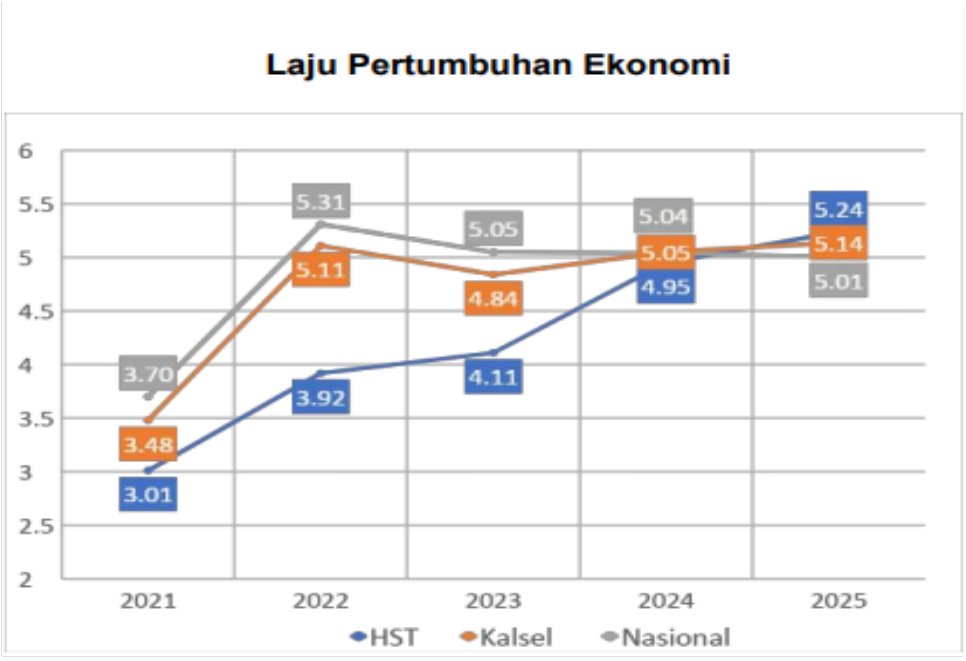
Angka Pengangguran Menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kab. Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Tahun 2026

4. Pertumbuhan Ekonomi

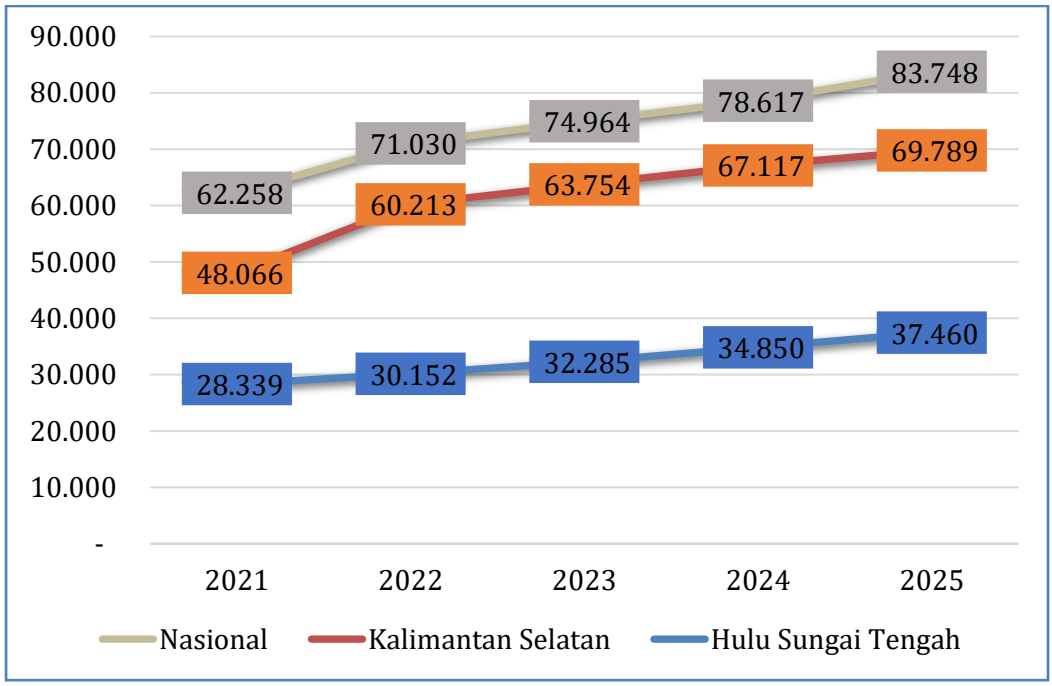
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kab. Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Tahun 2026

5. PDRDB Perkapita

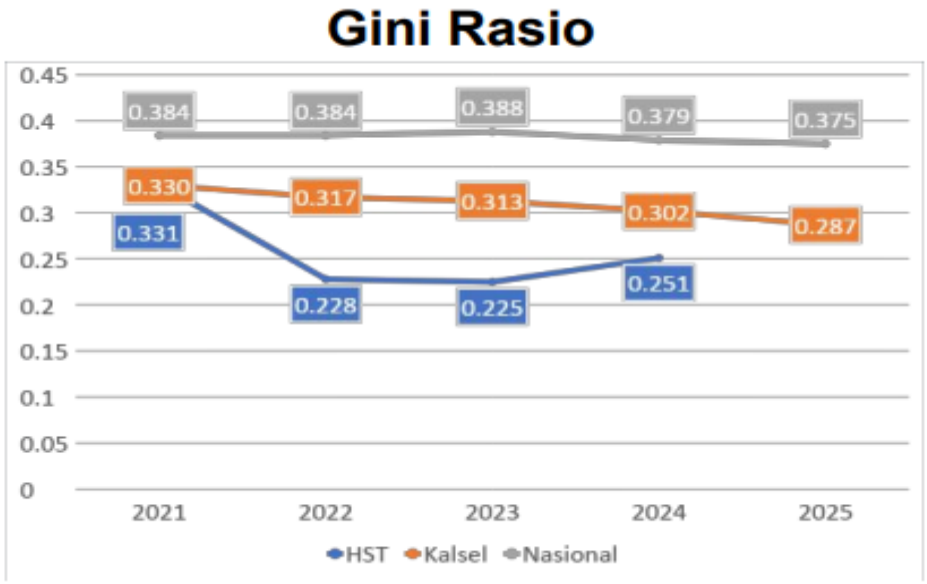
PDRB Per-Kapita Menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Tengah, Tahun 2025

6.Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Rasio Menurut Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kab. Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, Tahun 2026

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan tentang pemerintah daerah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	*Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini* *x 100%* *Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan* 7608 x100% = 92,27% 8245	Data Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kab. HST	Apabila data tidak tersedia maka dijelaskan alasannya.
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar *x 100%* ***Jumlah anak usia 7−15 tahun pada*** *kabupaten* ***yang bersangkutan*** 36971 x100% = 93,54% 39521	Data Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kab. HST	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan *x 100%* *Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah* 1523 x100% = 50,80% 2998	Data Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kab. HST	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik *x 100%* ***Jumlah*** *Seluruh Toilet* 250 x100% = 29,79% 839	Data Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kab. HST	
		5. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik x 100%* *Junlah Ruang Kelas* 510 X 100% = 27,14% 1879		
2.	Kesehatan	1. Persentase Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu Tahun N *x 100%* *Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N* 8 x 100% = 0,25 % 3.203	Laporan Puskesmas	
		2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu*x 100%* Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama 1.810 x 100% = 13,3 % 13.649	Laporan Puskesmas	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satun tahun (nominator) *x 100%* *Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 2.961.x100% = 86,78% 3.412	Laporan Puskesmas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayananan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun *x 100%* *Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 3,151.x100% = 92,70% 3,412	Laporan Puskesmas	
		5. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	*Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun* x 100% Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang *sama* 3,080x100% = 95,21% 3.235	Laporan Puskesmas	
		6. Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	*Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3* x 100% *Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama* 17,629x100% = 106,32% 16.581	Laporan Puskesmas	
		7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	*Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran* x 100% *Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama* 34,816x100% = 97,79% 35.602	Laporan Puskesmas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun *x 100%* $\frac{\textit{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam waktu satu tahun}}{}$ 173.291x100% = 85,57 % 202.511	Laporan Puskesmas	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	*Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)* x 100% *Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)* 26.097x100% = 83,20% 31.365	Laporan Puskesmas	
		10. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standa	*Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun* x 100% *Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 16.532x100% = 118,9 % 13.903	Laporan Puskesmas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		11. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	*Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun* x 100% *Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam* *wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 4.019 x100% = 122,0 % 3.294	Laporan Puskesmas	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	***Jumlah penderita ODGJ berat*** di *wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun* x 100% ***Jumlah penderita ODGJ*** berat *berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 649x100% = 147,8 % 439	Laporan Puskesmas	
		13. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	*Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahu* x 100% *Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 5.108 x100% = 89,8% 5.685	Laporan Puskesmas	
		14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	*Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun* x 100%	Laporan Puskesmas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		(Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	*Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama* 6.555x100% = 104,9% 6.249		
3	Pekerjaan Umum	1. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi* Baik (Ha) *x 100%* *Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)* 9.610 x100% = 68,75% 13.979		
		2. Persentase Kemantapan Jalan Kabup	*Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)* x 100% *Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)* 538,296 x100% = 71,16% 756,497		
		3. Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan	*Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N x 100%* *Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota* 263.812 x 100 % = 96,94 % 272.140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PT. Air Minum Murakata Lestari dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		4. Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	*Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik x 100%* *Jumlah rumah di Kabupaten/Kota* 74.367 x100% = 94,98 % 78.294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		5. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	*Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha) x 100%* *Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)* 1.204 x100% = 2,28 % 52.891,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		6. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) x 100%* *Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)* 0 x100% = 0 % 0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		7. Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	*Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			x 100% *Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku* 47 x100% = 100 % 47	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		8. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	*Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan* *x 100%* *Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk* 3 x 100% = 100 % 3		
		9. Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis* *x 100%* *Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota* 166 x 100% = 27 % 612		
		10. Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	*Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun* *x 100%* *Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun* 0 x 100% = 0 % 8		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	*Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N* *x 100%*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N 14x100% =1% 14		
		2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	*Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N x 100%* *Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N* 1,05 x100% = 21% 5 Ha		
		3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	*Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N x 100%* *Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N* 1.000x100% = 100% 1.000		
		4. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	*Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N 100%* *Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N* 13 x100% = 100% 13		
5	Trantibumlinmas	1. Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan	*Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N x 100%*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		dan Masih Berlaku	*Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) =* 3 x100% = 1 % 3		
		2. Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	*Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani x 100%* *Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan* 67 x100% = 1,% 67		
		3. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	*Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan x 100%* *Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi* 17 x100% = 0,85% 20		
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana* x 100% *Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana* 700 x 100% = 0,33% 195.846		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana* x 100% *Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana* 48.174x100% = 100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			48.174		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	***Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah*** *ditambah* ***jumlah layanan pemadaman di kab****upaten/****kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan*** x 100% ***Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota*** 64x100% = 100 % 64		
6	Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	*(Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti) x 100%* *738 x 100% = 95,23 %* *775*	Bidang Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	
		2. Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	*Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya x 100%* *Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan*	Bidang Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen 135 x100% = 74,58 % 181		
		3. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	*Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya x 100%* *Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen* 784 x100% = 97,63 % 803	Bidang Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	*Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya x 100%* *Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti* 21 x100% = 100 % 21	Bidang Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	
		5. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya x 100%* *Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota* 135 x100% = 100 % 135	Bidang Data Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	*Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar x 100%* *Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota* 1.813 x100% = 96,28 % 1.883	Bidang Data Sosial dan Bidang Sosial Dinsos PPKBPPPA Kab. HST	
7	Ketenagakerjaan	1. Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	*Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah* x 100% *Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten/Kota* 13 x100% = 100 % 13		
		2. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	*Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak*x 100% *Jumlah Perusahaan* 10 x100% = 14.29 % 70		
		3. Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	*Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan social ketenagakerjaan yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota x 100%* *Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota* *49.213 x100% = 98.43 %* *50.000*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	*Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif x 100% Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)* *42x100% = 100 %* *42*	UPTD PPA	
		2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	*Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif x 100%* *Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang* *20x100% = 100 %* *20*	UPTD PPA	
9	Pangan	1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kotax 100% Target Jumlah Cadangan Pangan* *103,933 ton x100% = 293,76%* *35,38 ton*		
10	Pertanahan	1. Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	*Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah x 100%* *Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah* 13,893,997,96 x100% = 0,170% 81,664,071.05	Disperkimtan	
		2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	*Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting x 100%* *Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah* *3,375.800x100% = 0.001013%*	Disperkimtan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			1.764.232.400		
		3. Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	*Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal x 100% Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah* *1 x100% = 0.1 %* 11	Disperkimtan	
11	Lingkungan Hidup	1. Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUULH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota x 100 %* *Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung* *21 x100% = 70 %* *30*	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	*Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse,Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota x 100% Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota* *23.089,05 x100% = 47,14 %* 48.975,70	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	*Akta kelahiran yang diterbitkan* x 100% *Jumlah anak usia 0 – 17 tahun* 73.452 x 100% = 99,98 % 73.467		
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	*Jumlah Anak yang Memiliki KIA* x 100% *Jumlah anak wajib KIA* 46.511 x100% = 67,44 % 68.963		
		3. Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	*Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan* x 100% *2 (Dua) Dokumen* 1 x100% = 100% 2		
		4. Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	*Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik* *X 100%* *Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas* 203.389 X 100% = 74.51% 272.954		
		5. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	*Akta kematian yang diterbitkan* *X 100%* *Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan* 2.768 X 100% = *100 %* *2.768*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		6. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	*Akta perkawinan yang diterbitkan* / *Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan* X 100% = 1 % (39 / 39)		
		7. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	*Akta perceraian yang diterbitkan* / *Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan* X 100% = % (3 / 3)		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	***Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa*** *per tahun x 100%* / ***Jumlah desa tertinggal*** *(****per awal tahun*** *N)* = *0 x100% = 0 %* (0 / 0)		
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	***Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun*** x 100% / ***Jumlah desa berkembang*** (***perawal tahun*** *N*) = 3 x100% = 33,33 % (3 / 9)		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	*Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku x 100%* *Jumlah kerja sama desa yang ditangani* 7X 100% = 28% 25		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	*Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota x 100%* *Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan* 2,30 x 100% = 92% 2,50	Kementrian Kependudukan dan pembangunan Keluarga / BKKBN	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	*Total peserta KB Aktif Modern x 100%* *Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun* 28.509x100% = 72,38% 39.390	Applikasi SIGA	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	*Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota x 100%* *Target persentase kebutuhan ber Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah*	Kementrian Kependudukan dan pembangunan Keluarga / BKKBN	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			pusat untuk provinsi yang bersangkutan 9,4 x100% = 150,4 % 6,25		
15	Perhubungan	1. Konektivitas Kabupaten/Kota	*KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)* *- KTD = Konektivitas Transportasi Darat* *- WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)* *- KTL = Konektivitas Transportasi Laut* *- WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %)* *Keterangan :* *1. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masingmasing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah.* *2. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).* 0,64 + 0 = 64%		
		2. Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	*V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota* = 0,31		
		3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	*Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan* *x 100%* *Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			0 x 100 = 0 % 0		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo x 100% Jumlah Perangkat daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah 36 x 100% = 100 % 36		
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	***Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** x 100% ***Jumlah Layanan Publik*** 9 x 100% = 100 % 9		
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota*** x 100 ***Jumlah penduduk*** 187.464 x100% = 97,42 % 192.419		
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Mengukur pertumbuhan volume usaha koperasi	∑ Volume usaha koperasi tahun berjalan - ∑Volume usaha koperasi tahun sebelumnya _____ x100 % ∑ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya 19,481,409,593-15,967,833,000 x100% = -18.04% 19,481,409,593		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentasi Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	∑ Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) _____ x 100% ∑ Usaha Mikro 7.293 x100% = 38,01% 19.188		
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(***Jumlah investasi tahun*** N **−*jumlah investasi tahun n−1 di Kabupaten/Kota***) _____x 100% ***Jumlah investasi tahun n−1 di Kabupaten/Kota*** (208.881.441.463-185.941.394.488) x 100% =12.34% 185.941.394.488		
		2. Persentasi realisasi Investasi terhadap target investasi	Total realisasi investasi kab/kota _____ x 100% Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan 208.881.441.463 x 100% = 102.14% 204.500.000.000		
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	***Jumlah Pemuda*** *usia* (**16−30**) ***tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota*** _____ x 100% ***Jumlah*** target ***Pemuda*** *usia* (**16−30**) ***tahun*** yang mendapatkan pembinaan wirausaha ***di kabupaten/kota*** 6.108 x 100% = 53.11% 11.500		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. persentasi partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakatan	$\frac{\textbf{\textit{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\textbf{\textit{Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota}}}$ x 100% 5.476 x 100% = 8,58% 63.791		
		3. Persentasi Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk pemusatan Latihan daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi _____ x 100% Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) 10 x 100%=1.75% 572		
		4. Persentasi Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali _____x 100% Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional 5 x 100 % = 62.50% 8		
20	Statistik	1. Persentase Kepatuhan daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali data Berdasarkan kesepakatan Forum satu data Daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah _____x100% Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah 58 x 100% = 100 % 58		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21	Persandian	1. Persentasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks keamanan Informasi (KAMI) Hasil Verifikasi x 100% Nilai optimal indeks keamanan Informasi (KAMI) (918) 264 x 100% = 28,76 % 918		
22	Kebudayaan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	*Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan x 100%* *Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan* 19 x 100% = 100 % 19		
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	*Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N -1 x 100%* *Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1* 89 x 100% = 111,25 % 80		
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	*Nilai tingkat kegemaran membaca:* *{(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)} x 100* *{(0,15 x 53,39 + (0,50 x 56,03) + (0,35 x 60,9)} x 100 = 57,39*		
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	*Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat + {(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)} x 100* *Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat +*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			{(0,30 x 0,042) + (0,70 x 0,0,1057)} x 100 = 5,84		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 = (100+100+ 100+ 100) / 4 = 100 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 = (0,14 + 100 + 0+ 100 + 100 + 6) /6 = 50,02 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
25	Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	*Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton) x 100%* *Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			11.541,48 x100% = (100,67%) 11.464,76		
		2. Angka Konsumsi Ikan	*Angka KI = Angkat KRT+ANGKA KLRT+ANGKA KTT* *41,85+8,883+1,5= 52,233 kg*		
26	Pariwisata	1. Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	*Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) x 100%* *Realisasi Investasi tahun N* Rp. 361.216.993,- x100% =1,57 % Rp. 22.940.046.975,-		
		2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	*Jumlah wisatawan asing tahun N - Jumlah wisatawan asing tahun N-1 x 100%* *Jumlah wisatawan asing tahun N-1* 40 - 37 x100% = 8,1% 37		
		3. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	*Jumlah wisatawan nusantara tahun N – Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 x 100%* *Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1* 251.032 - 227.911 x100% = 10,14 % 227.911		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
27	Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 x 100%* *Produksi tanaman pangan tahun N-1* 225.998-205.708 x100% = 9,86 % 205.708		
		2. Persentase peningkatan produksi hortikultura	*Produksi hortikultura tahun N –* *Produksi hortikultura tahun N-1 x100%* *Produksi hortikultura tahun N-1* 14.104,6 - 13.930 x100% = 1,25 % 13.930		
		3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	*Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1* *x 100%* *Produksi komoditas peternakan tahun N* 10.729,229 - 9.161,164 x100% = 17,12 % 9.161,164		
		4. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	*Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini x 100%* *Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis* 82,03 Km2 x100% = 100 % 82,03 Km2		
28	Kehutanan	-	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-		
30	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku x 100% Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota 452 x100% = 31.99 % 1413		
31	Perindustrian	1. Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan • Capaian 29.57% --> Bobot maksimal 30% 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan • Capaian 29.95% --> Bobot maksimal 30% 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan • Capaian 13.90% --> Bobot maksimal 15% 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan • Capaian 0% --> Bobot maksimal 5% 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan • Capaian 1.78% --> Bobot maksimal 20% =75,2		
		2.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan 2. Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional x100% Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah 17 x100% = 12.05 % 141		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\textbf{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\textbf{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$ 4450-4450 x100% = 0 % 4450		
		4. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi 4. Seluruh Sektor	Jumlah investasi sektor industri x 100% Total investasi seluruh sektor 3,773,329,351 x100% = 1.81% 208,881,441,463		
32	Transmigrasi	-			

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan (BAPPERIDA)	1. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	*Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan x 100%* *Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden* 17 x100% = 100 % 17		
2	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (BPKAD)	1. Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru,	*Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) x*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	*100%* *Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* 628.485.409.249,00 ---------- x 100% = 26,71% 2.353.335.150.532,00		
		2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	*Realisasi Pendapatan Asli Daerah* *x 100%* *Realisasi Pendapatan Daerah* 312.272.802.118,66 ---------- x 100% = 16,68% 1.871.913.402.454,66	(BPKAD)	
		3. Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	*Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N x 100%* *Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N* 1.398.242.952.171,00 ---------- x 100% = 90,03% 1.553.094.681.063,00	(BPKAD)	
		4. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	*Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik x 100%* *Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa* 897.182.121.294,32 ---------- x 100% =38,12% 2.353.335.150.532,00	(BPKAD)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDMD)	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	*Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%* *Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* $\frac{840}{1.070}$ X 100% = 78,50 %		
4	Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan (BAPPERIDA)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	*Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah x 100%* *Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah* $\frac{51}{51}$ X 100% = 100%		
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan (Inspektorat Daerah)	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah sebagai berikut: Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan		
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), level 4, Skor 4 nilai capaian 2	(Inspektorat Daerah)	
		Manajemen Risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4;	(Inspektorat Daerah)	
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	*Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1* *Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1* *855 = 22,5* *38*	(Inspektorat Daerah)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan (Sekretariat Daerah)	1. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	*Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jas* 40%		
		2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan	*Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan* 17,65%	(Sekretariat Daerah)	
		3. Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	*Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa* 20,869	(Sekretariat Daerah)	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah (Badan pengelolaan keungaan Dan Aset Daerah)	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	*Tepat Waktu;*		
	(Sekretariat Dewan DPRD/Bagian Hukum)	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	*Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N* *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N* 10 = 0,4 (40%) 25		
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik (Bagian Organisasi)	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	*Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik* *Tidak menjadu sampel dalam penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025*		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi tersebut dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pengukuran terhadap capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

PERFORMANCE GAP ANALYSIS

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

Pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perwujudan dari Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Tingkat Kemiskinan	5,30	5,03	105,09
2		Indeks Pembangunan Manusia	73,80	74,26	100,62
3	Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	0,00	0,00	100
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75	56,40	99,38
4		Indeks Pembangunan Keluarga	64,01	66,10	103,27
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & "Ber Akhlak"	Indeks Reformasi Birokrasi	72,00	71,49	99,29
6	Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,61	101,32
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	3,48	99,43
		Indeks Pemerintah Digital	-	-	-
7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,60	2,9275	81,32
		Nilai SAKIP	71,50	71,06	99,38
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00
8	Meningkatnya integritas pemerintah daerah	Nilai SPIP	3164,00	2,71	0,09
		Indeks Manajemen Risiko	3045,00	2,66	0,09
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,00	71,76	101,07

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	62,30	63,11	101,30
		Harapan Lama Sekolah	12,36	12,58	101,78
		Rata-rata Lama Sekolah	8,39	8,45	100,72
		Indeks SPM Pendidikan	86,74	85,87	99,00
10		Usia Harapan Hidup	72,87	73,02	100,21
		Indeks Kesehatan	88,12	88,37	100,28
11	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	35,90	37,59	104,71
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,01	100,20
		Indeks Daya Saing Daerah	3,70	3,74	101,08
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	3,75	2,19**	58,40
		Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Indrustri Pengolahan	3,49	3,11**	89,11
		Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	4,13	9,07**	219,61
		Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	6,86	11,8**	172,01
		Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	6,36	6,42	100,97
		Nilai Investasi	204,50	208,881	102,14
13	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,216	0,25	131,48
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,695	0,342	150,79
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,137	0,037	172,99
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04	3,12	97,37

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
14	Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,65	12,63	99,84
		Rasio Kewirausahaan Daerah	21,50	12,96	60,28
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86,39	74,53	86,27
		Nilai Ekspor	1,20	1,84	153,33
		Tingkat Inflasi	3,50	3,93	87,71
15	Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	70,00	91	130,59
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,00	80,48	111,78
		Indeks Risiko Bencana	125,00	116,35	106,92
16		Indeks Infrastruktur	62,89	62,85	99,94
17		Penurunan intensitas emisi GRK	1,46	1,00	131,51
		Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,45	97,83

Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD disajikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD Pada tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Pada tahun 2029	Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat Kemiskinan	5,03	5,430	107,366	4,12	77,91
2	Indeks Pembangunan Manusia	74,26	73,800	100,623	75,8	97,97
3	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	0,00	0,000	100,000	0,000	100,000
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,40	56,750	99,383	57,57	97,97
4	Indeks Pembangunan Keluarga	66,10	64,010	103,265	70,01	94,42
5	Indeks Reformasi Birokrasi	71,49	72,000	99,292	80,5	88,81

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD Pada tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Pada tahun 2029	Capaian Kinerja (%)
6	Indeks Pelayanan Publik	4,61	4,550	101,319	4,75	97,05
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.48	3,500	100,000	-	-
	Indeks Pemerintah Digital	-	-	1,80	-	-
7	NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	2,93	3,6	81,32	4,10	71,40
	Nilai SAKIP	71,06	71,500	99,38	80,50	88,27
	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	100
8	Nilai SPIP	2,71	3,164	85,65	3,68	73,64
	Indeks Manajemen Risiko	2,66	3,045	87,225	3,459	76,90
	Nilai Survei Penilaian Integritas	71,76	71	101,070	75	95,68
9	Indeks Pendidikan	63,11	62,300	101,30	63,36	99,61
	Harapan Lama Sekolah	12,58	12,360	101,78	12,55	100,24
	Rata-rata Lama Sekolah	8,45	8,390	100,72	8,55	98,83
	Indeks SPM Pendidikan	85,87	86,640	99,11	89,71	95,71
10	Usia Harapan Hidup	73,02	72,870	100,21	73,95	98,74
	Indeks Kesehatan	88,37	88,12	100,28	89,92	98,28
11	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	37,59	35,90	104,71	49,75	75,56
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,01	5,00	100,20	6,50	77,08
	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	3,70	101,08	3,97	94,21
12	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	2,19	3,75	58,40	4,87	44,97
	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	3,11	3,49	89,11	4,90	63,47
	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	9,07	4,13	219,61	5,78	4,87
	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	11,8	6,86	176,65	8,98	131,40

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD Pada tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Pada tahun 2029	Capaian Kinerja (%)
	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	6,42	6,36	100,97	7,34	87,49
	Nilai Investasi	208,88	204,5	102,14	464,85	44,94
13	Rasio Gini	0,250	0,216	84,26	0,204	77,45
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,342	0,695	150,79	0,495	130,91
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,037	0,137	172,99	0,121	169,42
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	3,04	97,37	2,80	88,57
14	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,63	3,49	361,89	14,75	85,63
	Rasio Kewirausahaan Daerah	12,96	21,50	60,28	22,5	57,50
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	74,53	86,39	86,27	266	28,02
	Nilai Ekspor	1,84	1,2	153,33	1,90	96,84
	Tingkat Inflasi	3,93	3,5	89,06	3,5	87,71
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	91	70	130,59	80	114,27
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80	72	106,92	74,03	108,71
	Indeks Risiko Bencana	116,35	125	106,92	122,01	95,36
16	Indeks Infrastruktur	62,85	62,89	99,94	74,39	115,51
17	Penurunan intensitas emisi GRK	1,00	1,460	131,507	1,15	86,96
	Indeks Ketahanan Daerah	0,45	0,46	102,17	0,5	90

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN STARTEGIS

1.1 Sasaran 1, Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya

1.1.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	5,30	5,03	105,09
	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	74,26	100,62

Berdasarkan data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025, terkait sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul, dan berdaya saing, telah menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tercermin dari dua indikator utama, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat Kemiskinan berhasil ditekan hingga angka 5,03, lebih rendah dari target awal sebesar 5,30, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 105,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa program intervensi ekonomi dan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang tahun 2025, dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan dengan realisasi sebesar 74,26, melampaui target yang dipatok pada angka 73,80. Dengan capaian sebesar 100,62%, hasil ini membuktikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara keseluruhan, sinergi antara penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten HST telah berada pada jalur yang tepat. Konsistensi dalam pencapaian di atas 100% ini menjadi fondasi kuat bagi daerah untuk terus memacu daya saing sumber daya manusianya di masa mendatang.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	389.884.250	105.787.025	27,13
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	97,41	3.206.797.600	3.074.863.359	95,89
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	87,05	334.515.600	169.689.114	50,73
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	401.682.600	271.605.590	67,62
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	811.432.000	785.316.420	96,78
Program Pembinaan Perpustakaan	100	5.666.255.699	4.496.501.865	79,36
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75	191.826.900	133.377.874	69,53
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,61	298.652.087.109	284.209.822.735	95,16
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100	200.395.850	190.384.000	95
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	83	326.048.500	239.229.988	73,37
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Pendidikan	100	123.513.947.638	116.181.545.267	94,06
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	15.665.961.920	13.664.805.367	87
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	562.902.110	378.635.140	67
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	225.200.000	201.585.000	90
Program Pengembangan Kebudayaan	100	1.254.429.593	1.252.230.018	99,82
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	332.525.000	331.700.000	99,75
Program Pengendalian Penduduk	100	2.175.329.800	2.138.403.724	98,3
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	1.193.515.550	1.106.195.695	92,68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	6.654.333.578	5.143.957.188	77,3
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	2.101.774.200	1.664.085.609	79,18
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	228.319.650	146.939.084	64,36
Program Perlindungan Khusus Anak	75	347.747.400	187.018.503	53,78
Program Perlindungan Perempuan	100	162.143.000	67.964.260	41,92
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100	288.226.025	178.520.750	61,94

1.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD.

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Tingkat Kemiskinan	5,03	5,430	107,366	3,720	64,785
Indeks Pembangunan Manusia	74,26	73,800	100,623	76,290	97,339

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan performa yang melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan untuk tahun 2025 tersebut. Tingkat Kemiskinan berhasil ditekan hingga angka 5,03, yang berarti lebih baik dari target RPJMD 2025 sebesar 5,430, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,366%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencatatkan realisasi sebesar 74,26, melampaui target tahun 2025 yang dipatok pada angka 73,800 dengan persentase capaian sebesar 100,623%. Hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten HST pada tahun berjalan telah melampaui ekspektasi perencanaan tahunan.

Meskipun capaian tahun 2025 sangat memuaskan terhadap target tahunannya, analisis terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten HST Tahun 2029, menunjukkan adanya tantangan yang lebih besar di masa depan. Realisasi Tingkat Kemiskinan tahun 2025 (5,03) saat ini baru memenuhi 64,785% dari target ambisius pada tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 3,720. Sementara itu, realisasi IPM tahun 2025 (74,26) telah mencapai 97,339% dari target tahun 2029 yang berada di angka 76,290. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan akselerasi yang signifikan, khususnya dalam program penurunan kemiskinan, agar gap sebesar kurang lebih 1,31 poin dapat teratasi pada tahun mendatang demi memenuhi target akhir periode RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tahun 2029.

1.1.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tingkat Kemiskinan	6,18	5,92	5,84	5,81	5.03

Indeks Pembangunan Manusia	69,05	69,70	72,32	73,33	74,26





Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten jika dibandingkan dengan periode 2021-2024 terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang dievaluasi, yaitu indikator Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada indikator Tingkat Kemiskinan, Pemkab HST berhasil mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir dengan angka 5,03. Pencapaian ini merupakan lompatan besar dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 6,18, serta menunjukkan percepatan penurunan yang jauh lebih tajam di tahun 2025 dibandingkan progres tahunan sebelumnya yang hanya berkisar di angka 0,03 hingga 0,26 poin. Hal ini menandakan

bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 telah mencapai puncaknya dengan melampaui target RPJMD 2025 yang ditetapkan sebesar 5,430 (capaian 107,366%).

Sejalan dengan penurunan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HST juga terus mengalami pertumbuhan positif yang berkelanjutan. Realisasi IPM tahun 2025 sebesar 74,26 mencerminkan kenaikan bertahap dari tahun 2021 (69,05), 2022 (69,70), 2023 (72,32), hingga 2024 (73,33). Peningkatan IPM yang stabil selama lima tahun ini membuktikan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat secara terukur. Dengan realisasi 2025 yang melampaui target RPJMD (73,800), Pemkab HST telah berhasil menjaga momentum pembangunan manusia yang inklusif dan progresif dibandingkan capaian pada awal periode perencanaan.

1.2 Sasaran 2, Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya

1.2.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya	Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	0,00	0,00	100
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,75	56,40	99,38
	Indeks Pembangunan Keluarga	64,01	66,10	103,27

Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten HST tahun 2025 dalam mendukung sasaran strategis "Meningkatnya kehidupan masyarakat adaptif, religius dan berbudaya" menunjukkan hasil yang sangat positif dengan dua dari tiga indikator berhasil melampaui target. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga mencatatkan performa terbaik dengan realisasi sebesar 66,10, melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,01 sehingga mencapai persentase capaian 103,27%. Keberhasilan yang paling krusial terlihat pada indikator stabilitas sosial, di mana Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA berhasil ditekan hingga 0,00. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menjaga kerukunan dan kohesi sosial di

tengah masyarakat yang religius dan berbudaya, sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai dan direncanakan dalam RPJMD Kabupaten HST.

Di sisi lain, indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan realisasi sebesar 56,40 dari target yang dipatok pada angka 56,75. Meskipun belum mencapai target 100%, capaian sebesar 99,38% ini dikategorikan sangat mendekati target dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelestarian nilai budaya daerah. Secara keseluruhan, integrasi antara pembangunan keluarga yang berkualitas dan terjaganya keharmonisan sosial tanpa konflik SARA menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat HST yang adaptif. Fokus di masa mendatang hanya perlu diarahkan pada penguatan aspek kebudayaan agar seluruh indikator dalam sasaran strategis ini dapat terpenuhi sepenuhnya secara optimal.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kehidupan masyarakat adaftif, religius dan berbudaya”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	389.884.250	105.787.025	27,13
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	97,41	3.206.797.600	3.074.863.359	95,89
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	87,05	334.515.600	169.689.114	50,73
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	401.682.600	271.605.590	67,62

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	811.432.000	785.316.420	96,78
Program Pembinaan Perpustakaan	100	5.666.255.699	4.496.501.865	79,36
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75	191.826.900	133.377.874	69,53
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,61	298.652.087.109	284.209.822.735	95,16
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100	200.395.850	190.384.000	95
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	83	326.048.500	239.229.988	73,37
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Pendidikan	100	123.513.947.638	116.181.545.267	94,06
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	15.665.961.920	13.664.805.367	87
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	562.902.110	378.635.140	67
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	225.200.000	201.585.000	90
Program Pengembangan Kebudayaan	100	1.254.429.593	1.252.230.018	99,82
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	332.525.000	331.700.000	99,75
Program Pengendalian Penduduk	100	2.175.329.800	2.138.403.724	98,3
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	1.193.515.550	1.106.195.695	92,68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	6.654.333.578	5.143.957.188	77,3
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	2.101.774.200	1.664.085.609	79,18
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	228.319.650	146.939.084	64,36

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Perlindungan Khusus Anak	75	347.747.400	187.018.503	53,78
Program Perlindungan Perempuan	100	162.143.000	67.964.260	41,92
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100	288.226.025	178.520.750	61,94

1.2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	0,00	0,000	100,000	0,000	100,000
Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,40	56,750	99,383	57,570	97,970
Indeks Pembangunan Keluarga	66,10	64,010	103,265	70,010	94,415

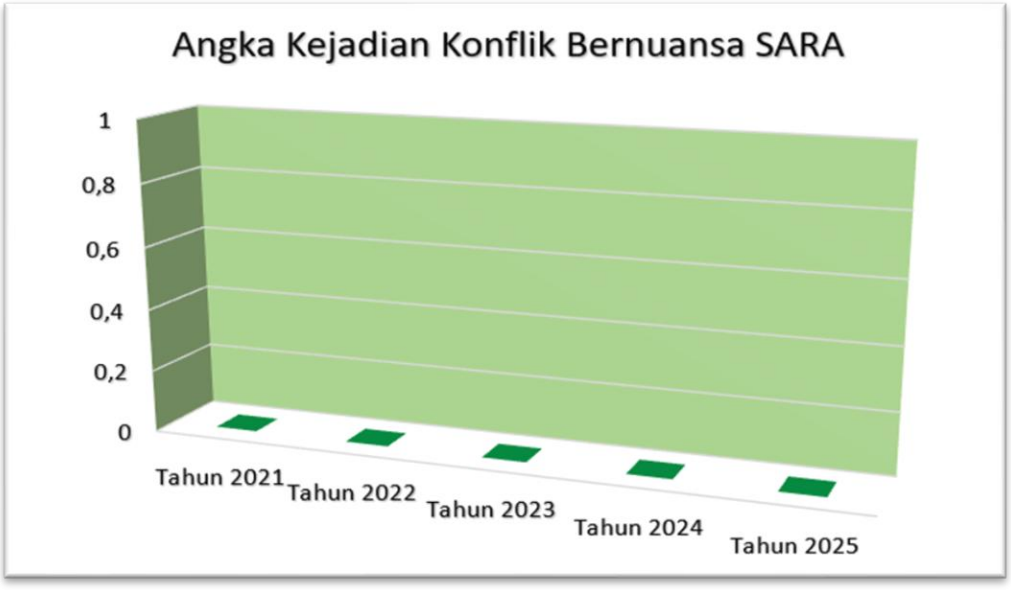
Evaluasi capaian kinerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana seluruh indikator berhasil mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025. Indikator Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA mencatatkan capaian sempurna sebesar 100% dengan realisasi nol kasus, yang mencerminkan stabilitas keamanan dan harmoni sosial yang terjaga dengan baik. Sementara itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan terealisasi sebesar 56,40 dari target 56,750 (99,383%), dan Indeks Pembangunan Keluarga mencatatkan prestasi gemilang melampaui target dengan realisasi 66,10 dari target 64,010, atau setara dengan 103,265%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa program pembangunan sosial-budaya di Kabupaten HST pada tahun berjalan telah dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

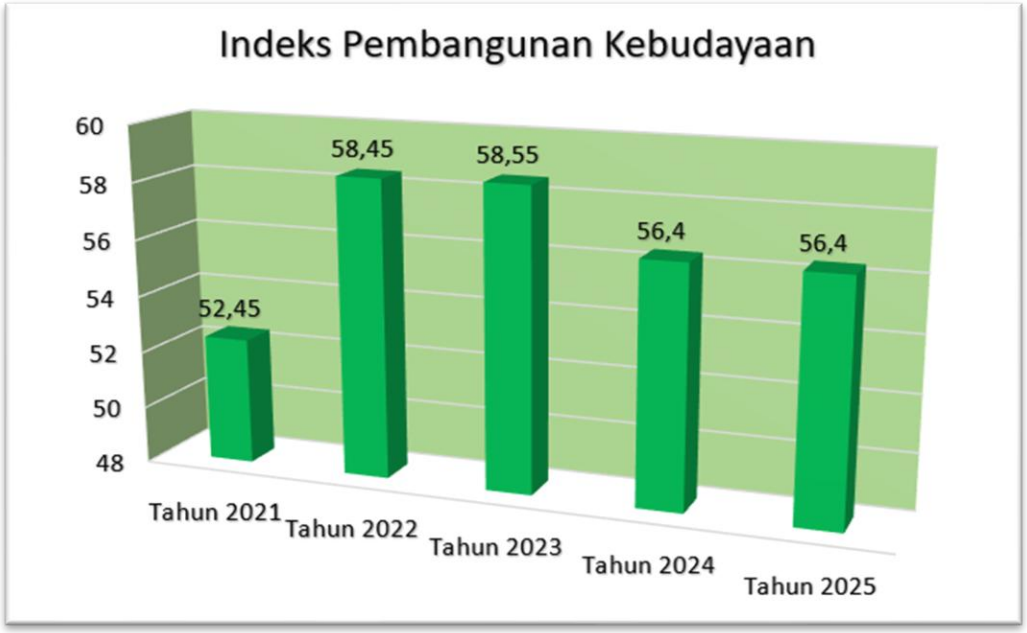
Meskipun capaian tahun 2025 sudah sangat baik, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan akselerasi untuk memenuhi target RPJMD tahun 2029 yang lebih progresif. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, Indeks Pembangunan Kebudayaan saat ini berada pada posisi 97,970% dari target 57,570 pada tahun 2029, sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga berada pada posisi 94,415% dari target 70,010 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja yang berkelanjutan, terutama dalam pembangunan keluarga

yang membutuhkan kenaikan kinerja dalam satu tahun ke depan untuk bisa mencapai atau melampaui target RPJMD tahun 2029. Di sisi lain, pemeliharaan angka nol pada konflik SARA tetap menjadi prioritas mutlak guna menjaga persentase capaian kinerja tetap 100% di tahun mendatang, sekaligus memastikan fondasi sosial, kerukunan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten HST bisa tetap kokoh untuk mendukung tercapainya seluruh target pembangunan daerah yang telah direncanakan.

1.2.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	0	0
Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,45	58,45	58,55	56,40	56,40
Indeks Pembangunan Keluarga		56,43	65,70	62,90	66,10







Mempertimbangkan hasil analisis atas data realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dibandingkan dengan tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya stabilitas capaian yang luar biasa pada sektor atau indikator keamanan di masyarakat, namun mengalami fluktuasi capaian pada sektor pembangunan manusia. Angka Kejadian Konflik Bernuansa SARA berhasil dipertahankan pada angka nol secara konsisten selama lima tahun

berturut-turut (2021–2025). Sementara itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan tren yang cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir, di mana angka realisasi tahun 2025 sebesar 56,40 sama persis dengan realisasi tahun 2024, dan masih berada di bawah pencapaian tertinggi yang pernah diraih pada tahun 2023 sebesar 58,55. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi baru untuk mendorong kembali pertumbuhan di sektor kebudayaan agar tidak tertahan pada level yang sama.

Berbeda dengan sektor kebudayaan, Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan performa yang sangat progresif dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2025. Setelah sempat mengalami penurunan capaian kinerja dari angka 65,70 di tahun 2023 menjadi 62,90 di tahun 2024, realisasi capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga ini berhasil bangkit secara signifikan ke angka 66,10 pada tahun 2025. Pencapaian tahun 2025 ini merupakan realisasi terbaik sejak data mulai tercatat di tahun 2022. Keberhasilan mengembalikan tren positif pada sektor pembangunan keluarga ini menunjukkan bahwa kebijakan penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten HST telah kembali ke jalur yang tepat dan efektif dalam merespons penurunan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

1.3 Sasaran 3, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional & "Ber Akhlak"

1.3.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	72,00	71,49	99,29

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 untuk mendukung sasaran strategis "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan" menunjukkan performa yang cukup bagus, namun belum mencapai target sepenuhnya.

Hal ini tercermin dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang memperoleh realisasi angka sebesar 71,49 dari target yang ditetapkan untuk dapat dicapai di tahun 2025, yaitu 72,00, sehingga persentase capaian kinerjanya hanya menyentuh angka 99,29% dari target tahun 2025. Meskipun secara statistik angka ini menunjukkan

efektivitas program yang hampir sempurna dalam mendukung visi RPJMD, namun dengan adanya selisih realisasi sebesar 0,51 poin kurang dari target rencana, kondisi ini menunjukkan akan perlunya dilakukan analisis dan perbaikan kinerja yang lebih lanjut lagi ke depannya, guna mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi agar target ideal di tahun mendatang dapat terpenuhi 100% atau bahkan melebihi dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh seluruh urusan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Kepegawaian Daerah	100	4.220.860.250	3.238.797.555	76,73
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.148.253.100	903.769.635	78,71
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pencatatan Sipil	100	158.423.000	154.631.100	97,61
Program Pendaftaran Penduduk	100	353.165.000	312.853.107	88,59
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.349.887.600	897.906.382	66,52

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100	2.399.886.744	1.522.271.398	63,43
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	281.787.361.072	218.630.097.320	77,59
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	5.115.193.315	4.246.140.320	83,01
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	258.108.735	244.992.092	93,61
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.239.239.100	897.438.104	74,42
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	98,63	1.778.762.000	1.662.195.222	93,45

1.3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	71,49	72,000	99,292	80,500	88,807

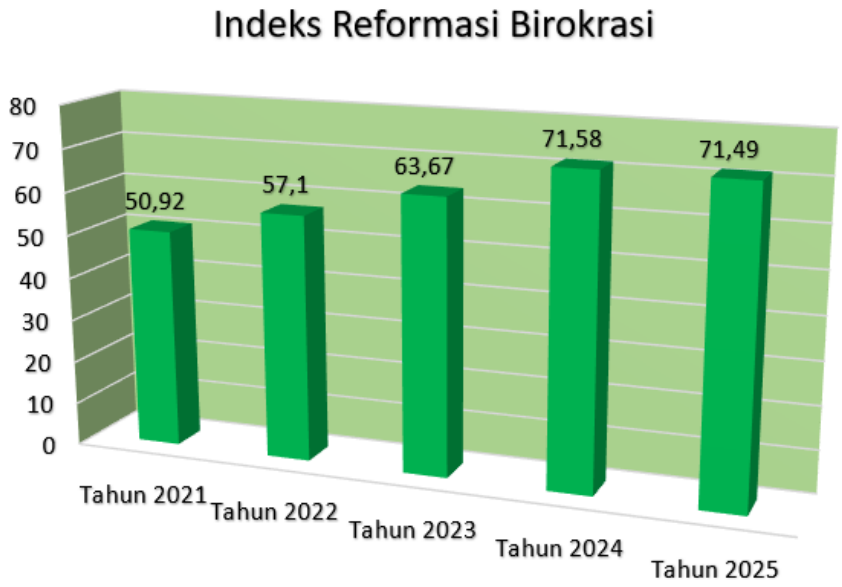
Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tersaji pada tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten HST pada tahun 2025 telah mencapai angka 71,49. Jika dibandingkan dengan Target RPJMD HST pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 72,00, maka persentase capaian kinerja saat ini berada pada angka yang cukup memuaskan yaitu 99,292%, Hal ini mengindikasikan bahwa target tahun berjalan (tahun 2025) hampir terpenuhi sepenuhnya. Namun demikian, apabila angka realisasi tahun 2025 tersebut diproyeksikan terhadap Target akhir periode RPJMD di tahun 2029 yang melonjak ke angka 80,50, maka tingkat

capaiannya baru menyentuh 88,807%. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar 9,01 poin yang harus dikejar oleh Pemerintah Kabupaten HST untuk dapat memenuhi target capaian indikator pada tahun akhir periode RPJMD (tahun 2029), sehingga diperlukan akselerasi program kerja yang lebih masif guna menutup celah kinerja tersebut sebelum memasuki akhir periode RPJMD, khususnya yang terkait implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.3.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Indeks Reformasi Birokrasi	50,92	57,10	63,67	71,58	71,49

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,49. Jika dianalisis secara historis, tren kinerja ini menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2021 (50,92), tahun 2022 (57,10), hingga tahun 2023 (63,67). Namun, terdapat dinamika menarik di mana realisasi tahun 2025 sedikit mengalami penurunan tipis sebesar 0,09 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sempat menyentuh angka 71,58. Meskipun mengalami stagnasi minor di tahun terakhir, secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten HST dinilai telah mampu dan berhasil meningkatkan kualitas birokrasinya secara signifikan dalam lima tahun terakhir dengan total kenaikan mencapai 20,57 poin sejak awal periode evaluasi (tahun 2021).



1.4 Sasaran 4, Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan

1.4.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,61	101,32
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	3,50	100,00
	Indeks Pemerintah Digital	-	-	-

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dalam mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan" secara umum menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat terlihat pada capaian indikator Indeks Pelayanan Publik yang berhasil meraih realisasi sebesar 4,61 dari target 4,55 atau setara dengan capaian 101,32%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya standarisasi dan inovasi layanan masyarakat telah berjalan efektif di Kabupaten HST. Sejalan dengan itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menunjukkan performa yang stabil dengan realisasi 3,50, tepat memenuhi target 100%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah

daerah dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam tata kelola birokrasi guna menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan.

Meskipun dua indikator utama telah mencapai target, terdapat catatan penting pada indikator Indeks Pemerintah Digital yang dalam tabel tersebut masih belum menunjukkan nilai realisasi atau masih nihil data. Namun demikian, secara keseluruhan, keberhasilan melampaui target pada sektor pelayanan publik menjadi modal krusial bagi Pemkab Hulu Sungai Tengah untuk terus mendorong akselerasi transformasi digital di lingkup daerah. Evaluasi ke depan akan perlu difokuskan pada sinkronisasi seluruh indikator agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada pemenuhan aspek administratif SPBE, tetapi juga harus dapat berdampak langsung pada kecepatan dan kemudahan akses layanan bagi seluruh masyarakat di Bumi Murakata, termasuk pula dalam aspek penerapan digitalisasi di lingkup pemerintahan.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh seluruh urusan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Kepegawaian Daerah	100	4.220.860.250	3.238.797.555	76,73
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.148.253.100	903.769.635	78,71
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pencatatan Sipil	100	158.423.000	154.631.100	97,61
Program Pendaftaran Penduduk	100	353.165.000	312.853.107	88,59
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.349.887.600	897.906.382	66,52
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100	2.399.886.744	1.522.271.398	63,43
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	281.787.361.072	218.630.097.320	77,59
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	5.115.193.315	4.246.140.320	83,01
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	258.108.735	244.992.092	93,61
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.239.239.100	897.438.104	74,42

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93,63	1.778.762.000	1.662.195.222	93,45

1.4.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

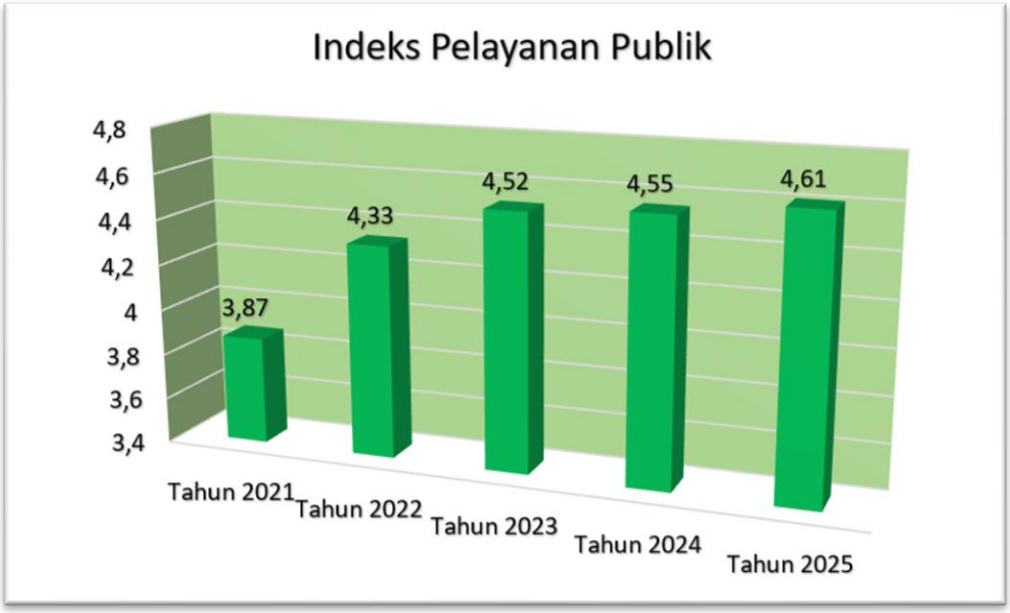
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik	4,61	4,550	101,319	4,750	97,053
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,48	3,500	99,430	-	-
Indeks Pemerintah Digital	-	-	-	1,900	-

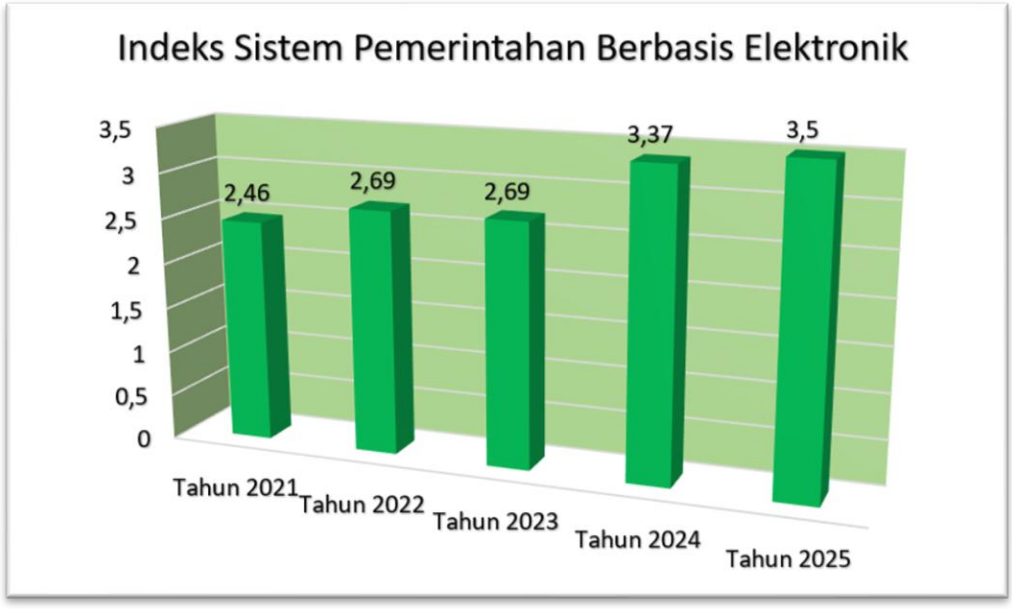
Berdasarkan data tabel pada tersebut diatas, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan sangat kompetitif terhadap target perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Indeks Pelayanan Publik menjadi indikator unggulan dengan realisasi sebesar 4,61, yang secara efektif melampaui target RPJMD 2025 (101,319%) dan telah mencapai 97,053% dari target jangka panjang tahun 2029, menandakan kesiapan infrastruktur layanan yang sudah mendekati standar akhir periode. Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencatatkan realisasi 3,48 atau mencapai 99,430% dari target 2025, sebuah angka yang menunjukkan performa yang stabil dan hampir memenuhi ekspektasi tahun berjalan meskipun terdapat kekosongan target pada indikator Indeks Pemerintah Digital untuk periode 2025. Secara keseluruhan, pemerintah daerah berhasil menjaga konsistensi kualitas layanan publik di atas target operasionalnya, namun tetap memerlukan

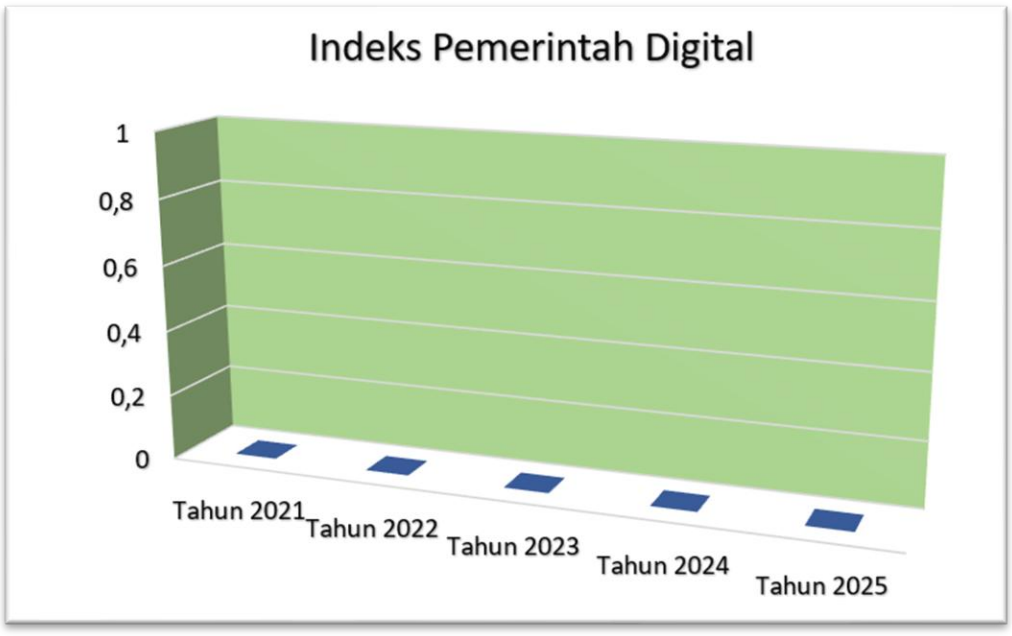
akselerasi strategis pada transformasi digital guna memenuhi target baru yang akan muncul pada tahun 2029.

1.4.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Indeks Pelayanan Publik	3,87	4,33	4,52	4,55	4,61
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,46	2,69	2,69	3,37	3,50
Indeks Pemerintah Digital	0	0	0	0	0







Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten HST pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten jika dibandingkan dengan pencapaian selama periode 2021–2024. Indeks Pelayanan Publik mencatatkan kenaikan berkelanjutan dari angka 3,87 pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di angka 4,61 pada tahun 2025. Capaian tahun 2025 ini tidak hanya melampaui realisasi tahun sebelumnya (4,55), tetapi juga berhasil melampaui target RPJMD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,550 dengan persentase capaian 101,319%.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten HST mengalami eskalasi kualitas yang terjaga dalam lima tahun terakhir.

Sinergi positif juga terlihat pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menunjukkan lonjakan signifikan sejak tahun 2021. Realisasi SPBE yang bermula di angka 2,46 pada 2021 merangkak naik secara bertahap dan melompat tajam ke angka 3,37 di tahun 2024, hingga mencapai 3,50 pada tahun 2025. Angka realisasi 3,50 ini telah memenuhi target RPJMD tahun 2025 secara sempurna (100%). Meskipun demikian, terdapat catatan pada Indeks Pemerintah Digital yang masih stagnan di angka 0 (nihil data) dari tahun 2021 hingga 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa meski tata kelola elektronik (SPBE) sudah mapan, implementasi spesifik pada pilar pemerintah digital merupakan tantangan baru yang baru akan diakselerasi pada tahun 2026 dengan target sebesar 1,900.

1.5 Sasaran 5, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan

1.5.1 Realisasi Tahun 2005 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,60	3,50	97,22
	Nilai SAKIP	71,50	70,02	97,93
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00

Pemerintah Kabupaten HST dalam upaya mendukung pencapaian Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan" di tahun 2025, menunjukkan performa yang positif dan konsisten ditinjau terhadap realisasi kinerja pada seluruh indikator kinerjanya. Keberhasilan paling signifikan terlihat pada indikator Opini BPK yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan realisasi 100% dari target awal. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP menunjukkan performa yang solid dengan capaian 97,93% (realisasi 70,02 dari target 71,50), yang mengindikasikan bahwa sistem integrasi antara perencanaan,

penganggaran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST telah berjalan dengan efektif dan mendekati target ideal yang telah ditetapkan.

Secara komprehensif, meskipun terdapat selisih tipis angka realisasi dari target awal pada beberapa indikator, namun efektivitas pencapaian kinerja-nya dinilai masih tetap berada pada kategori yang tinggi. Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD) mencatatkan realisasi sebesar 3,50 dari target 3,60, atau mencapai 97,22%. Walaupun secara angka belum menyentuh target absolut, hasil ini cukup menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan daerah masih tetap terjaga pada standar yang kompetitif. Tingginya persentase capaian pada ketiga indikator tersebut membuktikan bahwa strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD HST telah mampu diimplementasikan secara terukur, sehingga mampu memperkuat fondasi akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan daerah yang kredibel bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh seluruh urusan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Kepegawaian Daerah	100	4.220.860.250	3.238.797.555	76,73
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.148.253.100	903.769.635	78,71

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pencatatan Sipil	100	158.423.000	154.631.100	97,61
Program Pendaftaran Penduduk	100	353.165.000	312.853.107	88,59
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.349.887.600	897.906.382	66,52
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100	2.399.886.744	1.522.271.398	63,43
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	281.787.361.072	218.630.097.320	77,59
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	5.115.193.315	4.246.140.320	83,01
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	258.108.735	244.992.092	93,61
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.239.239.100	897.438.104	74,42
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumusan Kebijakan,	93,63	1.778.762.000	1.662.195.222	93,45

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Pendampingan Dan Asistensi				

1.5.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	2,93	3,600	81,32	4,10	71,402
Nilai SAKIP	71,06	71,500	99,38	80,50	88,273
Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	100

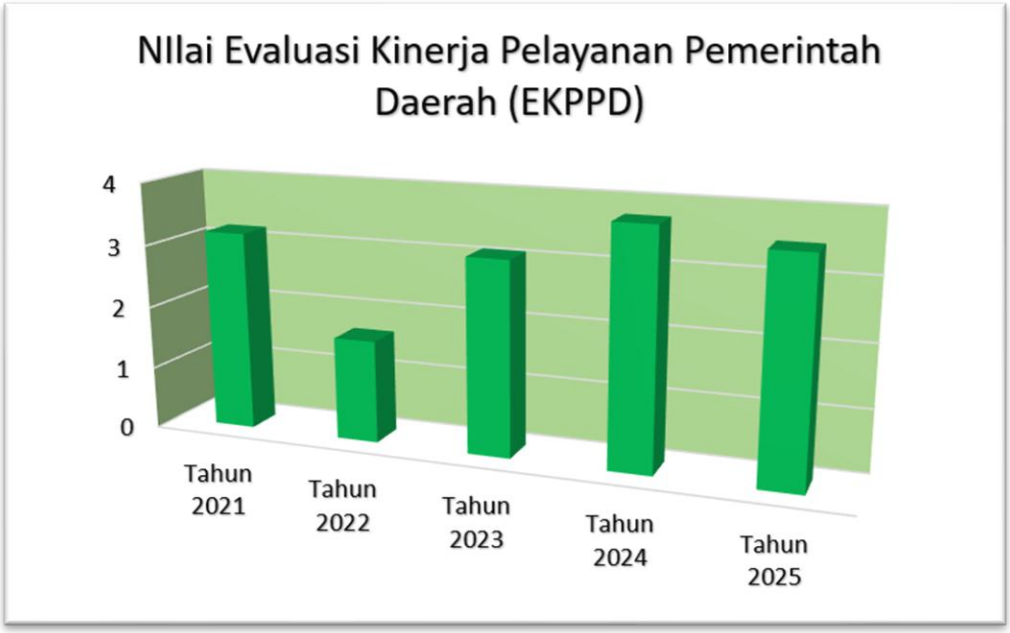
Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten HST pada tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang tinggi terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator Opini BPK, Pemkab HST berhasil mencapai target 100% dengan mempertahankan predikat WTP, baik terhadap target tahun 2025 maupun proyeksi tahun 2026. Sementara itu, untuk indikator Nilai SAKIP, realisasi sebesar 71,06 telah mencapai 99,38% dari target RPJMD tahun 2025 (71,50). Sedangkan pada Nilai EKPPD dengan angka realisasi 2,93 pada tahun 2025 yang mencatatkan tingkat capaian sebesar 81,32% terhadap target tahun berjalan. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2025, tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja daerah secara umum telah berjalan sesuai jalur dan hampir memenuhi seluruh ekspektasi target tahunan.

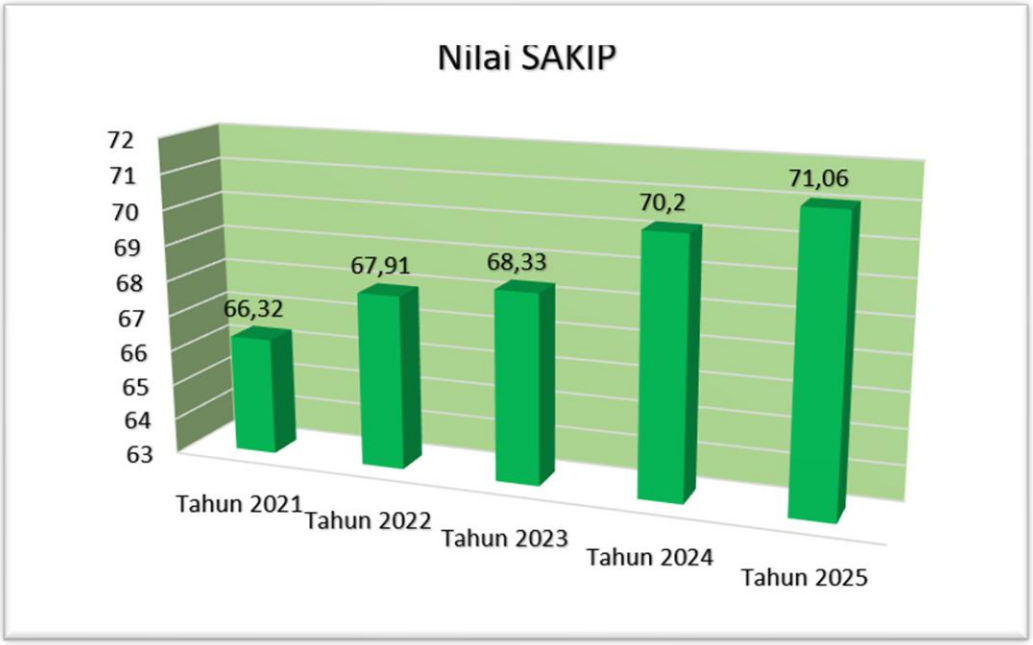
Namun, analisis perbandingan terhadap Target Akhir RPJMD tahun 2029 memberikan gambaran mengenai tantangan yang harus dihadapi pada tahun mendatang. Meskipun realisasi tahun 2025 sudah sangat baik, terdapat selisih (gap) yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target tahun 2029, di mana capaian Nilai EKPPD baru berada di angka 71,402% dari target 4,10 pada tahun 2029, dan Nilai SAKIP berada di angka 88,273% dari target 80,50 pada akhir periode RPJMD di tahun 2029. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai target akhir periode RPJMD, Pemkab HST perlu melakukan akselerasi peningkatan

kualitas pelayanan publik dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja secara lebih progresif. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menutup celah pada kedua indikator tersebut agar konsistensi kinerja tetap terjaga hingga tahun 2026.

1.5.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
NIlai Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,19	1,64	3,0887	3,75	2,93
Nilai SAKIP	66,32	67,91	68,33	70,20	71.06
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP





Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten HST pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif pada indikator tata kelola dan akuntabilitas. Nilai SAKIP mencatatkan kenaikan berkelanjutan setiap tahunnya, mulai dari 66,32 pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di angka 71,06 pada tahun 2025. Peningkatan konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan sistematis dalam manajemen kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, pada indikator Opini BPK, Pemkab HST berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025). Capaian ini merupakan pemulihan yang signifikan setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan ke predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2022.

Meskipun indikator akuntabilitas keuangan dan SAKIP menunjukkan tren penguatan, indikator Nilai EKPPD menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian khusus. Realisasi EKPPD tahun 2025 sebesar 3,50 memang menunjukkan pemulihan yang luar biasa jika dibandingkan dengan titik terendah pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1,64. Namun, angka tahun 2025 ini justru mengalami sedikit penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sempat menyentuh angka 3,75. Penurunan tipis ini menyebabkan capaian terhadap target RPJMD tahun 2025 belum mencapai angka 100%, melainkan tertahan di level 97,222%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada aspek pelayanan, namun tingkat performa kumulatif Pemkab HST pada tahun 2025 dapat

disimpulkan masih tetap berada pada level yang jauh lebih baik dan stabil dibandingkan periode awal tahun 2021-2022.

1.6 Sasaran 6, Meningkatnya integritas pemerintah daerah

1.6.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya integritas pemerintah daerah	Nilai SPIP	3,164	2,71	85,65
	Indeks Manajemen Risiko	3,045	2,66	87,36
	Nilai Survei Penilaian Integritas	71,00	71,76	101,07

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel tersebut diatas, dalam upaya untuk mendukung sasaran strategis "Meningkatnya integritas pemerintah daerah" pada tahun 2025 dii Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), terlihat adanya ketimpangan capaian antar indikator kinerja. Capaian tertinggi diraih oleh Nilai Survei Penilaian Integritas yang berhasil melampaui target pada tahun 2025 sebesar 101,07%, dengan realisasi angka 71,76 dari target 71,00. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa persepsi dan budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST sudah berjalan sangat baik dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam RPJMD HST.

Namun demikian, hasil cukup kontras terlihat pada dua indikator lainnya, yaitu Nilai SPIP dan Indeks Manajemen Risiko, yang keduanya hanya mencatatkan capaian sebesar 85,65% hingga 87,36%. Secara faktual, pada tahun 2025 Nilai SPIP baru mencapai 2,71 dari target 3,164, sementara Indeks Manajemen Risiko mencapai 2,66 dari target 3,045. Rendahnya capaian pada aspek sistem pengendalian internal dan manajemen risiko ini menunjukkan bahwa meskipun integritas secara moralitas dinilai tinggi, namun secara tata kelola sistematis dan mitigasi risiko operasional, Pemerintah Kabupaten Hulu SungaiTengah masih memerlukan penguatan yang signifikan untuk dapat mencapai standar matuiritas yang diharapkan.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya integritas pemerintah daerah”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan"; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh seluruh urusan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Kepegawaian Daerah	100	4.220.860.250	3.238.797.555	76,73
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.148.253.100	903.769.635	78,71
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pencatatan Sipil	100	158.423.000	154.631.100	97,61
Program Pendaftaran Penduduk	100	353.165.000	312.853.107	88,59
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	1.349.887.600	897.906.382	66,52
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100	2.399.886.744	1.522.271.398	63,43

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	281.787.361.072	218.630.097.320	77,59
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	5.115.193.315	4.246.140.320	83,01
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	258.108.735	244.992.092	93,61
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.239.239.100	897.438.104	74,42
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93,63	1.778.762.000	1.662.195.222	93,45

1.6.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Nilai SPIP	2,71	3,164	85,651	3,68	73,641
Indeks Manajemen Risiko	2,66	3,045	87,356	3,459	76,901
Nilai Survei Penilaian Integritas	71,76	71,000	101,070	75,000	95,680

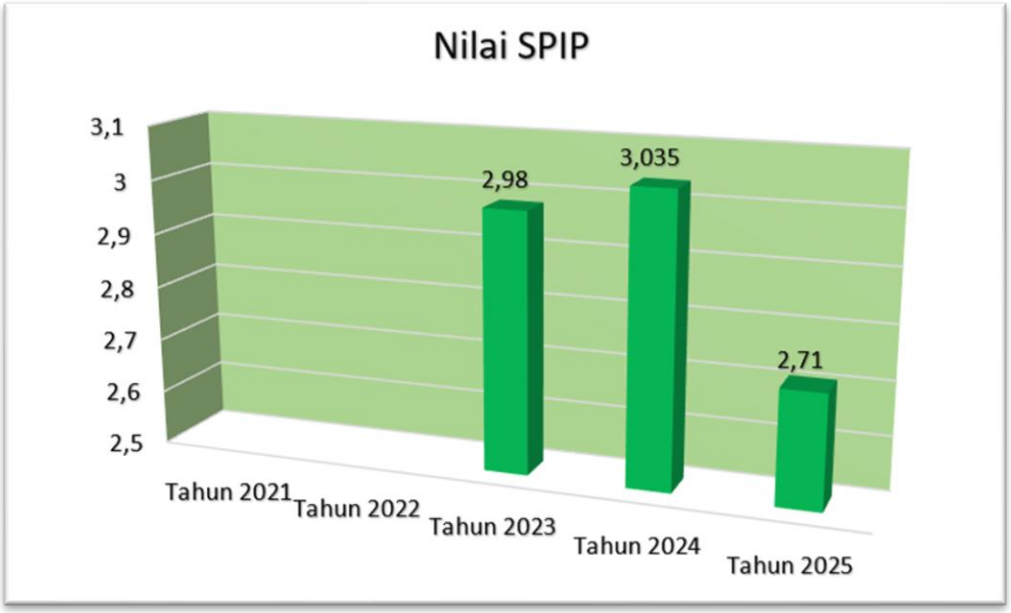
Berdasarkan data pada Tabel tersebut diatas, diketahui bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang variatif terhadap target RPJMD HST yang sudah ditetapkan sebelumnya. Indikator Nilai Survei Penilaian Integritas menjadi satu-satunya indikator yang berhasil melampaui target tahun 2025 dengan realisasi sebesar 71,76 dari target

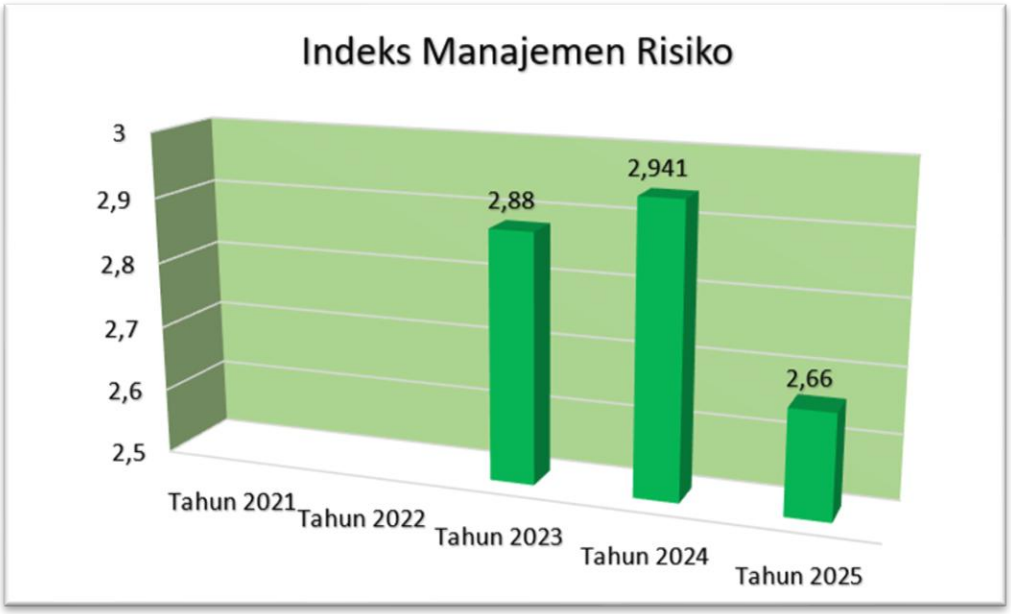
71,000 (capaian 101,070%). Sebaliknya, Nilai SPIP dan Indeks Manajemen Risiko belum mencapai target tahun berjalan, dengan masing-masing realisasi sebesar 2,71 (capaian 85,651%) dan 2,66 (capaian 87,356%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek integritas secara umum sudah sangat baik, penguatan pada sistem pengendalian internal dan tata kelola risiko masih memerlukan akselerasi lebih lanjut agar selaras dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

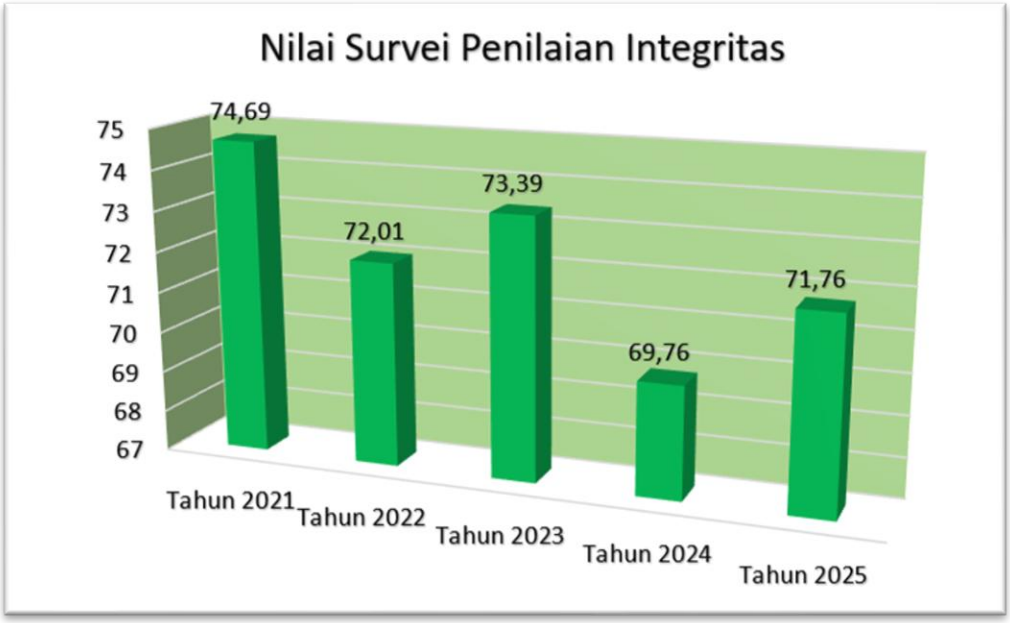
Analisis perbandingan terhadap target akhir periode RPJMD HST tahun 2029 menunjukkan adanya tantangan yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten HST di tahun mendatang. Realisasi tahun 2025 untuk semua indikator masih berada di bawah target yang dipatok untuk tahun 2029, di mana Nilai SPIP baru mencapai 73,641% dari target 2029 (3,68) dan Indeks Manajemen Risiko baru mencapai 76,901% dari target 2029 (3,459). Bahkan, Nilai Survei Penilaian Integritas yang sudah melampaui target 2025 pun baru mencatatkan angka 95,680% terhadap target 2029 yang sebesar 75,00. Data ini menegaskan perlunya langkah strategis yang lebih progresif dan intensif di sisa periode perencanaan agar selisih angka capaian antara realisasi saat ini dengan target akhir tahun 2026 dapat tertutupi secara optimal.

1.6.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Nilai SPIP			2,98	3,035	2,71
Indeks Manajemen Risiko			2,88	2,941	2,66
Nilai Survei Penilaian Integritas	74,69	72,01	73,39	69,76	71,76


Nilai SPIP
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,98
3,035
2,71
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025


Indeks Manajemen Risiko
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,88
2,941
2,66
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025



Berdasarkan data yang tersaji tersebut diatas, disimpulkan bahwa realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 menunjukkan tren penurunan pada aspek tata kelola sistematis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai SPIP mengalami penurunan menjadi 2,71, padahal sebelumnya sempat mencapai angka 3,035 pada tahun 2024 dan 2,98 pada tahun 2023. Pola yang sama terjadi pada Indeks Manajemen Risiko yang merosot ke angka 2,66 di tahun 2025, setelah sebelumnya menunjukkan performa yang lebih stabil di angka 2,941 (tahun 2024) dan 2,88 (tahun 2023). Penurunan pada kedua indikator ini mengindikasikan adanya kendala dalam mempertahankan maturitas sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko di lingkungan pemerintah daerah pada periode tersebut.

Di sisi lain, Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan fluktuasi yang cenderung membaik di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah sempat menyentuh titik terendah dalam lima tahun terakhir pada tahun 2024 dengan nilai 69,76, realisasi SPI tahun 2025 berhasil meningkat kembali menjadi 71,76. Meskipun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (74,69) dan tahun 2023 (73,39), tren kenaikan di tahun 2025 memberikan sinyal positif atas upaya pemulihan budaya integritas di Pemkab HST. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemkab HST perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengembalikan performa SPIP dan Manajemen Risiko pada pemerintah daerahnya agar dapat mencapai penilaian

kinerja ke level optimal sebagaimana yang pernah dicapai oleh Pemkab HST pada tahun 2024.

1.7 Sasaran 7, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing

1.7.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	62,30	63,11	101,30
	Harapan Lama Sekolah	12,36	12,58	101,78
	Rata-rata Lama Sekolah	8,39	8,45	100,72
	Indeks SPM Pendidikan	86,74	85,87	99,00
	Usia Harapan Hidup	72,87	73,02	100,21
	Indeks Kesehatan	88,12	88,37	100,28

Berdasarkan data yang tersaji tersebut diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2025, secara umum dalam upaya mendukung sasaran strategis RPJMD HST, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diketahui telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Mayoritas indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%). Keberhasilan tertinggi dicapai oleh indikator Harapan Lama Sekolah dengan capaian 101,78% dan Indeks Pendidikan sebesar 101,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan di sektor pendidikan telah berjalan efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan minat belajar masyarakat, yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan SDM yang cerdas dan unggul.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan adanya catatan khusus pada indikator Indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pendidikan yang menjadi satu-satunya indikator dengan capaian di bawah target, yakni sebesar 99,00%. Meskipun angka ini masih masuk dalam kategori tinggi, realisasi sebesar 85,87 dari target 86,74 menunjukkan adanya hambatan teknis atau administratif dalam pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan di lapangan. Sementara itu, di sektor kesehatan, kinerja Pemkab HST terpantau stabil dan memuaskan dengan Indeks Kesehatan (100,28%) dan Usia Harapan Hidup (100,21%) yang keduanya

berhasil melampaui target. Hal ini turut menegaskan akan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas hidup dan kesejahteraan fisik masyarakatnya.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	389.884.250	105.787.025	27,13
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	97,41	3.206.797.600	3.074.863.359	95,89
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	87,05	334.515.600	169.689.114	50,73
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	401.682.600	271.605.590	67,62
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	811.432.000	785.316.420	96,78
Program Pembinaan Perpustakaan	100	5.666.255.699	4.496.501.865	79,36
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75	191.826.900	133.377.874	69,53
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,61	298.652.087.109	284.209.822.735	95,16
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100	200.395.850	190.384.000	95

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	83	326.048.500	239.229.988	73,37
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	3.984.874.913	3.659.903.581	91,84
Program Pengelolaan Pendidikan	100	123.513.947.638	116.181.545.267	94,06
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	15.665.961.920	13.664.805.367	87
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	93	562.902.110	378.635.140	67
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	225.200.000	201.585.000	90
Program Pengembangan Kebudayaan	100	1.254.429.593	1.252.230.018	99,82
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	332.525.000	331.700.000	99,75
Program Pengendalian Penduduk	100	2.175.329.800	2.138.403.724	98,3
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	1.193.515.550	1.106.195.695	92,68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	6.654.333.578	5.143.957.188	77,3
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	2.101.774.200	1.664.085.609	79,18
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	228.319.650	146.939.084	64,36
Program Perlindungan Khusus Anak	75	347.747.400	187.018.503	53,78
Program Perlindungan Perempuan	100	162.143.000	67.964.260	41,92
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100	288.226.025	178.520.750	61,94

1.7.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)

Indeks Pendidikan	63,11	62,300	101,300	63,36	99,605
Harapan Lama Sekolah	12,58	12,360	101,780	12,55	100,239
Rata-rata Lama Sekolah	8,45	8,390	100,715	8,55	98,830
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Indeks SPM Pendidikan	85,87	86,640	99,111	89,72	95,709
Usia Harapan Hidup	73,02	72,870	100,206	73,95	98,742
Indeks Kesehatan	88,37	88,120	100,284	89,92	98,276

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan yang signifikan terhadap target RPJMD HST tahun 2025. Mayoritas indikator utama berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan Harapan Lama Sekolah mencatatkan persentase capaian tertinggi sebesar 101,780% (realisasi 12,58 dari target 12,360) dan Indeks Pendidikan sebesar 101,300%. Sektor kesehatan juga menunjukkan performa solid dengan Indeks Kesehatan dan Usia Harapan Hidup yang keduanya melampaui angka 100% dari target tahun berjalan. Satu-satunya catatan efisiensi berada pada Indeks SPM Pendidikan yang terealisasi sebesar 85,87 dari target 86,640, atau setara dengan capaian 99,111%.

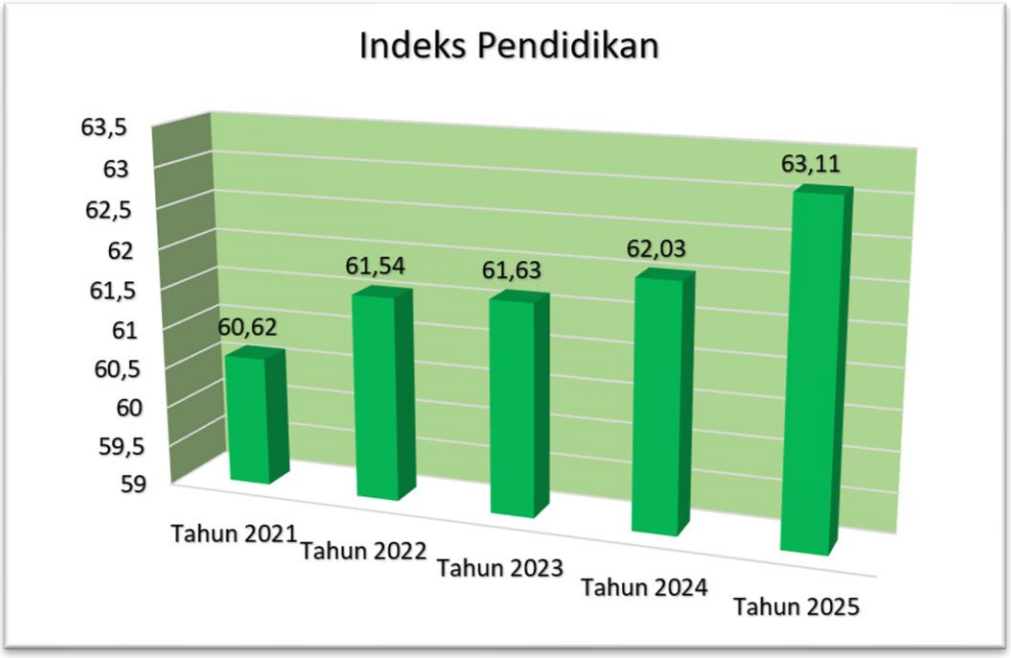
Meskipun performa tahun 2025 sangat memuaskan terhadap target tahunan tersebut, tantangan besar terlihat saat realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan Target akhir periode RPJMD tahun 2029. Jika menggunakan standar target tahun berikutnya, seluruh indikator saat ini masih berada di bawah angka 100%, dengan rata-rata capaian di kisaran 97% hingga 99%. Kesenjangan paling lebar terlihat pada Indeks SPM Pendidikan yang baru mencapai 95,709% dari target 2029, serta Indeks Kesehatan di angka 98,276%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Pemkab HST telah berada di jalur yang tepat, tetap diperlukan akselerasi program dan peningkatan alokasi sumber daya pada tahun mendatang untuk menutup selisih target agar sasaran strategis jangka menengah dapat tercapai sepenuhnya pada akhir periode RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

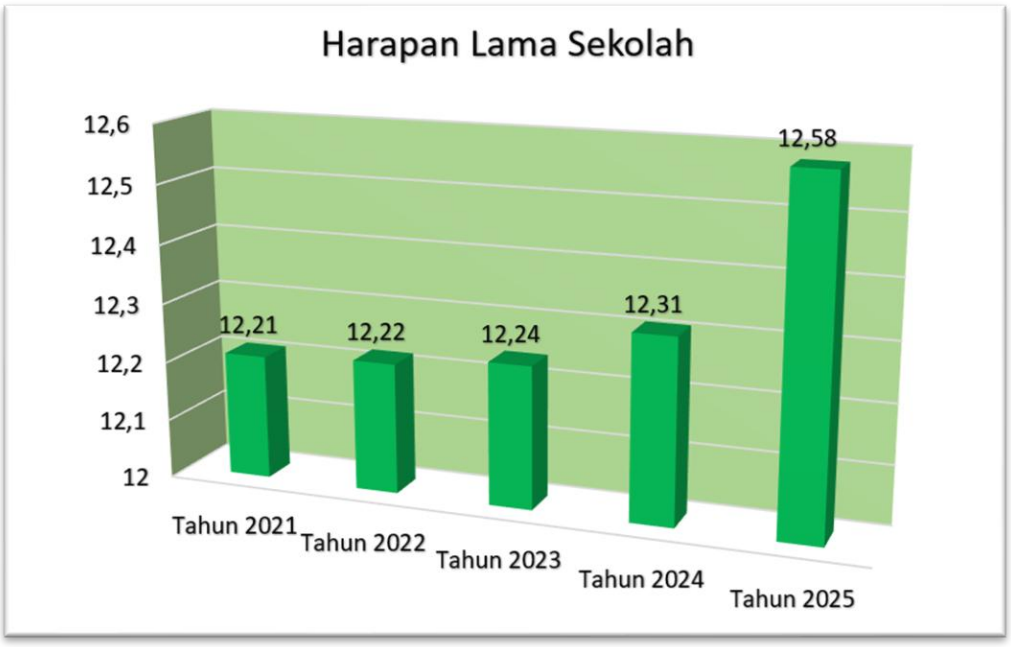
1.7.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

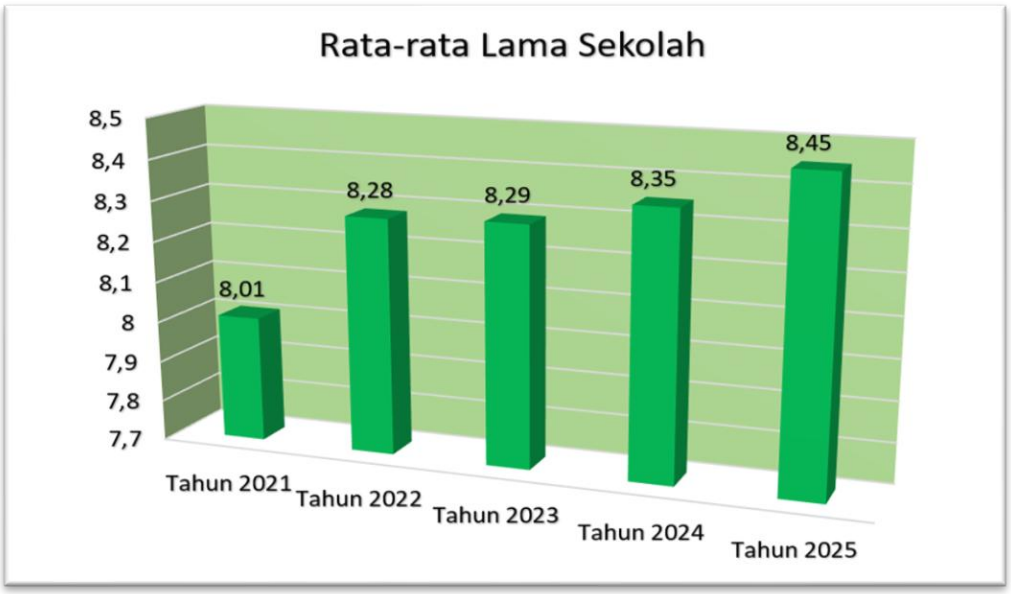
Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Indeks Pendidikan	60,62	61,54	61,63	62,03	63,11
Harapan Lama Sekolah	12,21	12,22	12,24	12,31	12,58
Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,28	8,29	8,35	8,45
Indeks SPM Pendidikan		67,86	61,61	84,56	85,87
Usia Harapan Hidup	66,2	66,54	72,33	72,60	73,02
Indeks Kesehatan	77	77,57	87,21	87,67	88,37

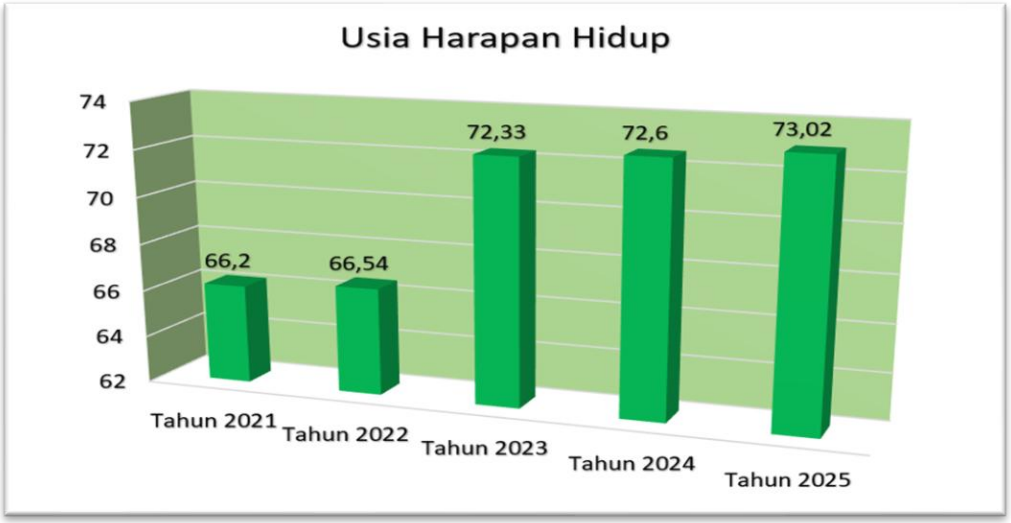
Berdasarkan data historis capaian kinerja sebagaimana tersaji pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indikator Indeks Pendidikan mengalami peningkatan bertahap dari 60,62 pada tahun 2021 hingga mencapai titik tertinggi sebesar 63,11 di tahun 2025. Lonjakan signifikan juga terlihat pada sektor kesehatan, di mana Usia Harapan Hidup meningkat dari 66,2 tahun pada 2021 menjadi 73,02 tahun pada 2025, serta Indeks Kesehatan yang tumbuh dari angka 77 menjadi 88,37 dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program pembangunan manusia di Kabupaten HST mengalami akselerasi yang berkelanjutan selama lima tahun terakhir.

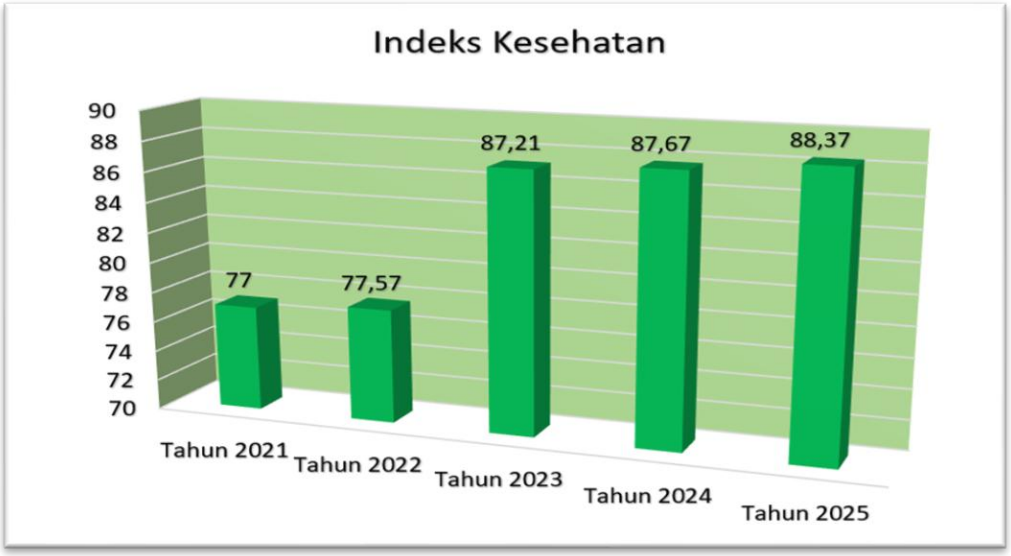
Di sisi lain, analisis terhadap Indeks SPM Pendidikan menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, di mana nilai realisasi sempat turun dari 67,86 pada tahun 2022 ke angka 61,61 pada 2023, sebelum akhirnya bangkit kembali secara signifikan menjadi 85,87 pada tahun 2025. Meskipun realisasi tahun 2025 ini merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, angka tersebut masih memiliki selisih tipis untuk mencapai target ideal tahun berjalan. Sementara itu, indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan stabilitas kenaikan yang presisi setiap tahunnya, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan pendidikan dasar bagi masyarakat.


Indeks Pendidikan
63,5
63
62,5
62
61,5
61
60,5
60
59,5
59
60,62
61,54
61,63
62,03
63,11
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025


Harapan Lama Sekolah
12,6
12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12
12,21
12,22
12,24
12,31
12,58
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025


Rata-rata Lama Sekolah
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
8,01
8,28
8,29
8,35
8,45
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025


Usia Harapan Hidup
74
72
70
68
66
64
62
66,2
66,54
72,33
72,6
73,02
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025


Indeks Kesehatan
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
77
77,57
87,21
87,67
88,37
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025

1.8 Sasaran 8, Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan

1.8.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	35,90	37,59	104,708
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,01	100,200
	Indeks Daya Saing Daerah	3,70	3,74	101,081

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan menunjukkan hasil yang sangat positif dengan rata-rata realisasi mendekati target yang ditetapkan. Salah satu indikator utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, berhasil sedikit melampaui target sebesar 100,20% dengan realisasi di angka 5,01 dari target 5,00. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan stimulan ekonomi di HST berjalan efektif dalam mendorong produktivitas daerah. Sedangkan pada ndikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mencatatkan capaian sebesar 104,708% dengan realisasi 37,59 yang mampu melampaui target tahun 2025 sebesar 35,90, angka ini mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang tetap stabil dan berada pada jalur pertumbuhan yang tepat sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.

Di sisi lain, aspek daya saing daerah juga menunjukkan performa yang solid melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah yang mencapai 101,081%. Dengan realisasi skor sebesar 3,74 dari target 3,70, Kabupaten HST terbukti mampu mempertahankan iklim kompetisi ekonomi yang sehat meski masih terdapat ruang tipis untuk peningkatan di masa mendatang. Secara keseluruhan, integrasi ketiga indikator ini menggambarkan bahwa sasaran strategis untuk membangun ekonomi yang berdaya saing telah memiliki fondasi yang kuat. Pemerintah daerah diharapkan terus mengoptimalkan sektor-sektor penunjang PDRB dan memperkuat inovasi daerah agar target indeks daya saing dapat terlampaui sepenuhnya pada periode evaluasi berikutnya, guna memastikan keberlanjutan ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat HST.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkesinambungan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kantrantibum, Pertanahan, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan, dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	549.619.100	369.780.944	67,28
Program Administrasi Pemerintahan Desa	99,71	2.566.778.450	2.499.104.059	97,36
Program Kawasan Permukiman	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	1.713.538.000	1.540.466.818	89,9
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemasaran Pariwisata	100	1.693.549.100	1.435.334.345	85
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	67.326.800	46.120.000	68,5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96,766	3.232.275.100	2.709.568.037	83,83
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100	604.079.400	323.859.341	53,61

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Penanggulangan Bencana Daerah	100	1.741.949.310	1.548.193.670	88,88
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	96,07	6.572.993.800	5.440.600.189	82,77
Program Penataan Bangunan Gedung	97,19	21.843.639.827	19.748.102.817	90,41
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100	282.620.000	213.722.473	75,62
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Penempatan Tenaga Kerja	100	711.058.630	647.633.300	91,08
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	499.620.800	488.311.202	97,74
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	99,78	6.167.381.000	5.757.206.931	93,35
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97,93	6.238.157.800	5.666.726.482	90,84
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	86.506.590	71.433.500	82,58
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	1.069.186.880	988.406.720	92,44
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	3.502.614.775	2.657.671.163	75,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	421.665.536	393.684.081	93,36
Program Pengelolaan Persampahan	65,95	25.612.113.260	21.085.204.131	82,33
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	5.705.000	3.675.000	64,42
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	98	44.279.565.572	15.660.616.075	35,37
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	24.700.400	23.177.400	93,83
Program Pengembangan Perumahan	100	749.050.300	347.473.333	46,39
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	99,91	2.654.900.000	2.476.382.147	93,28
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	71.869.000	46.294.376	64

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	62,73	697.435.100	383.302.808	54,96
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	40.150.000	33.430.000	83,26
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.180.678.640	726.309.932	61,52
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	765.050.000	696.438.578	91,03
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	456.682.876	423.095.238	92,65
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	4.955.947.850	3.896.929.148	79
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	8.032.065.920	7.050.657.230	87,78
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	5.985.116.000	5.546.702.661	92,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	5.692.000.278	4.933.068.933	86,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	75,88	14.666.645.688	9.847.801.735	67,14
Program Penyelenggaraan Jalan	89,99	189.328.593.604	143.160.971.078	75,62
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	17.121.157.740	16.341.941.047	95,45
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,16	5.277.171.200	1.971.523.589	37,36
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	727.061.950	439.091.398	60,39
Program Penyuluhan Pertanian	100	1.917.180.698	1.645.808.743	85,85
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.415.619.700	1.128.217.803	80
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Promosi Penanaman Modal	100	92.012.000	86.562.946	94,08
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100	44.710.000	43.237.321	96,71

1.8.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	37,59	35,900	104,708	49,75	75,558
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,01	5,000	100,200	6,50	77,077
Indeks Daya Saing Daerah	3,74	3,700	101,081	3,97	94,207

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, realisasi kinerja ekonomi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif karena seluruh indikator berhasil melampaui target RPJMD tahun berjalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mencatatkan capaian tertinggi sebesar 104,708% dengan realisasi angka 37,59, disusul oleh Indeks Daya Saing Daerah yang mencapai 101,081% (realisasi 3,74), serta Laju Pertumbuhan Ekonomi yang berada pada angka 5,01 atau mencapai 100,200%. Keberhasilan menembus ambang batas target 2025 ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemulihan dan akselerasi ekonomi di Hulu Sungai Tengah berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika pasar lokal.

Jika dikomparasikan dengan target jangka panjang RPJMD Tahun 2029, posisi capaian tahun 2025 memberikan fondasi yang optimis namun tetap memerlukan kerja keras berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah telah mendekati target akhir periode dengan capaian 94,207%, menunjukkan bahwa standar kompetisi daerah hampir memenuhi ekspektasi lima tahunan. Namun, pada sektor pertumbuhan makro, Laju Pertumbuhan Ekonomi baru mencapai 77,077% dan PDRB per Kapita berada di level 75,558% dari target 2029. Hal ini mengisyaratkan bahwa meski

target tahunan terlampaui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memiliki tantangan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan yang lebih progresif dan inklusif guna menutup selisih target sekitar 23–25 persen dalam empat tahun ke depan.

1.8.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	28,33	30,15	32,28	34,85	37,59
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,01	3,93	4,3	4,95	5,01
Indeks Daya Saing Daerah					3,74



Realisasi kinerja sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan progresif jika dibandingkan dengan periode 2021-2024. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi mencatatkan peningkatan berkelanjutan, di mana angka 5,01 pada tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui capaian tahun 2024 (4,95) dan hampir dua kali lipat dari posisi tahun 2021 yang berada di angka 3,01. Sementara itu, PDRB per Kapita di Kabupatrn HST juga menunjukkan tren positif dan menaik pada tahun terakhir; dari 28,33 di tahun 2021 menjadi 37,59 di tahun 2025. Memperhatikan realisasi PDRB per Kapita tahun 2025 menaik

dibandingkan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, secara akumulatif dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan nilai tambah ekonomi per penduduk secara signifikan selama masa perencanaan ini.

Keberhasilan mempertahankan tren kenaikan laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 100,200% dari target tahun 2025 mencerminkan efektivitas program pemulihan dan pengembangan ekonomi daerah. Penambahan indikator Indeks Daya Saing Daerah dengan realisasi 3,74 pada tahun 2025 menjadi tolok ukur baru untuk menilai kualitas pertumbuhan tersebut dalam peta kompetisi regional. Evaluasi data lintas tahun ini menunjukkan bahwa Kabupaten HST memiliki daya resiliensi ekonomi yang kuat, namun pemerintah daerah perlu mewaspadai stagnasi pada angka PDRB per Kapita antara tahun 2024 dan 2025. Hal ini menuntut adanya diversifikasi sektor ekonomi unggulan agar peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang agresif dapat berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat secara lebih tajam pada tahun-tahun mendatang.

1.9 Sasaran 9, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial

1.9.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	3,75	3,70	98,67
	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Indrustri Pengolahan	3,49	3,44	98,57
	Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	4,13	4,07	98,55
	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	6,86	6,79	98,98
	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	6,36	6,33	99,53

	Nilai Investasi	204,50	185,94	90,92

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut diatas, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 dalam mendukung sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menunjukkan hasil yang sangat positif dan stabil. Seluruh indikator laju pertumbuhan PDRB pada berbagai lapangan usaha—mulai dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, hingga Jasa—berhasil mencapai realisasi di atas 98% dari target yang ditetapkan. Sektor Jasa mencatatkan persentase capaian tertinggi sebesar 99,53%, disusul oleh sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman sebesar 98,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pemerintah daerah pada sektor-sektor riil telah berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi lokal, sehingga mampu mendekati target pertumbuhan yang direncanakan secara presisi.

Meskipun indikator sektoral menunjukkan performa yang solid, indikator Nilai Investasi mencatatkan capaian terendah yaitu sebesar 90,92% dengan realisasi angka 185,94 dari target 204,50. Walaupun angka ini masih dalam kategori baik, terdapat selisih (gap) yang lebih lebar dibandingkan indikator PDRB lainnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik arus modal atau penyelesaian realisasi investasi di wilayah HST pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, pemerintah daerah telah berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor potensial, namun perlu melakukan evaluasi strategis terhadap iklim investasi guna memastikan ketersediaan dukungan modal yang lebih kuat untuk keberlanjutan ekonomi di masa mendatang.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung sektor potensial”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kantrantibum, Pertanahan, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan

PTSP, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan, dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	549.619.100	369.780.944	67,28
Program Administrasi Pemerintahan Desa	99,71	2.566.778.450	2.499.104.059	97,36
Program Kawasan Permukiman	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	1.713.538.000	1.540.466.818	89,9
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemasaran Pariwisata	100	1.693.549.100	1.435.334.345	85
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	67.326.800	46.120.000	68,5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96,766	3.232.275.100	2.709.568.037	83,83
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100	604.079.400	323.859.341	53,61
Program Penanggulangan Bencana Daerah	100	1.741.949.310	1.548.193.670	88,88
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	96,07	6.572.993.800	5.440.600.189	82,77
Program Penataan Bangunan Gedung	97,19	21.843.639.827	19.748.102.817	90,41
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100	282.620.000	213.722.473	75,62
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Penempatan Tenaga Kerja	100	711.058.630	647.633.300	91,08

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	499.620.800	488.311.202	97,74
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	99,78	6.167.381.000	5.757.206.931	93,35
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97,93	6.238.157.800	5.666.726.482	90,84
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	86.506.590	71.433.500	82,58
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	1.069.186.880	988.406.720	92,44
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	3.502.614.775	2.657.671.163	75,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	421.665.536	393.684.081	93,36
Program Pengelolaan Persampahan	65,95	25.612.113.260	21.085.204.131	82,33
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	5.705.000	3.675.000	64,42
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	98	44.279.565.572	15.660.616.075	35,37
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	24.700.400	23.177.400	93,83
Program Pengembangan Perumahan	100	749.050.300	347.473.333	46,39
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	99,91	2.654.900.000	2.476.382.147	93,28
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	71.869.000	46.294.376	64
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	62,73	697.435.100	383.302.808	54,96
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	40.150.000	33.430.000	83,26
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.180.678.640	726.309.932	61,52
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	765.050.000	696.438.578	91,03

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	456.682.876	423.095.238	92,65
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	4.955.947.850	3.896.929.148	79
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	8.032.065.920	7.050.657.230	87,78
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	5.985.116.000	5.546.702.661	92,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	5.692.000.278	4.933.068.933	86,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	75,88	14.666.645.688	9.847.801.735	67,14
Program Penyelenggaraan Jalan	89,99	189.328.593.604	143.160.971.078	75,62
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	17.121.157.740	16.341.941.047	95,45
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,16	5.277.171.200	1.971.523.589	37,36
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	727.061.950	439.091.398	60,39
Program Penyuluhan Pertanian	100	1.917.180.698	1.645.808.743	85,85
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.415.619.700	1.128.217.803	80
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Promosi Penanaman Modal	100	92.012.000	86.562.946	94,08
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100	44.710.000	43.237.321	96,71

1.9.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	2,19	3,750	58,400	5,310	69,680
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	3,11	3,490	89,112	5,500	62,545
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	9,07	4,130	219,613	6,440	63,199
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	11,8	6,860	176,647	9,830	69,074
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa	6,42	6,36	100,975	7,34	87, 493
Nilai Investasi	208,88	204,500	102,142	464,85	44,935

Realisasi kinerja sektoral Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat variatif dengan lonjakan signifikan pada sektor tersier. Sektor Perdagangan serta sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman menjadi penggerak utama ekonomi dengan capaian fantastis masing-masing sebesar 219,613% dan 176,647% dari target RPJMD 2025. Indikator Nilai Investasi dan Laju Pertumbuhan Jasa juga berhasil melampaui target tahun berjalan dengan capaian di atas 100%. Namun, sektor Pertanian dan Industri Pengolahan masih menjadi catatan evaluasi penting karena belum berhasil memenuhi target RPJMD tahun 2025, di mana sektor pertanian hanya mencapai 58,400% dari target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya hambatan struktural atau eksternal pada sektor primer tersebut.

Jika dianalisis terhadap target jangka panjang RPJMD pada tahun 2029, terlihat adanya tantangan besar dalam menjaga konsistensi pertumbuhan menuju akhir periode perencanaan. Meskipun sektor jasa telah mendekati target akhir dengan capaian 87,493%, sektor-sektor strategis lainnya seperti Nilai Investasi baru mencapai 44,935% dari target 2029, dan laju pertumbuhan industri serta perdagangan masih berada pada kisaran 62-69%. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu merumuskan strategi penguatan pada sektor pertanian dan industri pengolahan agar tidak tertinggal jauh, sekaligus melakukan upaya ekstra untuk menggandakan nilai investasi guna mencapai target ambisius di tahun 2029 yang dipatok hampir dua kali lipat dari realisasi saat ini.

1.9.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	0,45	1,24	2,14	3,70	2,19
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2,23	4,46	0,57	3,44	3,11
Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	4,36	6,94	4,70	4,07	9,07
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman	2,54	7,08	9,43	6,79	11,8
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa				6,33	6,42
Nilai Investasi	60,3	49,21	57,83	185,94	208,88

Berdasarkan data tren historis dari tahun 2021 hingga 2025, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang sangat progresif pada sektor-sektor tersier dan investasi, meskipun sektor primer mengalami fluktuasi. Lonjakan paling signifikan terlihat pada Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, Makanan, dan Minuman yang mencapai titik tertinggi di angka 11,8, serta sektor Perdagangan yang melonjak tajam menjadi 9,07 setelah sempat melambat di tahun sebelumnya. Nilai Investasi juga mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan realisasi sebesar 208,88, yang menunjukkan peningkatan drastis dibandingkan periode 2021–2023 yang hanya berkisar di angka 49–60. Namun, sektor Pertanian mengalami koreksi menjadi 2,19 setelah sempat mencapai puncaknya di angka 3,70 pada tahun 2024, mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah yang kini lebih didominasi oleh penguatan sektor jasa dan daya tarik investasi dibandingkan sektor lapangan usaha pertanian.

1.10 Sasaran 10, Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan

1.10.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,22	0,25	84,259
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,695	0,342	150,791
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	0,037	172,993
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04	3,12	97,368

Berdasarkan data yang tersaji, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2025 dalam upaya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan hasil yang sangat impresif, di mana dua dari empat indikator utama berhasil melampaui target yang ditetapkan. Indeks Keparahan Kemiskinan mencatatkan capaian tertinggi sebesar 172,993% dengan realisasi angka 0,037 dari target 0,14, disusul oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mencapai 150,791%. Sementara Rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran hanya mampu memperoleh capaian sebesar 84,259% dari target tahun 2025. Keberhasilan pada beberapa indikator ini mengindikasikan bahwa program intervensi pemerintah daerah telah efektif dalam memperkecil jarak pengeluaran antar penduduk serta mengurangi beban kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Meskipun indikator kemiskinan menunjukkan performa luar biasa, terdapat catatan evaluasi pada sektor ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 3,12% dari target 3,04% (capaian 97,368%). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja atau ketidaksesuaian antara keahlian angkatan kerja dengan peluang pasar yang ada di tahun 2025. Secara keseluruhan, sasaran strategis pemerntah daerah untuk "Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan" telah berjalan di jalur yang tepat, namun tetap diperlukan penguatan sinergi antara program pengentasan kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja produktif agar seluruh indikator dapat mencapai hasil maksimal di masa mendatang.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Penanggulangan Kemiskinan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, dan urusan Perencanaan, Pengawasan dan Sekretariat Daerah

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Hubungan Industrial	95	6.886.321.100	5.179.761.841	75,22
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	1.148.253.100	903.769.635	78,71
Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial	100	652.550.600	375.278.688	57,51
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	67.326.800	46.120.000	68,5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96,766	3.232.275.100	2.709.568.037	83,83
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	554.930.000	549.252.148	98,98
Program Pemberdayaan Sosial	100	92.264.170	79.913.150	86,61
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100	604.079.400	323.859.341	53,61
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,61	298.652.087.109	284.209.822.735	95,16
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	35.697.571.880	19.378.961.743	54

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	394.344.660	257.790.691	65,37
Program Pendaftaran Penduduk	100	353.165.000	312.853.107	88,59
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	499.620.800	488.311.202	97,74
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	4.301.974.200	3.658.058.744	85,03
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97,93	6.238.157.800	5.666.726.482	90,84
Program Pengelolaan Pendidikan	100	123.513.947.638	116.181.545.267	94,06
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	3.502.614.775	2.657.671.163	75,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	421.665.536	393.684.081	93,36
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	456.682.876	423.095.238	92,65
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	796.165.500	491.906.497	61,78
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	75,88	14.666.645.688	9.847.801.735	67,14
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.239.239.100	897.438.104	74,42
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	727.061.950	439.091.398	60,39
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.415.619.700	1.128.217.803	80
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Rehabilitasi Sosial	100	8.354.041.650	6.695.744.523	80,15
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	388.912.400	384.606.924	98,89

1.10.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

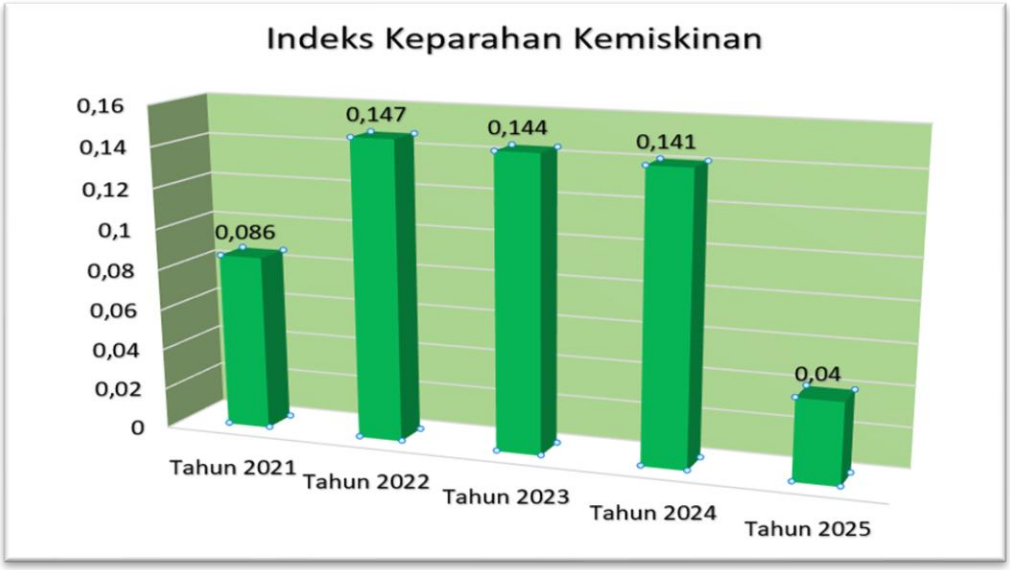
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Rasio Gini	0,25	0,216	84,259	0,204	77,451
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,342	0,695	150,791	0,495	130,909
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,037	0,137	172,993	0,121	169,421
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	3,040	97,368	2,80	88,571

Diketahui bahwa realisasi indikator kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam menekan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan melampaui target yang ditetapkan. Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mencatatkan capaian luar biasa masing-masing sebesar 172,993% dan 150,791% dari target RPJMD tahun 2025, yang berarti realisasi di lapangan jauh lebih rendah (lebih baik) daripada ambang batas maksimal yang ditargetkan, bahkan sudah melampaui ekspektasi target tahun 2029 dengan capaian di atas 130%. Di sisi lain, Rasio Gini berada pada angka 0,25 (capaian 84,259%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada 3,12% (capaian 97,368%), yang menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan dan pengangguran masih mendekati target tahun berjalan, pemerintah daerah telah berhasil menciptakan jaring pengaman sosial yang sangat solid untuk penduduk kategori termiskin. Secara keseluruhan, fokus pembangunan HST pada tahun 2025 sangat berhasil dalam aspek kualitas pengentasan kemiskinan ekstrem, namun tetap memerlukan akselerasi kebijakan untuk lebih mempersempit kesenjangan pendapatan dan memperluas lapangan kerja guna memenuhi target jangka panjang 2029.

1.10.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rasio Gini	0,298	0,296	0,23	0,23	0,25
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,5333	0,749	0,630		0,34
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,086	0,147	0,144	0,141	0,04
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,76	3,35	3,26	3,20	3,12







Berdasarkan analisis tren kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga tahun 2025, menunjukkan progresivitas yang signifikan pada mayoritas indikator kesejahteraan masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menunjukkan tren penurunan yang konsisten secara berturut-turut dari 3,76 pada tahun 2021 hingga mencapai titik terendah sebesar 3,12 pada tahun 2025. Keberhasilan serupa terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan yang sempat melonjak di angka 0,147 (2022) namun berhasil ditekan secara drastis menjadi 0,04 pada tahun 2025, serta Indeks Kedalaman Kemiskinan yang membaik dari 0,630 (2023) menjadi 0,34 (2025). Meskipun demikian, terdapat fluktuasi pada Rasio Gini yang setelah sempat stabil di angka 0,23 pada periode 2023-2024, mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,25

pada tahun 2025. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran, walaupun upaya pemerataan pendapatan (Rasio Gini) memerlukan perhatian kembali agar tidak terus melebar di masa mendatang.

1.11 Sasaran 11, Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah

1.11.1 Realisasi Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	3,49	12,63	361,891
	Rasio Kewirausahaan Daerah	21,50	12,96	60,279
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86,39	74,53	86,272
	Nilai Ekspor	1,20	1,84	153,333
	Tingkat Inflasi	3,50	3,93	89,059

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut diatas, pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah" Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2025 menunjukkan hasil yang variatif dengan beberapa catatan krusial. Keberhasilan paling mencolok terlihat pada indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan yang melampaui target secara masif hingga mencapai 361,89% (realisasi 12,63 dari target 3,49), serta Nilai Ekspor yang tumbuh impresif dengan capaian 153,33%. Performa luar biasa pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa kebijakan hilirisasi di Kabupaten HST telah berjalan sangat efektif, di mana komoditas lokal mulai bertransformasi menjadi produk bernilai tambah yang mampu menembus pasar lebih luas, sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah dari sisi industri.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan signifikan pada aspek penguatan fundamental ekonomi dan sumber daya manusia. Rasio Kewirausahaan Daerah mencatatkan capaian terendah, yakni hanya 60,27% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri besar belum sepenuhnya diikuti oleh kemunculan wirausahawan baru di tingkat lokal. Selain itu, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (86,27%) dan pengen dalian Tingkat Inflasi (89,05%) masih berada di bawah target 100%. Realisasi inflasi yang menyentuh angka 3,93 (dari target 3,50) mencerminkan adanya tekanan harga yang perlu diantisipasi agar

tidak menggerus daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun hilirisasi menunjukkan akselerasi yang pesat, Pemkab HST perlu fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan stimulus kewirausahaan agar produktivitas daerah dapat optimal dan inklusif.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya hilirisasi dan produktivitas daerah”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kantrantibum, Pertanahan, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan, dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	549.619.100	369.780.944	67,28
Program Administrasi Pemerintahan Desa	99,71	2.566.778.450	2.499.104.059	97,36
Program Kawasan Permukiman	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	1.713.538.000	1.540.466.818	89,9
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemasaran Pariwisata	100	1.693.549.100	1.435.334.345	85
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	67.326.800	46.120.000	68,5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96,766	3.232.275.100	2.709.568.037	83,83
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	100	604.079.400	323.859.341	53,61

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				
Program Penanggulangan Bencana Daerah	100	1.741.949.310	1.548.193.670	88,88
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	96,07	6.572.993.800	5.440.600.189	82,77
Program Penataan Bangunan Gedung	97,19	21.843.639.827	19.748.102.817	90,41
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100	282.620.000	213.722.473	75,62
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Penempatan Tenaga Kerja	100	711.058.630	647.633.300	91,08
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	499.620.800	488.311.202	97,74
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	99,78	6.167.381.000	5.757.206.931	93,35
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97,93	6.238.157.800	5.666.726.482	90,84
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	86.506.590	71.433.500	82,58
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	1.069.186.880	988.406.720	92,44
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	3.502.614.775	2.657.671.163	75,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	421.665.536	393.684.081	93,36
Program Pengelolaan Persampahan	65,95	25.612.113.260	21.085.204.131	82,33
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	5.705.000	3.675.000	64,42
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	98	44.279.565.572	15.660.616.075	35,37
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	24.700.400	23.177.400	93,83
Program Pengembangan Perumahan	100	749.050.300	347.473.333	46,39
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	99,91	2.654.900.000	2.476.382.147	93,28

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	71.869.000	46.294.376	64
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	62,73	697.435.100	383.302.808	54,96
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	40.150.000	33.430.000	83,26
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.180.678.640	726.309.932	61,52
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	765.050.000	696.438.578	91,03
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	456.682.876	423.095.238	92,65
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	4.955.947.850	3.896.929.148	79
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	8.032.065.920	7.050.657.230	87,78
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	5.985.116.000	5.546.702.661	92,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	5.692.000.278	4.933.068.933	86,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	75,88	14.666.645.688	9.847.801.735	67,14
Program Penyelenggaraan Jalan	89,99	189.328.593.604	143.160.971.078	75,62
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	17.121.157.740	16.341.941.047	95,45
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,16	5.277.171.200	1.971.523.589	37,36
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	727.061.950	439.091.398	60,39
Program Penyuluhan Pertanian	100	1.917.180.698	1.645.808.743	85,85
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.415.619.700	1.128.217.803	80
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Promosi Penanaman Modal	100	92.012.000	86.562.946	94,08
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100	44.710.000	43.237.321	96,71

1.11.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

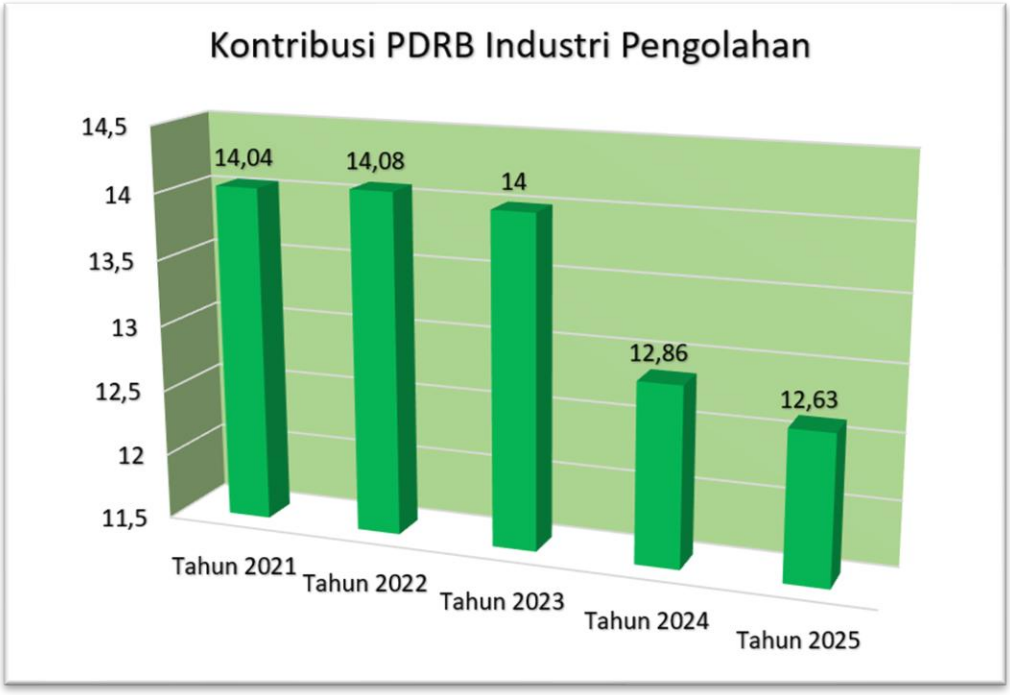
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,63	12,650	99,842	14,75	85,627
Rasio Kewirausahaan Daerah	12,96	21,500	60,279	22,5	57,600
Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	74,53	86,390	86,272	266	28,019
Nilai Ekspor	1,84	1,200	153,333	1,9	96,842
Tingkat Inflasi	3,93	3,5	89,059	3,5	87,714

Berdasarkan hasil analisis data dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 memiliki tingkat kedekatan yang relatif baik terhadap Target RPJMD tahun 2025, namun masih memerlukan akselerasi signifikan untuk memenuhi proyeksi target akhir periode RPJMD di tahun 2029. Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan hampir menyentuh target tahun 2025 dengan capaian 99,84%, sementara Nilai Ekspor menjadi performa terbaik karena telah melampaui target 2025 sebesar 153,33% dan mendekati target akhir 2029 dengan capaian 96,84%. Sebaliknya, tantangan besar terlihat pada Rasio Kewirausahaan Daerah dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang capaiannya terhadap target 2029 masing-masing baru menyentuh 57,60% dan 28,01%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

meskipun realisasi tahun 2025 sudah berada pada jalur yang benar untuk target tahunan, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekosistem bisnis lokal agar target ambisius pada akhir periode RPJMD tahun 2029 dapat terpenuhi secara optimal.

1.11.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	14,04	14,08	14,00	12,86	12,63
Rasio Kewirausahaan Daerah					21,24
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					63,99
Nilai Ekspor					1,10
Tingkat Inflasi					3,93



1.12 Sasaran 12, Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan

1.12.1 Realisasi Tahun 2005 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pelayanan infrasturktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	70,00	91	130,593
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,00	80,48	111,778
	Indeks Risiko Bencana	125,00	116,35	106,920
	Indeks Infrastruktur	62,89	62,85	99,936
	Penurunan intensitas emisi GRK	1,46	1,00	131,507
	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,45	102,174

Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2025 dalam mendukung sasaran strategis "Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan" menunjukkan performa yang relatif positif pada mayoritas indikator. Keberhasilan signifikan terlihat pada Penurunan intensitas emisi GRK dengan capaian 131,50% dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang mencapai 130,59% (realisasi 91 dari target 70). Tingginya angka IKLI mencerminkan bahwa pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya menyasar pada kuantitas, tetapi juga telah memenuhi ekspektasi dan memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sisi pengelolaan lingkungan dan kebencanaan, kinerja Pemkab HST juga melampaui target dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 111,77% dan Indeks Ketahanan Daerah sebesar 102,17%. Pengelolaan risiko bencana menunjukkan hasil yang selaras dengan target, di mana Indeks Risiko Bencana mencapai capaian 106,92% (angka realisasi 116,35 menunjukkan penurunan risiko dari baseline yang diharapkan). Sedangkan Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 mampu mencapai capaian 99,936% dengan angka realisasi sebesar 62,85 dari target tahun 2025 sebesar 62,89.

Program prioritas yang relevan dan mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan”; serta juga turut mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan”; sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, dilaksanakan oleh urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kantrantibum, Pertanahan, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan,

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan, dan urusan Sekretariat Daerah.

Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud yang telah dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terkait, beserta capaian kinerja dan keuangannya selama tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel sebagai berikut :

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	549.619.100	369.780.944	67,28
Program Administrasi Pemerintahan Desa	99,71	2.566.778.450	2.499.104.059	97,36
Program Kawasan Permukiman	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	1.713.538.000	1.540.466.818	89,9
Program Pelayanan Penanaman Modal	100	1.866.163.812	1.710.693.979	91,67
Program Pemasaran Pariwisata	100	1.693.549.100	1.435.334.345	85
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	67.326.800	46.120.000	68,5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96,766	3.232.275.100	2.709.568.037	83,83
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100	604.079.400	323.859.341	53,61
Program Penanggulangan Bencana Daerah	100	1.741.949.310	1.548.193.670	88,88
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	96,07	6.572.993.800	5.440.600.189	82,77
Program Penataan Bangunan Gedung	97,19	21.843.639.827	19.748.102.817	90,41
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100	282.620.000	213.722.473	75,62
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	1.604.333.050	1.358.472.973	84,68
Program Penempatan Tenaga Kerja	100	711.058.630	647.633.300	91,08

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	499.620.800	488.311.202	97,74
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	99,78	6.167.381.000	5.757.206.931	93,35
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97,93	6.238.157.800	5.666.726.482	90,84
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	86.506.590	71.433.500	82,58
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	1.069.186.880	988.406.720	92,44
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	3.502.614.775	2.657.671.163	75,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	421.665.536	393.684.081	93,36
Program Pengelolaan Persampahan	65,95	25.612.113.260	21.085.204.131	82,33
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	5.705.000	3.675.000	64,42
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	98	44.279.565.572	15.660.616.075	35,37
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	24.700.400	23.177.400	93,83
Program Pengembangan Perumahan	100	749.050.300	347.473.333	46,39
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	99,91	2.654.900.000	2.476.382.147	93,28
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	71.869.000	46.294.376	64
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	62,73	697.435.100	383.302.808	54,96
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	40.150.000	33.430.000	83,26
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.180.678.640	726.309.932	61,52
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	765.050.000	696.438.578	91,03
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	456.682.876	423.095.238	92,65

Program Prioritas	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Capaian Keuangan (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	4.955.947.850	3.896.929.148	79
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	8.032.065.920	7.050.657.230	87,78
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	5.985.116.000	5.546.702.661	92,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	5.692.000.278	4.933.068.933	86,67
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	75,88	14.666.645.688	9.847.801.735	67,14
Program Penyelenggaraan Jalan	89,99	189.328.593.604	143.160.971.078	75,62
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	17.121.157.740	16.341.941.047	95,45
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,16	5.277.171.200	1.971.523.589	37,36
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	727.061.950	439.091.398	60,39
Program Penyuluhan Pertanian	100	1.917.180.698	1.645.808.743	85,85
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.415.619.700	1.128.217.803	80
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	2.502.485.540	2.251.506.006	89,97
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	25.828.170.800	25.083.262.494	97,12
Program Promosi Penanaman Modal	100	92.012.000	86.562.946	94,08
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100	44.710.000	43.237.321	96,71

1.12.2 Realisasi dan Capaian Kinerja dibanding target RPJMD Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target RPJMD 2025	Capaian (%)	Target RPMD 2029	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	91	70,000	130,593	80	114,269

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,48	72,000	111,778	74,03	108,713
Indeks Risiko Bencana	116,35	125,000	106,920	122,01	95,361
Indeks Infrastruktur	62,85	62,890	99,936	74,39	108,713
Penurunan intensitas emisi GRK	1,00	1,460	131,507	1,15	86,957
Indeks Ketahanan Daerah	0,45	0,46	102,174	0,510	90,000

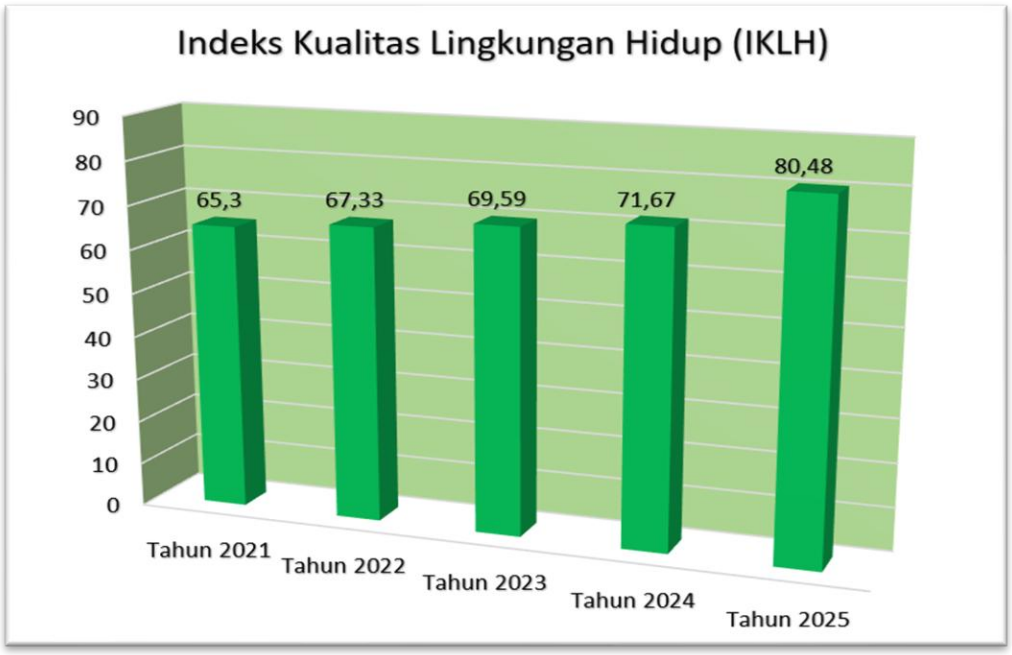
Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup meyakinkan, di mana mayoritas indikator layanan infrastruktur dan lingkungan telah melampaui Target RPJMD tahun 2025, dan bahkan menunjukkan kesiapan tinggi menuju Target akhir periode RPJMD di tahun 2029. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tampil menonjol dengan capaian terhadap target 2029 masing-masing sudah menyentuh 114,26% dan 108,71%, yang menandakan bahwa kualitas pembangunan saat ini telah melampaui ekspektasi jangka panjang. Meskipun demikian, akselerasi masih diperlukan pada indikator Penurunan intensitas emisi

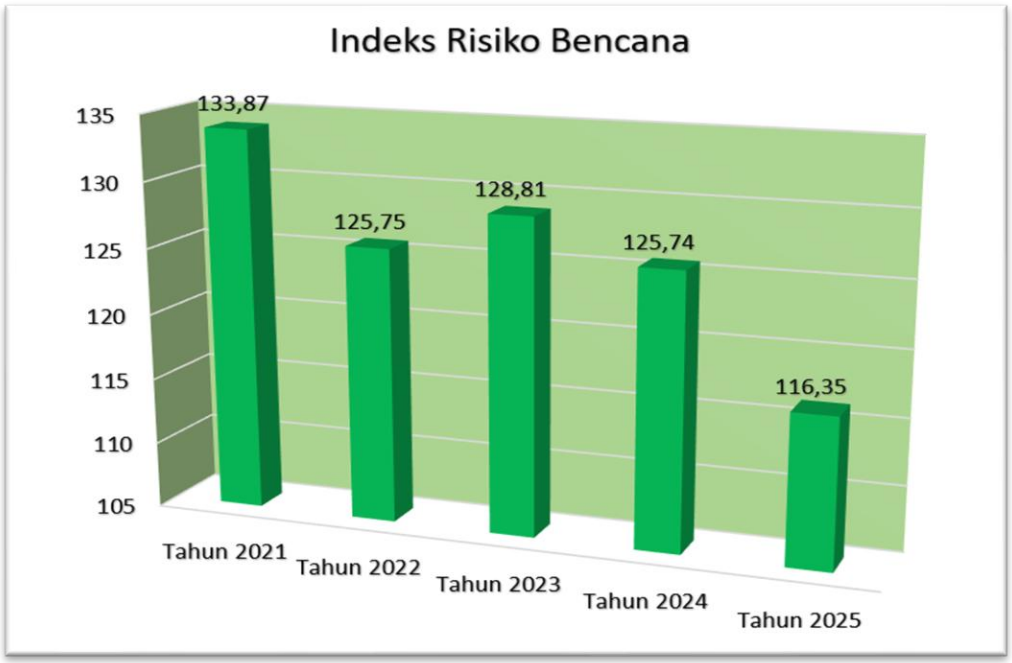
GRK (capaian 86,95% terhadap target 2029) dan Indeks Ketahanan Daerah (90,00% terhadap target 2029) guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan ketangguhan daerah tetap terjaga hingga akhir periode perencanaan. Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025 yang mencapai angka 99,93% pada Indeks Infrastruktur terhadap target 2025 membuktikan bahwa kerangka kerja pembangunan fisik di HST sudah berjalan sesuai koridor yang ditetapkan dengan efektivitas yang sudah baik.

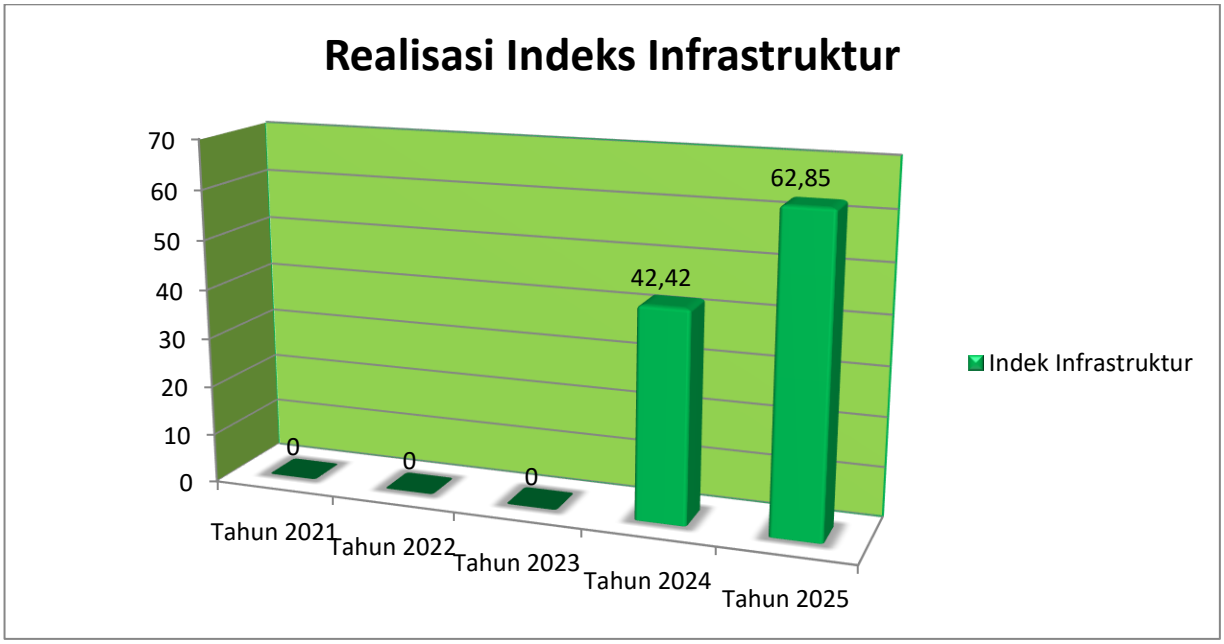
1.13.3 Realisasi Tahun 2025 dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)					91
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,30	67,33	69,59	71,67	80,48
Indeks Risiko Bencana	133,87	125,75	128,81	125,74	116,35

Indeks Infrastruktur				42,42	62,85
Penurunan intensitas emisi GRK					1,00
Indeks Ketahanan Daerah					0,45







Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut diatas, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada tahun 2025 menunjukkan tren positif yang signifikan pada berbagai indikator utama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencatatkan kenaikan konsisten dari 65,30 di tahun 2021 menjadi 80,48 di tahun 2025, yang dibarengi dengan

keberhasilan menekan Indeks Risiko Bencana ke angka terendah dalam lima tahun terakhir, yakni 116,35. Selain itu, lompatan besar terlihat pada Indeks Infrastruktur yang meningkat tajam dari 42,42 (2024) menjadi 62,85 (2025), serta munculnya capaian perdana pada indikator baru seperti Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 91 dan Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 1,00, yang menegaskan fokus pemerintah daerah pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di akhir periode tersebut.

Adapun Daerah Rawan Bencana dan titik lokasi evakuasi yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terdapat pada beberapa daerah sebagai berikut :

1. Peta Daerah Rawan Bencana



2. Titik Lokasi Evakuasi

a. MASJID SHULAHA (Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Barabai Darat Kab. HST Prov. Kalsel)



b. SMA Negeri 1 Barabai (Jalan Perintis Kemerdekaan No 1 Kel.Barabai Darat Kab. HST Prov. Kalsel)



c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANG) Kab.HST (Jalan Hevea Kel.Barabai Darat Kec. Barabai Kab. HST Prov. Kalsel)



d. Puskesmas Barabai (Jalan Hevea Kel.Barabai Darat Kec. Barabai Kab. HST Prov. Kalsel)



e. Bank Kalsel Cabang Barabai (Jl. Brigjen H. Hasan Basri No.12 Kel.Barabai Selatan Kec. Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



f. Gedung DPRD Kab. HST (Jl. Brigjen H. Hasan Baseri No.11 Kel.Barabai Selatan Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



g. Kantor Pemda HST + Dapur umum di Jambatan (Jl.Perwira No.1 Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



h. Gedung Murakata (Jl.Bhakti Kel.Barabai Timur Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



i. Kantor Bappeda Kab.HST (Jl. Bhakti No.9 Kel.Barabai Selatan Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



j. Masjid Agung Barabai + Dapur umum (Jl.H. Damanhuri Kel. Barabai Utara kec. Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



k. Gedung MUI HST (Jl. Ahmad Yani Kel.Barabai Utara Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



l. Kantor Kejaksaan Kab. HST (Jl. H.Abdul Muis Ridani No.60 Kel.Mandingin Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



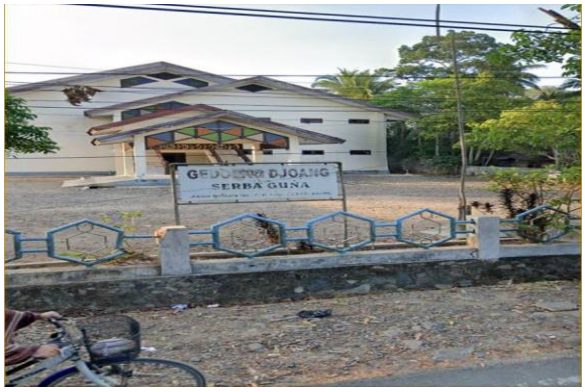
m. Kantor Kelurahan Barabai Timur (Jl. Anatasari Kel.Barabai Timur Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



n. Kantor Pengadilan Agama Kab. HST (Jl. H. Abdul Muis Ridani kel.Barabai Timur Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



o. Gedung Juang + Dapur umum (Jl. Ir. Pangeran H Muhammad Nur Kel.Barabai Timur Kec.Barabai kab.HST Prov.Kalsel)



p. Mako BPBD →Dapur umum + Droping Logistik (Jl. A. Yani Km. 160 Kec. Labuan Amas Selatan Kab.HST Prov.Kalsel)



q. Stadion Murakata dan Dapur Umum (Desa Mandingin Kec.Barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



r. STAI Al-Washliyah Simpang 10 + Dapur umum (Jl. Putera Harapan Kec.Pandawan Kab.HST Prov.Kalsel)



s. Kantor Pengadilan Negeri Kab.HST (Jl. Murakata No.1 Kel.Barabai Barat Kec.barabai Kab.HST Prov.Kalsel)



FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN SASARAN

1. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN SASARAN

a. Keterbatasan teknologi atau peralatan penunjang
b. Kompetensi SDM yang masih kurang
c. Jumlah personil yang masih kurang
d. Luas wilayah dan Topografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN SASARAN

a. Tingginya rasa kemanusiaan personil BPBD
b. Adanya bantuan Kerjasama / empati dari relawan-relawan kemanusiaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cepat tanggap.
c. Adanya bantuan Kerjasama dari BPBD kabupaten tetangga saat kejadian luar biasa.

1. Sosialisasi Desa Tangguh Bencana (Destana)

a. Desa Aluan Besar



b. Desa Jaranih





c. Desa Masiraan





2. Penyaluran Bantuan untuk korban Bencana Banjir









3. Penyampaian Informasi melalui Radio





4. Penyampaian informasi kebencanaan melalui media sosial



5. Pemantauan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan





6. Pemantauan Debit Air di Lokasi Rawan Bencana Banjir





7. Evakuasi Korban Bencana Banjir





8. Pemantauan Pasca Kejadian Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)





PRESTASI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025






KOMINFO HST
Selamat Atas Diraihnya
PENGHARGAAN REVITALISASI BAHASA DAERAH TAHUN 2025
Dalam rangka apresiasi kepada kepala daerah yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang luar biasa dalam menyukseskan revitalisasi bahasa daerah di wilayahnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada kepala
Media Center HST
@kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id


REPUBLIK IN
DISKOMINFO SP
HULU SUNGAI TENGAH
30 Januari 2026
PIAGAM PENGHARGAAN
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Selamat & Sukses Kepada
Bupati Hulu Sungai Tengah
Telah Menerima Penghargaan
dari Menteri Hukum Republik Indonesia
Atas Dukungan dan Komitmennya dalam Pembentukan
169 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Banjarbaru, 30 Januari 2026
BerAKHLAK


KOMINFOHST
IMDI
Selamat Atas Diraihnya
PENGHARGAAN ANUGERAH IMDI 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH MERAIH PRESTASI SEBAGAI TOP 3 DI KAWASAN INDONESIA BAGIAN TENGAH DAN YANG TERTINGGI DI KALIMANTAN SELATAN
Diberikan oleh Kementrian Komunikasi dan Digital Kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal
yang digelar di Ganara Art Space FX Sudirman, Jakarta, Kamis (02/10/2025),
"Sebagai Bukti Warga Murakata Telah Bergerak Bersama Menuju Era Digital yang Maju"


KOMINFO HST
1/9
BUPATI HST TERIMA PENGHARGAAN DARI GOOGLE INDONESIA
SMPN 1 JADI SEKOLAH RUJUKAN GOOGLE FOR EDUCATION
Media Center HST
@Kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id
kominfo hst


KOMINFO HST
Selamat & Sukses Kepada
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
UNTUK PENGHARGAAN
PENGELOLA PENGADUAN LAPOR! TERBAIK 3 SE-KALIMANTAN SELATAN
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Hasnuryadi Sulaiman, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab HST dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan respons terhadap pengaduan masyarakat.
Media Center HST
@kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id
kominfo hst


KOMINFO HST
1/10
BUPATI HST TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENDIKBUDRISTEK RI
ATAS DEDIKASI DALAM PENDIDIKAN
Media Center HST
@Kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id


KOMINFO HST
Selamat Atas Diraihnya
PENGHARGAAN BAZNAS AWARD
SEBAGAI KEPALA DAERAH PENDUKUNG GERAKAN ZAKAT INDONESIA
Diserahkan Langsung Oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA Kepada
Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta,
Kamis (28/8/2025).


DISKOMINFO SP
HULU SUNGAI TENGAH
RSUD H. DAMANHURI BARABAI
RAIH PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
(Wilayah Bebas dari Korupsi)
Pada SAKIP ZI Award 2025
Rabu, 11 Februari 2026
Aula Kementerian PANRB, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Diterima Oleh
Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
Mengapa RSHD Barabai Meraih Zona Integritas menuju WBK?
Unit Kerja Pelayanan Strategis yang Menunjukkan Komitmen Kuat dalam Menjalankan Reformasi Birokrasi yang Nyata
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Managemen SDM yang Unggul dan Budaya Kerja Berbasis Kinerja
Proses Bisnis yang Efisien Dengan Pemanfataan Teknologi Pelayanan
Penguatan Integritas dalam Pencegahan Korupsi
Komitmen RSHD Barabai :
Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas.
Upaya Berkelanjutan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Profesional.
dr. Nanda Sujud Andi Yudha Utama, Sp.B
Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai
"Penghargaan WBK ini adalah motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Kami berharap capaian ini dapat menjadi pemicu untuk terus berinovasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD H. Damanhuri Barabai"
Media Center HST
@kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id
kominfo hst
BerAKHLAK


KOMINFO HST
TAHUN 2025
PEMKAB HST TOREHKAN PENCAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, MENINGKAT KE KATEGORI MENUJU INFORMATIF
Media Center HST
@Kominfo_hst
mediacenter.hstkab.go.id
kominfo hst


KOMINFO HST
1/13
BUPATI SAMSUL RIZAL TERIMA PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA DARI KEMENPANRB

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Nihil

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Nihil

3.3 Permasalahan dan Kendala Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaantugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

Nihil

3.4 Saran dan Tindak Lanjut Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

Nihil

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	1 . Angka partisipasi sekolah	100	%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		2 . Angka partisipasi murni	100	%	Setiap Tahun
		3 . Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	76.38	%	Setiap Tahun
		4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	78.81	%	Setiap Tahun
		5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	35	%	Setiap Tahun
		6 . Kecukupan formasi guru ASN	15	%	Setiap Tahun
		7 . Indeks distribusi guru	92	%	Setiap Tahun
		8 . Proporsi PTK bersertifikat	45	%	Setiap Tahun
		9 . Proporsi GTK penggerak	3	%	Setiap Tahun
2	**Pendidikan Dasar**	**SD**			
		1 . Angka partisipasi kasar	100	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	71.90	Nilai	Setiap Tahun
		4 . Kemampuan numerasi	69.46	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	2	Nilai	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		6 . Perbedaan skor numerasi	3,5	Nilai	Setiap Tahun
		7 . Indeks iklim keamanan	81.93	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	74.39	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	66.26	Nilai	Setiap Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	85	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	100	%	Setiap Tahun
		12 . Proporsi PTK bersertifikat	80	%	Setiap Tahun
		13 . Proporsi GTK penggerak	3,5	%	Setiap Tahun
		SMP			
		1 . Angka partisipasi kasar	100	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	69.88	Nilai	Setiap Tahun
		4 . Kemampuan numerasi	63.86	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	15	Nilai	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		6 . Perbedaan skor numerasi	8	Nilai	Setiap Tahun
		7 . Indeks iklim keamanan	73.56	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	70.37	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	59.80	Nilai	Setiap Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	75	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	100	%	Setiap Tahun
		12 . Proporsi PTK bersertifikat	72	%	Setiap Tahun
		13 . Proporsi GTK penggerak	4	%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	1 . Angka partisipasi kasar	100	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	74	Nilai	Setiap Tahun
		4 . Kemampuan numerasi	76	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	2	Nilai	Setiap Tahun
		6 . Perbedaan skor numerasi	1,5	Nilai	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		7 . Indeks iklim keamanan	75	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	72	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	65	Nilai	Setiap Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	30	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	95	%	Setiap Tahun
		12 . Proporsi PTK bersertifikat	35	%	Setiap Tahun
		13 . Proporsi GTK penggerak	10	%	Setiap Tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	1 . Angka partisipasi sekolah	100	92,72	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi murni	100	64,65	%	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
						Tahun
		3 . Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	76.38	99,45	%	Setiap Tahun
		4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	78.81	100	%	Setiap Tahun
		5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	35	75,96	%	Setiap Tahun
		6 . Kecukupan formasi guru ASN	15	8,58	%	Setiap Tahun
		7 . Indeks distribusi guru	92	89,44	%	Setiap Tahun
		8 . Proporsi PTK bersertifikat	45	35,12	%	Setiap Tahun
		9 . Proporsi GTK penggerak	3	1,11	%	Setiap Tahun
2	**Pendidikan Dasar**	**SD**				
		1 . Angka partisipasi kasar	100	103,61	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	96.5	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	71.90	85.92	Nilai	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		4 . Kemampuan numerasi	69.46	89.68	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	2	2,33	Nilai	Setiap Tahun
		6 . Perbedaan skor numerasi	3,5	4,12	Nilai	Setiap Tahun
		7 . Indeks iklim keamanan	81.93	81.03	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	74.39	73.39	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	66.26	63.75	Nilai	Setiap Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	85	78,12	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	100	100	%	Setiap Tahun
		12 . Proporsi PTK bersertifikat	80	72,17	%	Setiap Tahun
		13 . Proporsi GTK penggerak	3,5	1,11	%	Setiap Tahun
		SMP				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		1 . Angka partisipasi kasar	100	104,02	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	76,09	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	69.88	100	Nilai	Setiap Tahun
		4 . Kemampuan numerasi	63.86	100	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	15	20,10	Nilai	Setiap Tahun
		6 . Perbedaan skor numerasi	8	10,94	Nilai	Setiap Tahun
		7 . Indeks iklim keamanan	73.56	97,96	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	70.37	98,58	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	59.80	95,97	Nilai	Setiap Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	75	71,4	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	100	100	%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		12 . Proporsi PTK bersertifikat	72	65,45	%	Setiap Tahun
		13 . Proporsi PTK penggerak*	4	2	%	Setiap Tahun
3	**Pendidikan Kesetaraan**	1 . Angka partisipasi kasar	100	8,52	%	Setiap Tahun
		2 . Angka partisipasi sekolah	100	3,25	%	Setiap Tahun
		3 . Kemampuan literasi	74	71,06	Nilai	Setiap Tahun
		4 . Kemampuan numerasi	76	74,15	Nilai	Setiap Tahun
		5 . Perbedaan skor literasi	2	2,33	Nilai	Setiap Tahun
		6 . Perbedaan skor numerasi	1,5	1,44	Nilai	Setiap Tahun
		7 . Indeks iklim keamanan	75	72,06	Nilai	Setiap Tahun
		8 . Indeks iklim kebhinekaan	72	69,37	Nilai	Setiap Tahun
		9 . Indeks iklim inklusivitas	65	57,39	Nilai	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
						Tahun
		10 . Kecukupan formasi guru ASN	30	21,40	%	Setiap Tahun
		11 . Indeks distribusi guru	95	92,31	%	Setiap Tahun
		12. Proporsi PTK bersertifikat	35	23,35	%	Setiap Tahun
		13. Proporsi GTK penggerak	10	7,10	%	Setiap Tahun

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.619.959.900	48.659.937.982	90.75
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.984.310.088	24.801.276.939	91.91
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.307.482.550	17.984.701.003	93.15
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	23.602.194.600	22.076.423.360	93.54
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	7.599.289.738	7.2.96.540.486	92.01

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
6	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	332.525.000	331.700.000	99.75
7	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	293.630.000	293.548.000	99.97
8	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	156.320.000	154.182.284	98.63
9	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.254.429.593	1.252.580.018	99.85

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Dinas Pendidikan (Jabatan Struktural dan Fungsional Umum)	56	ASN dan PPPK Lingkup Kantor Dinas Pendidikan
2	Tenaga Kontrak	0	Tenaga Kontrak Lingkup Kantor Dinas Pendidikan
4	Pengawas PAUD/SD/SMP	25 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
5	Penilik	4 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
6	Tenaga Pendidik PAUD	833 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
7	Tenaga Pendidik Kesetaraan	219 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
8	Tenaga Pendidik SD	1911 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
9	Tenaga Pendidik SMP	442 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
10	Tenaga Kependidikan SD	692 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah
11	Tenaga Kependidikan SMP	134 Orang	ASN, PPPK dan Honor Sekolah

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2025, baik dari faktor eksternal maupun internal, serta langkah-langkah strategis yang diambil

A. Permasalahan Eksternal:

1. Sinkronisasi Kebijakan dan Fluktuasi Dukungan Anggaran Pusat:

   Permasalahan:
   Perubahan arah kebijakan pemerintah pusat dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler menjadi program Revitalisasi Sekolah menciptakan ketidakpastian dalam kontinuitas pembiayaan infrastruktur pendidikan di daerah.
   Solusi:
   Memperkuat koordinasi dan lobi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan kejelasan petunjuk teknis revitalisasi, serta memastikan usulan sarana prasarana daerah masuk dalam prioritas nasional.
2. Kesenjangan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu:
   Permasalahan:
   Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah masih menghadapi hambatan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
   Solusi:
   Penguatan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan daerah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang saat ini berada di angka 92,72% untuk PAUD agar bisa mencapai target 100%.
3. Kesenjangan Akses Digital dan Geografis:
   Permasalahan:
   Masih adanya wilayah dengan akses internet terbatas yang menghambat digitalisasi pendidikan dan pelaporan data pokok pendidikan (Dapodik) secara real-time.
   Solusi :

Perluasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil serta penyediaan perangkat belajar digital yang lebih merata untuk mendukung kemampuan literasi dan numerasi siswa

B. Permasalahan Internal :

1. Rendahnya Proporsi Tenaga Pendidik (PTK) Bersertifikat:
   Permasalahan:
   Data menunjukkan proporsi PTK yang memiliki sertifikat pendidik masih cukup rendah untuk jenjang SD dan SMP. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan standar kualitas pendidik dalam SPM.
   Solusi:
   Memfasilitasi dan mendorong lebih banyak guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memberikan bimbingan teknis dalam persiapan sertifikasi.

2. Optimalisasi Anggaran dan Penyerapan Program:
   Permasalahan:
   Realisasi anggaran pada beberapa program pengelolaan pendidikan masih berada di kisaran 60% hingga 80% pada semester pertama Anggaran 2025 . Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target fisik dan keuangan tercapai tepat waktu.
   Solusi:
   Melakukan evaluasi berkala per triwulan terhadap serapan anggaran dan mempercepat proses pengadaan sarana prasarana sekolah di awal tahun anggaran.
3. Tantangan pada Indeks Iklim Inklusivitas:
   Permasalahan:
   Berdasarkan data realisasi, nilai indeks iklim inklusivitas (khususnya di jenjang SMP sebesar 59,8) masih lebih rendah dibandingkan indeks keamanan atau kebhinekaan.
   Solusi:
   Sosialisasi masif mengenai pendidikan inklusif dan penguatan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler.

C. Langkah-langkah Penyelesaian:

1. Akselerasi sertifikasi guru dilakukan dengan mengalokasikan dukungan khusus untuk peningkatan kualifikasi serta kompetensi guru agar target proporsi PTK bersertifikat meningkat signifikan dari realisasi saat ini yang masih berada di kisaran 29,34%.

2. Penguatan infrastruktur digital dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengadaan perangkat pembelajaran digital dalam investasi infrastruktur pendidikan guna mendukung kemampuan literasi dan numerasi siswa yang ditargetkan tinggi.
3. Manajemen anggaran yang responsif ditempuh melalui perbaikan sistem perencanaan agar belanja langsung maupun tidak langsung dapat tepat sasaran untuk pemenuhan indikator SPM yang belum mencapai 100%, terutama pada program dengan serapan di bawah 80%.
4. Monitoring inklusivitas dan karakter dijalankan dengan menetapkan sistem pemantauan berkelanjutan terhadap iklim lingkungan sekolah agar lebih inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya untuk meningkatkan indeks inklusivitas SMP yang masih berada di angka 59,8.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui forum komunikasi diwujudkan dengan melibatkan komite sekolah secara aktif dalam mendukung operasional sekolah di tengah keterbatasan anggaran daerah.
6. Akselerasi sertifikasi guru dilakukan dengan mengalokasikan dukungan khusus untuk peningkatan kualifikasi serta kompetensi guru agar target proporsi PTK bersertifikat meningkat signifikan dari realisasi saat ini yang masih berada di kisaran 29,34%.
7. Penguatan infrastruktur digital dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengadaan perangkat pembelajaran digital dalam investasi infrastruktur pendidikan guna mendukung kemampuan literasi dan numerasi siswa yang ditargetkan tinggi.
8. Manajemen anggaran yang responsif ditempuh melalui perbaikan sistem perencanaan agar belanja langsung maupun tidak langsung dapat tepat sasaran untuk pemenuhan indikator SPM yang belum mencapai 100%, terutama pada program dengan serapan di bawah 80%.
9. Monitoring inklusivitas dan karakter dijalankan dengan menetapkan sistem pemantauan berkelanjutan terhadap iklim lingkungan sekolah agar lebih inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya untuk meningkatkan indeks inklusivitas SMP yang masih berada di angka 59,8.
10. Pemberdayaan masyarakat melalui forum komunikasi diwujudkan dengan melibatkan komite sekolah secara aktif dalam mendukung operasional sekolah di tengah keterbatasan anggaran daerah.
11. Sinkronisasi usulan revitalisasi sarana prasarana sekolah dilaksanakan dengan menyelaraskan pendataan kerusakan bangunan melalui Dapodik dengan skema program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat agar perbaikan gedung sekolah lebih terukur dibandingkan sistem sebelumnya.
12. Perluasan jangkauan pendidikan kesetaraan atau non-formal ditempuh dengan meningkatkan sosialisasi serta fasilitas pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk merangkul anak usia sekolah yang tidak bersekolah guna mencapai target angka partisipasi sekolah

sebesar 100%.

13. Penguatan fungsi pengawasan oleh pengawas dan penilik dilakukan dengan memberdayakan 25 orang pengawas serta 4 orang penilik sebagai garda terdepan dalam melakukan supervisi klinis dan pendampingan untuk memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi di tiap satuan pendidikan.

4.1.7 Program dan Kegiatan

PROGRAM		KEGIATAN	
1	*PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN*	*1*	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*
		2	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*
		3	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*
		4	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*
2	*PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL KESETARAAN*	*1*	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan*

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, untuk bidang kesehatan di kabupaten/kota ada 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar terdiri atas:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan kesehatan balita
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan diabetes melitus
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k) Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K6)	3.412	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	911	Vaksin	Setiap Tahun
		Tablet tambah darah	436.704	Tablet	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	3.667	Orang	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.027	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	3.482	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.716	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	3.608	Paket	Setiap Tahun
		Kartu ibu/rekam medis ibu	3.588	Paket	Setiap Tahun
		Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.748	Buku	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	Paket	Setiap Tahun
		Gel USG	417	Botol	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	42	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Perawat	268	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	193	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	37	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	Orang	Setiap Tahun
		Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	3.412	Orang	Setiap Tahun
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.412	Orang	Setiap Tahun
		Formulir partograf	3.528	Formulir	Setiap Tahun
		Kartu ibu/rekam medis ibu	3.553	Paket	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.711	Buku	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	31	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	41	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	255	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	198	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	44	Orang	Setiap Tahun
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.235	Orang	Setiap Tahun
		Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	6.005	Vaksin	Setiap Tahun
		Vitamin K1 injeksi	3.087	Ampul	Setiap Tahun
		Salep/tetes mata antibiotik	3.315	Orang	Setiap Tahun
		Formulir bayi baru lahir	3.235	Formulir	Setiap Tahun
		Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3.223	Formulir	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.235	Buku	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	241	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	31	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	209	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	150	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	29	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	2.411	Orang	Setiap Tahun
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	2.411	Orang	Setiap Tahun
		Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	16.581	Dokumen	Setiap Tahun
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	17.318	Formulir	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.288	Orang	Setiap Tahun
		Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	16.185	Kapsul	Setiap Tahun
		Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	3.832	Kapsul	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	16.777	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	335	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	2.520	Vaksin	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	2.379	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	1.464	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	692	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	2.404	Vaksin	Setiap Tahun
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	571	Unit	Setiap Tahun
		Peralatan Anafilaktik	47.910	Paket	Setiap Tahun
		Formula Terapi Gizi Buruk	30	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	112	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	35	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	130	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	45	Orang	Setiap Tahun
		Guru PAUD	302	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	2.418	Orang	Setiap Tahun
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	35.602	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	35.584	Buku	Setiap Tahun
		Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	30.222	Buku	Setiap Tahun
		Kuesioner skrining kesehatan	29.192	Dokumen	Setiap Tahun
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2.055	Formulir	Setiap Tahun
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	845	Formulir	Setiap Tahun
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	85.319	Tablet	Setiap Tahun
		Alat Pemeriksaan Hb	47	Alat	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	2.323	Strip	Setiap Tahun
		Media promosi kesehatan	60	Paket	Setiap Tahun
		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	4.077	Vaksin	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	33	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	105	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	100	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	34	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	1.568	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1.010	Orang	Setiap Tahun
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	202.511	Orang	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	225	Paket	Setiap Tahun
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	50	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Tensimeter	38	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Glukometer	57	Unit	Setiap Tahun
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	30	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	195.868	Unit	Setiap Tahun
		Alat : KIT IVA Tes	77	Unit	Setiap Tahun
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	27.796	Unit	Setiap Tahun
		Kit Opthalmologi Komunitas	116	Unit	Setiap Tahun
		Kuesioner PUMA	27.626	Dokumen	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Alat Pelayanan KB	38	Unit	Setiap Tahun
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	583	Unit	Setiap Tahun
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	843	Unit	Setiap Tahun
		c. Vasektomi set	1	Unit	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	8.461	Dokumen	Setiap Tahun
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	628	Ampul	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	41	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	46	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	22	Orang	Setiap Tahun
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	902	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	31.365	Orang	Setiap Tahun
		Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	135	Paket	Setiap Tahun
		Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	1.473	Paket	Setiap Tahun
		Alat pemeriksaan kolesterol	118	Paket	Setiap Tahun
		Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	38.380	Paket	Setiap Tahun
		Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	20.684	Paket	Setiap Tahun
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	6.094	Buku	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	62	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	30	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	109	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	45	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	22	Orang	Setiap Tahun
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	946	Orang	Setiap Tahun
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.903	Orang	Setiap Tahun
		Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	96	Paket	Setiap Tahun
		Obat Hipertensi	13.903	Paket	Setiap Tahun
		Tensimeter	55	Unit	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1.174	Aplikasi	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	47	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	24	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	48	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Perawat	51	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	31	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	20	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	23	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	69	Orang	Setiap Tahun
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.294	Orang	Setiap Tahun
		Obat Diabetes Melitus	3.294	Paket	Setiap Tahun
		Fotometer atau Glukometer	44	Unit	Setiap Tahun
		BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	21.484	Unit	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	373	Formulir	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	67	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	39	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	44	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	23	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	28	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	24	Orang	Setiap Tahun
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	439	Orang	Setiap Tahun
		Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	33	Buku	Setiap Tahun
		Penyediaan Psikofarmaka	300	Jenis	Setiap Tahun
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	16.018	Formulir	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.607	Formulir	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	Media	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	28	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	111	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga profesional lainnya	63	Orang	Setiap Tahun
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.685	Orang	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	334	Paket	Setiap Tahun
		Reagen Zn TB	434	Kit	Setiap Tahun
		Masker bedah dan Masker N95	2.808	Paket	Setiap Tahun
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5.362	Paket	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Katrid tes cepat molekuler	4.089	Test	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan	29	Dokumen	Setiap Tahun
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19	Dokumen	Setiap Tahun
		Tuberkulin	116	Vial	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	27	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	67	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	30	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Radiografer	1	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	218	Orang	Setiap Tahun
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.249	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
	Virus)				
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.041	Paket	Setiap Tahun
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	4.897	Test	Setiap Tahun
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	4.947	Paket	Setiap Tahun
		Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	5.049	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	24	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	76	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	62	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	25	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Satuan	Batas Waktu Capaian
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	92	Orang	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K6)	3.412	2.961	Orang	Setiap Tahun
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	911	966	Vaksin	Setiap Tahun
		Tablet tambah darah	436.704	437.713	Tablet	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	3.667	3.779	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.027	4.273	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	3.482	3.589	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.716	4.818	Paket	Setiap Tahun
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	3.608	3.710	Paket	Setiap Tahun
		Kartu ibu/rekam medis ibu	3.588	3.699	Paket	Setiap Tahun
		Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.748	3.850	Buku	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	25	Paket	Setiap Tahun
		Gel USG	417	416	Botol	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	42	41	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	268	274	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	193	193	Orang	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
						Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	37	37	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	43	Orang	Setiap Tahun
		Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	3.412	2.961	Orang	Setiap Tahun
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.412	3.151	Orang	Setiap Tahun
		Formulir partograf	3.528	3.522	Formulir	Setiap Tahun
		Kartu ibu/rekam medis ibu	3.553	3.547	Paket	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.711	3.696	Buku	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	31	31	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	41	c	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	255	261	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	198	210	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	44	41	Orang	Setiap Tahun
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.235	3.080	Orang	Setiap Tahun
		Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	6.005	5.504	Vaksin	Setiap Tahun
		Vitamin K1 injeksi	3.087	3.553	Ampul	Setiap Tahun
		Salep/tetes mata antibiotik	3.315	3.429	Orang	Setiap Tahun
		Formulir bayi baru lahir	3.235	3.358	Formulir	Setiap Tahun
		Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3.223	3.348	Formulir	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.235	3.360	Buku	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	241	241	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	31	31	Paket	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Tenaga kesehatan : Bidan	209	217	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	150	163	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	29	29	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	22	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	46	45	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	2.411	2.411	Orang	Setiap Tahun
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	16.581	17.629	Orang	Setiap Tahun
		Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	17.318	21.308	Dokumen	Setiap Tahun
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	17.288	21.308	Formulir	Setiap Tahun
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak	16.185	15.393	Orang	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		(KIA)				Tahun
		Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	3.832	3.855	Kapsul	Setiap Tahun
		Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	16.777	16.559	Kapsul	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	335	532	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	2.520	2.196	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	2.379	1.878	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	1.464	1.516	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	692	900	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	2.404	2.655	Vaksin	Setiap Tahun
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	571	811	Vaksin	Setiap Tahun
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	47.910	46.541	Unit	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Peralatan Anafilaktik	30	31	Paket	Setiap Tahun
		Formula Terapi Gizi Buruk	112	114	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	35	33	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	203	209	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	130	142	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	45	44	Orang	Setiap Tahun
		Guru PAUD	302	302	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	2.418	2.418	Orang	Setiap Tahun
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	35.602	34.816	Orang	Setiap Tahun
		Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	35.584	35.411	Buku	Setiap Tahun
		Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan		30.076	Buku	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
			30.222			
		Kuesioner skrining kesehatan	29.192	29.046	Dokumen	Setiap Tahun
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2.055	2.056	Formulir	Setiap Tahun
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	845	845	Formulir	Setiap Tahun
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	85.319	130.568	Tablet	Setiap Tahun
		Alat Pemeriksaan Hb	47	38	Alat	Setiap Tahun
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	2.323	2.657	Strip	Setiap Tahun
		Media promosi kesehatan	60	65	Paket	Setiap Tahun
		Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	4.077	4.075	Vaksin	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	33	35	Orang	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
						Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	105	105	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	100	100	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	34	31	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	25	23	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	1.568	1.568	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1.010	1.010	Orang	Setiap Tahun
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	202.511	173.291	Orang	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	225	225	Paket	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	50	52	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Tensimeter	38	43	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Glukometer	57	61	Unit	Setiap Tahun
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	30	30	Unit	Setiap Tahun
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	195.868	196.365	Unit	Setiap Tahun
		Alat : KIT IVA Tes	77	78	Unit	Setiap Tahun
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	27.796	27.647	Unit	Setiap Tahun
		Kit Opthalmologi Komunitas	116	115	Unit	Setiap Tahun
		Kuesioner PUMA	27.626	27.651	Dokumen	Setiap Tahun
		Alat Pelayanan KB		1.462	Unit	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	583	583	Dokumen	Setiap Tahun
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	843	878	Ampul	Setiap Tahun
		c. Vasektomi set	1	1	Orang	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	8.461	8.472	Orang	Setiap Tahun
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	628	740	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	25	26	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	41	50	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	46	58	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	25	32	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga	22		Orang	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Kesehatan Masyarakat		22		Tahun
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	902	902	Orang	Setiap Tahun
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	31.365	26.097	Orang	Setiap Tahun
		Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	135	151	Paket	Setiap Tahun
		Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	1.473	1.231	Paket	Setiap Tahun
		Alat pemeriksaan kolesterol	118	132	Paket	Setiap Tahun
		Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	38.380	38.561	Paket	Setiap Tahun
		Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	20.684	20.867	Paket	Setiap Tahun
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	6.094	6.467	Buku	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	62	62	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	30	29	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	156	160	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	109	110	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	45	42	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	22	22	Orang	Setiap Tahun
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	946	946	Orang	Setiap Tahun
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.903	16.532	Orang	Setiap Tahun
		Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	96	98	Paket	Setiap Tahun
		Obat Hipertensi	13.903	13.409	Paket	Setiap Tahun
		Tensimeter	55	55	Unit	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1.174	1.175	Aplikasi	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	47	49	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	24	24	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	48	48	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	51	51	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	31	31	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	20	20	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	23	23	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	69	69	Orang	Setiap Tahun
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.294	4.019	Orang	Setiap Tahun
		Obat Diabetes Melitus	3.294	3.608	Paket	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
						Tahun
		Fotometer atau Glukometer	44	47	Unit	Setiap Tahun
		BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	21.484	21.692	Unit	Setiap Tahun
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	373	373	Formulir	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	67	67	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter	25	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	39	39	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	44	44	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	23	23	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	22	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	28	29	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	24	24	Orang	Setiap Tahun
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	439	649	Orang	Setiap Tahun
		Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	33	49	Buku	Setiap Tahun
		Penyediaan Psikofarmaka	300	362	Jenis	Setiap Tahun
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	16.018	16.064	Formulir	Setiap Tahun
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.607	2.653	Formulir	Setiap Tahun
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	132	153	Media	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Tenaga medis : Dokter	28	28	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	22	20	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	111	32	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga profesional lainnya	63	12	Orang	Setiap Tahun
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.685	5.108	Orang	Setiap Tahun
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	334	334	Paket	Setiap Tahun
		Reagen Zn TB	434	434	Kit	Setiap Tahun
		Masker bedah dan Masker N95	2.808	3.070	Paket	Setiap Tahun
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5.362	5.349	Paket	Setiap Tahun
		Katrid tes cepat molekuler	4.089	3.504	Test	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Formulir pencatatan dan pelaporan	29	29	Dokumen	Setiap Tahun
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	19	20	Dokumen	Setiap Tahun
		Tuberkulin	116	70	Vial	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	27	27	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	67	67	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	30	28	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	24	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31	26	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Radiografer	1	1	Orang	Setiap Tahun
		Kader Kesehatan	218	218	Orang	Setiap Tahun
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi**	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi		6.555	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
	Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.249			
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.041	2.438	Paket	Setiap Tahun
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	4.897	5.796	Test	Setiap Tahun
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	4.947	5.843	Paket	Setiap Tahun
		Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	5.049	5.948	Paket	Setiap Tahun
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	24	25	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Bidan	76	77	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Perawat	62	67	Orang	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Satuan	Ket
		Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	25	23	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	22	22	Orang	Setiap Tahun
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	92	84	Orang	Setiap Tahun

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pada tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 2.001.722.800,00	Rp. 1.119.464.810, 00	55,93
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	Rp. 170.451.849,00	Rp 141.242.700,00	82,86
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 282.587.000,00	Rp 169.525.270,00	59,99
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.	Rp. 66.296.200,00	Rp 41.974.300,00	63,31
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	Rp. 1.078.879.000,00	Rp 285.688.000,00	26,48
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	Rp. 104.138.700,00	Rp 80.293.752,00	77,10

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	Rp. 61.521.600,00	Rp 58.401.600,00	94,93
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	Rp. 41.891.200,00	Rp 26.769.275,00	63,90
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	Rp . 42.889.050,00	Rp 30.895.392,00	72,04
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.	Rp. 609.098.000,00	Rp 90.084.852,00	14,79
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.	Rp. 392.831.400,00	Rp 113.853.365,00	28,98
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.	Rp. 15.907.100,00	Rp 12.916.065,00	81,20

Penunjang Alokasi anggaran bidang kesehatan selain 12 (dua belas) indikator SPM di atas antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 392.819.000,00	Rp 287.180.699,00	73,11
2	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 1.364.525.000,00	Rp 1.031.114.330,00	75,57
3	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 82.340.000,00	Rp 47.792.000,00	58,04
4	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 503.342.100,00	Rp 400.946.995,00	79,66
5	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 8.907.806.838,00	Rp 8.895.758.870,00	99,86
6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 212.086.000,00	Rp 206.924.471,00	97,57

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 8.337.868.701,00	Rp 8.117.802.780,00	97,36
8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 140.435.330,00	Rp 110.917.100,00	78,98
9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 5.351.563.378,00	Rp 3.946.530.472,00	73,75
10	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.302.770.200,00	Rp 1.197.426.716,00	91,91

4.2.5 Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Dinas Kesehatan (Jabatan Struktural dan Fungsional Umum)	132 Orang	ASN dan PPPK Lingkup Kantor Dinas Kesehatan
2	Tenaga Kontrak	246 Orang	Tenaga Kontrak Lingkup Kantor Dinas Kesehatan
3	Dokter Spesialis	20 Orang	ASN dan Non ASN
4	Dokter Gigi	16 Orang	ASN dan Non ASN
5	Dokter	24 Orang	ASN dan Non ASN
6	Perawat	240 Orang	ASN dan Non ASN
7	Bidan	251 Orang	ASN dan Non ASN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	ASN dan Non ASN
9	Tenaga Gizi	47 Orang	ASN dan Non ASN
10	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	26 Orang	ASN dan Non ASN
11	Tenaga Teknis Kefarmasian	37 Orang	ASN dan Non ASN
12	Tenaga Radiografer	1 Orang	ASN dan Non ASN
13	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	12 Orang	ASN dan Non ASN

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Beberapa indikator yang target realisasinya ⩾ 60%. umumnya memiliki permasalahan yang minor. sehingga cukup dilakukan peningkatan terkait program yang sudah ada

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Hambatan :

- Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester I.
- Ada petugas penanggung jawab yang baru,
- Masih adanya ibu hamil yang mengalami abortus/keguguran.
- Faktor sosial budaya masyarakat.
- Sebagian akses/geografis menuju fasyankes masih sulit

Solusi :

- Memperbanyak edukasi persiapan layak hamil bagi calon pengantin dan Kunjungan rumah oleh Kader ILP.
- Sosialisasi/Bimtek bagi PJ baru
- Penguatan motivasi/ bimbingan untuk ibu hamil secara personal atau melalui media sosial (whatsapp).
- Sosialisasi kepada LS/tokoh agama/tokoh masyarakat tentang pentingnya Ibu Hamil memeriksakan diri selama kehamilan ke Fasilitas Kesehatan dan P4K.
- Penyediaan peralatan dan logistik untuk reagen/stik pemeriksaan laboratorium dan mendekatkan layanan pada masyarakat.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Hambatan:

- Masih ada ibu melahirkan di non fasyankes (wilayah pegunungan meratus)
- Masih ada ibu bersalin yang meninggal pada pasca salin
- Masih adanya persalinan dengan dukun kampungg (Mertua)
- Faktor sosial budaya masyarakat dan akses/geografis

Solusi :

- Peningkatan sosialisasi tentang P4K sampai pelosok
- Perlunya pelatihan/ peningkatan kapasitas/ kompetensi petugas tentang pemberian pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
- Himbauan dan pemberian informasi untuk melaksanakan persalinan di fasyankes.
- Mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

3. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

Hambatan:

- Masih ada bayi yang dilahirkan di non fasyankes sehingga tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- Masih ada orang tua/keluarga yang menolak pemeriksaan skrining hipotyroid kongenetal.
- Faktor sosial budaya masyarkat yang lebih mengutamakan pengobatan tradisional

Solusi :

- Kerjasama dengan Kader untuk melakukan kunjungan rumah dan terus ditingkatkan
- Peningkatan kualitas pembelajaran melalui kelas ibu dan konseling gizi untuk mencegah bayi BBLR.
- Edukasi/Penyuluhan tentang kesehatan bayi baru lahir lebih ditingkatkan

4. Pelayanan kesehatan balita (usia 0-59 bulan)

Hal yang ditingkatkan:

- Meningkatkan upaya promotif dan edukatif dengan pembuatan media seperti buku atau selebaran serta cara penyampaian informasi oleh masing-masing Puskesmas untuk disebarluaskan ke wilayah kerjanya terkait perawatan balita.
- Perlu terus advokasi ke lintas sektor sosialisasi pentingnya balita ke Posyandu secara rutin setiap bulan

5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (jumlah semua Anak usia Pendidikan Dasar)

Hambatan:

- Masih ada siswa yang tidak berhadir ke sekolah pada saat penjaringan.
- Ada sekolah yang tidak ada pengelola UKSnya

Solusi:

- Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan rujukan bagi siswa yang tidak hadir.
- Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah (Kepala Sekolah) dalam hal pelaksanaan UKS di Sekolah.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun)

Hambatan:

- Kurang nya sinkronisasi petugas pengentrian cakupan pelayanan usia produktif dan admin CKG di Puskesmas

Solusi:

- Penambahan jumlah/frekuensi kunjungan Posbindu ke desa
- Peningkatan kolaborasi dengan admin kegiatan CKG di puskesmas dalam hal pe inputan data hasil skrening
- Meningkatkan promosi kesehatan tentang perlunya pemeriksaan kesehatan diri

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih)

Hambatan:

- Masih ada lansia tidak datang saat pelayanan posyandu lansia karena alasan jauh dan tidak ada yang mengantar

Solusi:

- Kerjasama dengan Kader untuk pelayanan dengan kunjungan rumah terutama pada lansia risti (usia >70 tahun dan lansia dengan penyakit kronis/berat).
- Pelaksanaan Posyandu Lansia secara dinamis per RT.

8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun)

Hal yang ingin ditingkatkan :

- Lebih diaktifkan lagi sinkronisasi antar petugas PTM Puskesmas dan Admin CKG Puskesmas dalam peninputan laporan di aplikasi ASIK dan Laporan manual nya
- Perlunya pertemuan update data atau validasi data tiap triwulan antara petugas PTM puskesmas dan Dinkes

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun)

Hal yang ingin ditingkatkan:

- Lebih diaktifkan lagi sinkronisasi antar petugas PTM Puskesmas dan Admin CKG Puskesmas dalam peninputan laporan di aplikasi ASIK dan laporan manual nya
- Perlunya pertemuan update data atau validasi data tiap triwulan antara petugas PTM puskesmas dan Dinkes

10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Hal yang ingin ditingkatkan:

- Lebih diaktifkan kembali Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) baik tingkat Kabupaten , Kecamatan dan Desa.
- Peningkatan kegiatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas PMD dan RSHD Barabai dalam hal penanganan ODGJ Berat yang di pasung.

11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (Jumlah orang yang terduga

TB)

Hambatan:

- Penemuan kasus terduga TB masih bersifat pasif di fasyankes/puskesmas/RS
- Pelaksanaaan investigasi kontak belum berjalan secara optimal.
- Petugas pengelola program TB di Puskesmas masih banyak yang merangkap jabatan

Solusi:

- Penjaringan terduga TB di desa akan melibatkan kader ILP di desa, dimana kader ILP sudah diberikan pelatihan cara penemuan kasus terduga TB, cara mengepak sputum dan cara pengiriman sputum ke puskesmas
- Diupayakan penemuan kasus terduga secara aktif dengan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi yang berpotensi banyak penularan penyakit TB, seperti di Lapas Kelas II Barabai dan pesantren-pesantren.
- Mengoptimalkan kegiatan investigasi kontak dengan melibatkan kader ILP di desa dalam kegiatan tersebut.
- Melakukan penyuluhan kesehatan perihal Tuberkulosis ke masyarakat.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (jumlah orang dengan risiko berinfeksi virus HIV)

Hal yang ditingkatkan:

- Penjaringan dan penemuan kasus harus dilakukan secara aktif, melalui skrining di tempat tempat khusus, dengan melibatkan instansi/dinas terkait, seperti TNI/Polri dan Satpol PP dalam kegiatan sidak Penyakit Masyarakat (Pekat) di warung-warung malam.
- Mengoptimalkan kegiatan investigasi kontak dengan mengupayakan kerjasama kelompok kunci/komunitas Waria, salon kecantikan dan lain-lain.
- Melakukan penyuluhan kesehatan perihal HIV-AIDS ke masyarakat.

4.2.7 Program Dan Kegiatan

Tuliskan seluruh Program dan Kegiatan yang memuat penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN	
1	***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	*1*	*Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil*
		2	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.*
		3	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*
		4	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.*
		5	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.*
		6	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.*
		7	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan*

PROGRAM		KEGIATAN	
			pada Usia Lanjut.
		8	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.*
		9	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.*
		10	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.*
		11	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.*
		12	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.*

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	100%	Setiap Tahun
2	Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Pengolahan Air Limbah domestik yang Layak	100%	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

No	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Ket
1	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	100%	90,84%	
2	Persentase Cakupan Pengolahan Air Limbah domestik yang Layak	100%	85,03%	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Peningkatan Sambungan Rumah Air Minum di Daerah Kabupaten	6.238.157.800,00	5.666.726.482 ,00	90,84%
2	Cakupan SPAL yang sesuai standar	4.301.974.200,00	3.658.058.744 ,00	85,03%

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	10 Orang	ASN Lingkup Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Tenaga Kontrak	10 Orang	Tenaga Kontrak Lingkup Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

Permasalahan :

-
-

Solusi :

-

4.3.7 Program dan Kegiatan

Tuliskan seluruh Program dan Kegiatan yang memuat penerapan SPM dalam 1 tahun anggaran)

PROGRAM		KEGIATAN	
1	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*	*1*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*
2	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*	*1*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk SPM Perumahan Rakyat yang merupakan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota..
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
		%	%	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100	Dana APBD sebanyak 10 unit dan Bantuan Dari Provinsi sebanyak 30 unit
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	

4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	% Capaian
1	**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota**				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	14	14	14	100
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	100

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Capaian Program dan Kegiatan yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN
	Program Pengembangan Perumahan			
	Kegiatan :			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	365.812.900,00	181.878.100,00	77,37%
	SubKegiatan :			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	365.812.900,00	181.878.100,00	77,37%
	Kegiatan :			
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.498.800	0	0%
	SubKegiatan :			
1	**Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	30.003.400,-	0	0%
2	**Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	3.495.400,-	0	0%
	Kegiatan :			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	353.234.000,00	165.595.233,00	48,99%
	SubKegiatan :			
1	**Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator**	353.234.000,00	165.595.233,00	48,99%
Total		**752.545.700,-**	**347.473.333,-**	**46,17 %**

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah
1	Sekolah Dasar	-	1	Pembina Utama / IV.e	-
2	SLTP	-	2	Pembina Utama Muda / IV.c	-
3	SLTA	-	3	Pembina Tk. I / IV.b	-
4	Diploma I	-	4	Pembina / IV.a	-
5	Diploma II	-	5	Penata Tk. I / III.d	1
6	Diploma III/Sarjana Muda	-	6	Penata / III.c	-
7	Diploma IV	-	7	Penata Muda Tk. I / III.b	1
8	S-1/Sarjana	4	8	Penata Muda / III.a	1
9	S-2	-	9	Pengatur Tk. I / II.d	-
10	S-3/Doktor	-	10	Pengatur / II.c	-
			11	Pengatur Muda Tk. I / II.b	-
			12	Pengatur Muda / II.a	-
			13	Juru Tk. I / I.d	-
			14	Golongan IX	1
JUMLAH		4		**JUMLAH**	4

Adapun data sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Struktural	1
2	Pelaksana (Staf)	3
3	Fungsional	-
Total		4

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Secara umum permasalahan dihadapi terkait implementasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:

a. Secara anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mengalokasikan dana untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, guna membantu Rehabilitasi rumah korban bencana alam melalui anggaran bantuan sosial pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebanyak 25 unit dengan Kategori rumah rusak ringan menggunakan data yang sudah ada SK penetapan kategori tingkat kerusakan kejadian banjir

bandang Tahun 2021. Saat dilakukan verifikasi dan pendataan ulang di lapangan rumah korban bencana tersebut rata rata sudah di perbaiki secara mandiri, selain itu ada juga yang memang termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni sehingga penanganan nya diusulkan pada penanganan RTLH. Hasil Verifikasi hanya mendapatkan 14 unit Calon Penerima Bantuan sehingga Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran menjadi 14 Unit. Pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapatkan bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 30 unit.

b. Terkait bantuan Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mengalokasikan dana untuk Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena tidak ada program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengakibatkan relokasi.

B. Solusi

Untuk permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang disampaikan:

a. Mengoptimalkan koordinasi terkait penanganan korban bencana dengan BPBD agar informasi terkait rumah yang terdampak bencana bisa segera dibantu.
b. Melakukan pendataan daerah-daerah yang rawan bencana untuk mengantisipasi terjadinya dampak yang buruk akibat bencana alam.
c. Menambah anggaran biaya untuk persiapan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana
d. Mengusulkan penanganan bantuan rumah bagi korban bencana menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, dan alternatif pendanaan lainnya sebagai upaya penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
e. Melakukan koordinasi dengan SOPD teknis terkait yang melakukan Program Pembangunan Infrastruktur yang bisa berdampak pada relokasi rumah warga.

4.4.7 Program Dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , program dan kegiatan yang tercakup adalah sebagai berikut:

i. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

SubKegiatan :

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Kegiatan :

Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

SubKegiatan :

1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan :

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

SubKegiatan :

Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :

1. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
2. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan

Jenis pelayanan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM pada BPBD Kab. HST dalam kurun waktu 1 Tahun adalah :

SPM	TARGET	PEMBIAYAAN / ANGGARAN
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Rp. 61.414.750,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Rp. 133.089.000,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Rp. 1.460.059.600,-
Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	100 %	Rp. 87.385.960,-

Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kurun waktu 1 Tahun adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman, Ketertiban)	100 %	Setiap Tahun	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Response Time Rate	100 %	Setiap Tahun	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3 Realisasi

Realisasi SPM pada BPBD kab. HST dalam waktu 1 tahun anggaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

SPM	Target	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Rp. 61.414.750,-	100%	Rp. 61.113.000,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Rp. 133.089.000,-	100%	Rp. 57.729.000,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Rp. 1.460.059.600,-	100%	Rp. 1.236.250.300,-
Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	100%	Rp. 87.385.960,-	100%	Rp. 83.767.040,-

Realisasi SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam waktu 1 Tahun Anggaran dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

SPM	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah	100%	Rp. 5.608.177.650	83,23 %	Rp 4.667.884.362
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Response Time Rate	100 %	Rp. 2.236.330.700	99,93 %	Rp. 2.234.783.514

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersumber dari APBD, selain dari APBD Kab. Hulu Sungai Tengah juga bisa bersumber dari APBN yang dalam hal ini di salurkan melalui BNPB melalui Anggaran Dana Siap Pakai apabila terjadi Keperluan Mendesak saat terjadi Bencana Alam dan Bencana Non Alam.

Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersumber dari APBD Hulu Sungai Tengah.

4.5.5 Dukungan Personel

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki sumber daya manusia yang membantu dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sejumlah 17 Orang ASN dan ada pula tenaga Non ASN yang terdiri dari 20 Orang Tenaga Kontrak Pramubakti/Administrasi dan 43 Orang Tim Reaksi Cepat bencana. Komposisi pegawai ASN dan Non ASN dapat dilihat pada Table berikut :

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	ASN	17
2	Tenaga Pramubakti / Administrasi	20
3	TRC	43
JUMLAH		**80**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki sumber daya manusia yang membantu dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun sumber daya yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sejumlah 25 Orang ASN dan ada pula tenaga P3K 7 orang P3K paruh waktu 67 orang Outsursing yang terdiri dari 47 Orang, dan 2 Orang Tenaga Kebersihan. Komposisi pegawai ASN dan Non ASN dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	ASN	25
2	P3K	7
3.	P3K PARUH WAKTU	67
4.	TENAGA KEBERSIHAN (OUTSURCING)	2
5.	OUTSURCING	47
JUMLAH		**148**

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Masih Kurangnya SDM (Kuantitas dan Kualitas) di BPBD, diharapkan adanya penambahan SDM yang kompeten di BPBD
- Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki, diharapkan agar adanya penambahkan Sarana dan Prasarana di BPBD
- Belum Optimalnya Sistem pelayanan Informasi Kebencanaan, Pengoptimalan EWS semoga dapat terlaksana
- Belum Optimalnya Pengurangan Risiko dan Dampak Bencana, Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi dan keterlibatan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

NO	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait	Melaksanakan koordinasi secara terjadwal dengan instansi terkait secara berkesinambungan.
2.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan anggota praja	Menambah sarana dan prasarana pendukung pelatihan polisi pamong praja
3.	Mobil operasional yang belum memadai	Menambah/memperbaharui mobil operasional trantibum
4.	Kurangnya pos keamanan di lingkungan setiap Rt/Rw	Membuat Pos keamanan lingkungan
5.	Kurangnya petugas pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi dalam bidang pemadam kebakaran	Mengadakan pelatihan pemadam kebakaran untuk meningkatkan kompetensi anggota damkar
6.	Kurangnnya PPNS yang terlatih dan besertifakat	Diusulkannya ASN yang memiliki kriteria sebagai PPNS

4.5.7 Program Dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai

masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang memuat penerapan SPM dapat dilihat pada table dibawah ini:

Program dan Kegiatan	SPM	Target	Anggaran
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Kegiatan ; Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Rp. 61.414.750,-
Kegiatan ; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Rp. 133.089.000,-
Kegiatan : Pelayanan, Penyelamatan,dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Rp. 1.460.059.600,-
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	100%	Rp. 87.385.960,-

Program dan Kegiatan	SPM	Target	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp. 5.608.177.650
Sub Kegiatan :			
1. Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini, dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan,pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan		100 %	Rp. 3.955.570.000,
2. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia		100 %	Rp. 178.752.150
3. Kerjasama antar lembaga dan kemiteraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	Rp.686.559.900
4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		100 %	Rp. 153.523.000
5. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa		100 %	Rp. 117.437.050,

Program dan Kegiatan	SPM	Target	Anggaran
6. Penyusunan SOP Ketertiban Umum		100 %	Rp. 58.240.000
Kegiatan : Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		100%	Rp. 648.362.800
Sub Kegiatan :			
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan bupati /walikota		100%	Rp. 214.981.000
2. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota		100%	Rp. 262.113.950
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100%	2.236.330.700
Sub Kegiatan :			
1. Pencegahan, Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran	100%	Rp. 2.068.554.500
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	Rp. 167.778.000

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

No	JENIS PELAYANAN DASAR
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	TARGET WARGA NEGARA YANG TERLAYANI
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	520	600

		sosial diluar panti		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30	30
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	650	650
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	35	35
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1500	3158

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	TARGET WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	Capaian =(4):(3) X 100%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	520	600	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30	30	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	650	650	100%

	panti	rehabilitasi sosial diluar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangandanp engemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	35	35	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap& paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1500	3158	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai Berikut :

Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	**APBD**	9.354.911.450
2	**APBN**	
	RST	
	PENERIMA PENA REGULER HST	
	PENERIMA PENA BERDIKARI HST	
	PKH	
Jumlah		9.354.911.450

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PERSONIL	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS Bidang Sosial	3	
2	Tenaga teknis / Administrasi Bidang Sosial	5	
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	11	
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40	
5	Pendamping Program Keluarga Harapan	37	

	(PKH)		
	Total	96	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
- Anggaran terkait SPM kurang optimal untuk Program yang mengampu SPM. - Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan instansi terkait dalam penanganan PPKS - Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peran aktif keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana operasional dalam pelayanan PPKS	

4.6.7 Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Reealisasi Fisik (%)
1	**Pemberdayaan Sosial**	Peningkatan Kapasitas dan Pendamping KAT	0	0	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	**92.264.170**	**79.913.150**	**86,61**
2	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**99.956.500**	**27.057.750**	**27,07**
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**42.000.000**	**42.000.000**	**100**
3	**Rehabilitasi Sosial**	Penyedia Permakanan	**7.336.074.200**	**6.495.598.795**	**88,54**
		Penyediaan Sandang	**48.050.000**	**44.996.728**	**93,65**
		Penyediaan Alat Bantu	**49.716.100**	**21.875.010**	**44**

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026. Dimana telah dipaparkan Dasar Hukum, Visi Misi, dan Kondisi Umum Daerah pada bab Pendahuluan. Kemudian telah dijabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Hulu Sungai Tengah di Tahun 2024 guna menjadi dasar pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah yang dimiliki oleh Kab. Hulu Sungai Tengah.

Sejalan dengan pencapaian kinerja seperti yang dimaksudkan di atas, setiap keberhasilan yang telah kita raih sebelumnya tidak akan pernah membuat kita merasa puas, namun akan menjadi penyemangat untuk terus bekerja dan membangun guna membawa daerah kita ke arah yang lebih baik di masa depan. Segala permasalahan dan kendala yang ada dijadikan bahan pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang serta menjadi pendorong semangat untuk terus berjuang, bekerja dan berinovasi dalam membangun daerah demi kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keberhasilan yang dapat kita raih selama ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan harmonis disemua lini pemerintahan serta partisipasi dan dukungan masyarakat bumi Murakata.

Kami berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan program dan kegiatan yang tidak terlepas dari visi dan misi yang telah dibuat. Dan kami harapkan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini dapat memacu kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Kab. Hulu Sungai Tengah.